

# Panduan Teknis Fasilitator



panduan pelaksanaan kegiatan  
desa/kelurahan tangguh bencana  
atau kegiatan penguatan masyarakat serupa lainnya

EDISI DESEMBER 2016



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat  
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

## **Panduan Teknis Fasilitator**

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana  
atau Kegiatan Penguatan Masyarakat Serupa Lainnya

**EDISI DESEMBER 2016**

### **Pengarah**

B. Wisnu Widjaja – BNPB

### **Penanggungjawab**

Anny Isgianti – BNPB

Sigit Padmono Dewo – BNPB

Pangarso Suryotomo - BNPB

### **Penyusun**

Benny Usdianto – CIRCLE Indonesia

Fransiscus Asisi Widanto – Pujiono Centre

Frans Toegimin – Forum PRB DIY

Heniasih – Paluma Nusantara

Indra Baskoro Adi – Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta

Pudji Santosa – Perkumpulan LINGKAR

Ruhui Eka Setiawan – Perkumpulan LINGKAR

Sigit Purwanto – Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta

Sumino – LPTP

Untung Tri Winarso – Perkumpulan LINGKAR

Wahyu Heniwati – Daya Anissa

Yugyasmono – Pujiono Centre

### **Penyunting**

Eko Teguh Paripurno – Perkumpulan KAPPALA Indonesia /Magister Manajemen Bencana  
UPN “Veteran” Yogyakarta

Ninil Miftahul Jannah – Perkumpulan LINGKAR

Sofyan ‘Eyanks’ – Bingkai Indonesia

Wasingatu Zakiyah – Perkumpulan IDEA

**2016**

# Kata Sambutan

*“Datanglah kepada Rakyat,  
hiduplah bersama mereka,  
mulailah dengan apa yang mereka tahu,  
bangunlah dari apa yang mereka punya,  
tetapi Pendamping yang baik adalah  
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,  
Rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya.”*  
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai *superhero* yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar *output* tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Kedepatian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk *Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)* ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi obyek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisa, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antarpihak. Hasil paduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (*best practice*), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan – BNPB

**Ir. Bernardus Wisnu Widjaya, M.Sc**

# Sekapur Sirih

Menjawab kebutuhan sebagai upaya pengurangan risiko bencana, khususnya berbasis komunitas secara lebih komprehensif dan terintegrasi dengan pembangunan, BAPPENAS-UNDP mencoba menggagas pemaduan upaya PRBBK ke dalam pembangunan di tingkat desa. Rintisan melalui kegiatan “Pengembangan Model Desa Tangguh” pada tahun 2008 tersebut menghasilkan gambaran pelaksanaan PRBBK yang lebih komprehensif mungkin dilakukan. Upaya ini dilanjutkan dan dimatangkan dalam kegiatan “PRBBK – Desa Tangguh” dalam program kerjasama BNPB, BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2009-2011. Kegiatan Desa Tangguh tersebut menjadi salah satu alternatif bentuk PRBBK. Inisiatif didukung BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana).

Penyelenggaraan program pengembangan Destana memiliki empat landasan: i) landasan empiris-faktual bencana yang menunjukkan realitas ancaman di Indonesia, ii) landasan filosofi kearifan lokal yang menunjukkan akar sosial-budaya dari pengurangan risiko bencana, iii) pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian penting, dan iv) otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri termasuk dalam hal pengurangan risiko bencana.

Upaya-upaya membangun masyarakat tangguh yang mampu beradaptasi dan berkembang berhadapan dengan risiko bencana menjadi sebuah keniscayaan. Kemampuan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan sistem sosial-budaya masyarakat mengorganisir diri untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu praktik rekayasa sosial-budaya untuk pengurangan risiko bencana penting untuk dilakukan.

Program Destana mulai diselenggarakan pada tahun 2013 di berbagai daerah melalui kerjasama BNPB - BPBD. Ketiadaan panduan yang memadai bagi Fasilitator Destana pada saat itu, mendorong disusunnya Panduan Fasilitator ini dari praktik kegiatan Destana di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, Panduan Fasilitator ini juga dilengkapi dengan praktik-praktik fasilitasi desa tangguh maupun PRBBK yang sudah dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah/LSM maupun individu di berbagai daerah sebelumnya.

Akhirnya, panduan Fasilitator ini merupakan buah perenungan berbagai individu dari berbagai lembaga yang bersatu-padu bergotong royong. Kekurangan-kekurangan yang masih ada merupakan ruang dan bahan bagi pengembangan Panduan Fasilitator ini di kemudian hari.

Tim Penyusun



# Daftar Isi

Kata Sambutan.....	iii
Sekapur Sirih	iv
Daftar Isi	v
Bagaimana Menggunakan Panduan Ini .....	ix
Panduan 1 Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana .....	1
1.1 Pengenalan Program Desa Tangguh Bencana di Tingkat Kabupaten .....	1
1.2 Pengenalan Program Destana di Desa / Kelurahan .....	7
1.3 Pengenalan Profil Desa / Kelurahan .....	11
Panduan 2 Penyusunan Kajian Dan Peta Risiko Bencana .....	16
2.1 Pengantar.....	16
2.2 Tujuan .....	17
2.3 Hasil Kegiatan.....	18
2.4 Sumberdaya Pendukung.....	18
2.5 Peserta .....	18
2.6 Tempat.....	18
2.7 Metode dan Pendekatan .....	18
2.8 Tahapan Pelaksanaan .....	19
Panduan 3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.....	37
3.1 Pengantar.....	37
3.2 Tujuan .....	40
3.3 Hasil Kegiatan.....	40
3.4 Sumber Daya Pendukung.....	40
3.5 Peserta .....	40
3.6 Lokasi .....	40
3.7 Tahapan Kegiatan .....	40
Panduan 4 Penyusunan Rencana Evakuasi.....	46
4.1 Pengantar.....	46
4.2 Tujuan .....	48
4.3 Hasil Kegiatan.....	48
4.4 Sumberdaya Pendukung.....	48
4.5 Peserta .....	48

4.6	Tempat.....	49
4.7	Tahapan Pelaksanaan .....	49
Panduan 5	Penyusunan Rencana Kontinjensi.....	55
5.1	Pengantar.....	55
5.2	Tujuan .....	56
5.3	Hasil Kegiatan.....	56
5.4	Sumber Daya Pendukung.....	56
5.5	Peserta .....	56
5.6	Lokasi .....	57
5.7	Tahapan Kegiatan .....	57
Panduan 6	Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan .....	76
6.1	Pengantar.....	76
6.2	Tujuan .....	77
6.3	Hasil Kegiatan.....	77
6.4	Sumber Daya Pendukung.....	78
6.5	Peserta .....	78
6.6	Tempat.....	78
6.7	Tahapan Kegiatan .....	78
Panduan 7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana .....	81
7.1	Pengantar.....	81
7.2	Tujuan .....	82
7.3	Hasil Kegiatan.....	82
7.4	Sumber Daya Pendukung.....	83
7.5	Peserta .....	83
7.6	Tempat.....	83
7.7	Tahapan proses.....	83
Panduan 8	Pembentukan Kelompok Relawan.....	91
8.1	Pengantar.....	91
8.2	Tujuan .....	93
8.3	Hasil Kegiatan.....	93
8.4	Sumber Daya Pendukung.....	93
8.5	Peserta .....	94
8.6	Tempat.....	94
8.7	Tahapan Kegiatan .....	94

Panduan 9	Integrasi RPB dan RAK ke RPJM dan RKP Desa/Kelurahan .....	100
9.1	Pengantar.....	100
9.2	Tujuan .....	101
9.3	Hasil yang diharapkan.....	102
9.4	Sumber Daya Pendukung.....	102
9.5	Peserta .....	102
9.6	Tempat.....	102
9.7	Langkah-Langkah Integrasi .....	102
Panduan 10	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program .....	118
10.1	Pengantar.....	118
10.2	Tujuan .....	118
10.3	Sumberdaya Pendukung.....	118
10.4	Hasil Yang Diharapkan: .....	119
10.5	Peserta .....	119
10.6	Tempat.....	119
10.7	Tahapan Kegiatan .....	119
Panduan 11	Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana Evakuasi dan Rencana Kontinjensi .....	125
11.1	Pengantar.....	125
11.2	Tujuan .....	125
11.3	Hasil Yang Diharapkan .....	125
11.4	Sumberdaya Pendukung.....	126
11.5	Peserta .....	126
11.6	Lokasi .....	126
11.7	Tahapan Proses.....	126
Panduan 12	Monitoring dan Evaluasi .....	129
12.1	Pengantar.....	129
12.2	Tujuan .....	130
12.3	Hasil Kegiatan.....	131
12.4	Sumberdaya Pendukung.....	131
12.5	Peserta .....	131
12.6	Tempat.....	132
12.7	Tahapan Kegiatan .....	132
Panduan 13	Teknik Fasilitasi Destana .....	143
13.1	Tugas, Peran atau Fungsi Fasilitator .....	143

13.2 Kemampuan Fasilitator .....	144
13.3 Aturan Main Fasilitator .....	145
13.4 Situasi Menantang Bagi Fasilitator .....	147
13.5 Jenis Pertanyaan Fasilitator .....	148
13.6 Menyusun Rencana Fasilitasi.....	149
13.7 Melakukan Simulasi .....	150
13.8 Persiapan Fasilitasi.....	150
13.9 Pada Saat Fasilitasi.....	152
13.10 Setelah Sesi .....	152
Panduan 14 Participatory Rural Appraisal .....	153
14.1 Pengantar.....	153
14.2 Alat-alat PRA .....	154
Daftar Istilah dan Singkatan .....	171
Daftar Pustaka.....	179
Tim Penyusun	180
Evaluasi dari Pengguna Buku Panduan .....	184
Lampiran Perka BNPB No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa Tangguh .....	186



# Bagaimana Menggunakan Panduan Ini

Buku panduan teknis ini terdiri dari empat bagian, yakni Pengantar, Kemampuan Dasar Fasilitator Destana, Panduan Kegiatan Destana, Bahan Pengkayaan Keterampilan Fasilitator Destana dan Penutup. Pengguna panduan ini disarankan mencermati dan memahami keseluruhan isi bagian panduan dijelaskan di bawah ini.

## **Pengantar**

- ✓ Sambutan dari Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB menerangkan secara ringkas latar belakang dan tujuan inisiasi program Destana oleh BNPB
- ✓ Sekapur sirih, oleh tim penulis, menjelaskan secara kronologis proses kelahiran dan perkembangan (geneses) pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, sehingga diadopsi oleh BNPB menjadi program Destana.
- ✓ Daftar isi, memuat daftar dan nomor halaman keseluruhan isi buku.
- ✓ Bagaimana menggunakan panduan ini, menjelaskan secara ringkas bagian-bagian isi buku panduan dan cara penggunaan.

## **Kemampuan Dasar Fasilitator Destana**

Bagian ini berisi pengantar ringkas tentang keterampilan, sikap, teknik, pendekatan dan metodologi yang bersifat wajib dipahami, dikuasai, dan diterapkan oleh Fasilitator Destana dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Destana.

- ✓ Pengantar Fasilitasi Destana  
Menjelaskan kebutuhan keterampilan, sikap, ruang lingkup peran Fasilitator Destana meliputi fasilitasi proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pengorganisasian masyarakat dalam mempersiapkan kegiatan.
- ✓ Pengantar *Participatory Rural Appraisal*  
Menjelaskan secara singkat tentang *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan Destana.
- ✓ Pengantar Pengelolaan Aset Penghidupan  
Menjelaskan secara singkat tentang konsep aset penghidupan dan model-model pengelolaannya sebagai pendekatan dalam pengurangan risiko bencana.

## **Panduan Kegiatan Destana**

Berisi 12 judul panduan pelaksanaan kegiatan Destana. Urutan isi panduan disesuaikan dengan urutan pelaksanaan kegiatan Destana. Panduan ini tidak diperuntukkan bagi orang awam, tetapi bagi para fasilitator "pemula" agar dapat menjalankan proses fasilitasi dengan lebih mudah dan fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Setiap judul panduan berisi subjudul meliputi;

- ✓ Pengantar  
Berisi uraian latar belakang, konsep dasar, teori atau metoda yang digunakan untuk mengajak fasilitator memahami pentingnya kegiatan ini dilakukan dalam konteks membangun ketangguhan.
- ✓ Tujuan  
Berisi jawaban-jawaban mengapa kegiatan ini dilakukan.
- ✓ Hasil kegiatan  
Merincikan merupakan buah kegiatan minimal yang didapatkan
- ✓ Sumber daya pendukung  
Menjelaskan perangkat standar yang perlu disediakan dan akan digunakan agar proses fasilitasi berjalan baik.
- ✓ Peserta  
Menjelaskan keragaman dan jumlah para pihak yang sebaiknya dilibatkan dalam proses kegiatan sehingga tujuan dan hasil maksimal dapat tercapai.
- ✓ Lokasi  
Menjelaskan tempat pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Tahapan kegiatan  
Menjelaskan urutan tahapan pelaksanaan kegiatan, dan arahan memandu proses fasilitasi dan prakiraan waktu serta metoda yang sebaiknya dipakai dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Arahan ini akan memastikan proses fasilitasi berjalan lancar.
- ✓ Kotak pertanyaan penting  
Berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus muncul, agar proses mendapatkan informasi dan data penting. kotak ini juga akan mengilhami fasilitator menggali pertanyaan lain agar mendapatkan hasil maksimal.

### **Bahan pengkayaan keterampilan fasilitator**

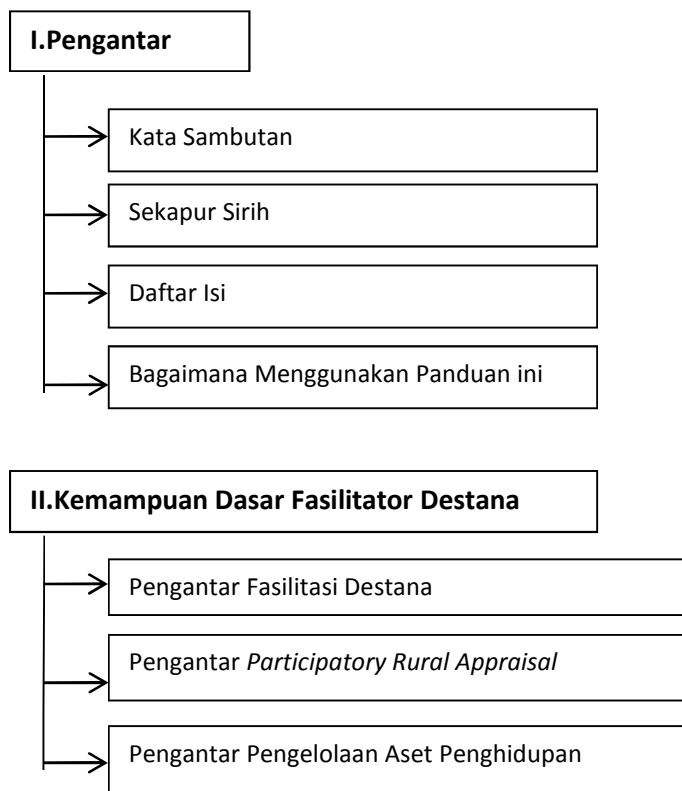
Berisi tiga judul bahan bacaan tentang keterampilan dan sikap-sikap dasar untuk dikuasai dan diterapkan fasilitator Destana. Penguasaan keterampilan dan sikap ini sangat penting bagi fasilitator agar proses fasilitasi dan hasilnya menjadi lebih maksimal. Bahan bacaan meliputi;

- ✓ Teknik Fasilitasi Destana  
Berisi bahasan tentang teknis, pendekatan-pendekatan, dan seperangkat sikap-sikap dasar fasilitator untuk menunjang proses memfasilitasi masyarakat dalam membangun ketangguhan.
- ✓ Penggunaan Alat-alat PRA  
Berisi uraian tentang alat-alat PRA dan langkah-langkah pelaksanaan serta analisisnya sebagai pendekatan pengkajian ancaman, kerentanan dan kapasitas secara partisipatif.
- ✓ Teknik Analisa Aset Penghidupan  
Berisi uraian langkah-langkah pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan serta kapasitas suatu unit masyarakat baik dari sisi manusia, sosial, politik, ekonomi, sumber daya alam dan infrastuktur.

## Penutup

- ✓ Daftar istilah dan singkatan. Berisi uraian penjelasan istilah dan singkatan yang digunakan dalam panduan ini.
- ✓ Daftar pustaka. Berisi pustaka-pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam menuliskan panduan ini.
- ✓ Evaluasi dari pengguna. Berisi formulir untuk menuliskan temuan-temuan penting dalam praktik fasilitasi dapat ditulis di dalam catatan untuk selanjutnya digunakan dalam penyempurnaan buku ini.

### Flowchart Panduan Teknis Destana Model #4 Sentul 11 Mei 2016



### III. Panduan Kegiatan Destana

- 1. Pengenalan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- 2. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Dan Peta Risiko Bencana
- 3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat
- 4. Penyusunan Rencana Evakuasi Desa
- 5. Penyusunan Rencana Kontijensi
- 6. Penguatan Forum Desa/Kelurahan Untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan
- 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- 8. Integrasi RPB Dan RAK Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
- 9. Penyusunan Perencanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Kepada Masyarakat
- 10. Pelatihan Relawan
- 11. Simulasi Sistem Peringatan Dini, Rencana evakuasi dan Rencana Kontingensi
- 12. Monitoring dan Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana

### IV. Bahan Pengkayaan Keterampilan Fasilitator

- Teknik Fasilitasi Destana
- Penggunaan Alat-alat Participatory Rural Appraisal
- Teknik Analisa Pengelolaan Aset Penghidupan

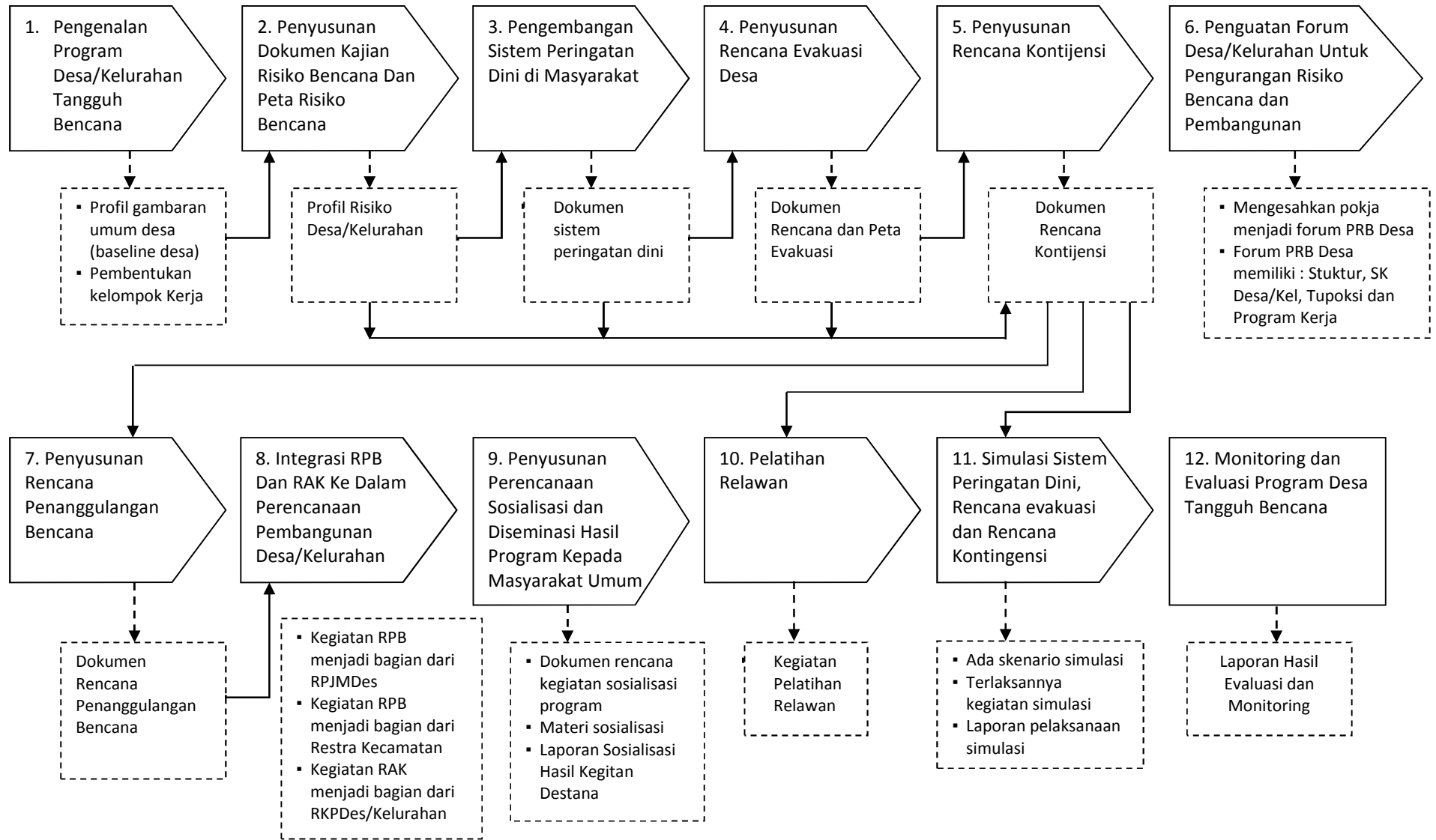
### V. Penutup

- Daftar Istilah dan Singkatan
- Daftar Pustaka
- Evaluasi Dari Pengguna

## Flowchart Tahapan dan Hasil Kegiatan Destana

-----> Keluaran

-----> Masukan



### 1.1 Pengenalan Program Desa Tangguh Bencana di Tingkat Kabupaten

#### 1.1.1. Pengantar

Desa Tangguh Bencana (Destana) secara umum merupakan kegiatan program penguatan masyarakat melengkapi program/proyek serupa yang dilakukan lembaga kementerian lain, LSM atau swasta di desa-desa sasaran. Perhatian Destana terfokus dan menyeluruh pada upaya pengurangan risiko bencana. Inisiatif pelaksanaan program Destana di desa sasaran dapat diprakarsai oleh APBN/BNPB, APBD/BPBD dan/atau lembaga non-pemerintah penyandang sumberdaya. Kegiatan program Destana dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa agar menambah pengetahuan dan keterampilan, guna hidup aman dan nyaman berdampingan dengan ancaman (gunung api, gempa, longsor, banjir, tsunami, angin topan, dll.).

Program Destana menawarkan upaya peningkatan kemampuan yang diperlukan warga untuk dapat mengelola risiko akibat bencana alam atau teknologi yang dapat mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan masyarakat desa. Peningkatan kemampuan masyarakat ini mencakup perihal;

- Pengetahuan tentang kondisi desa secara lebih baik
- Perkiraan/perhitungan potensi risiko bencana berdasarkan kajian yang melibatkan warga
- Penyusunan rencana tindakan mencegah, menangkal dan meredam potensi ancaman
- Keterampilan teknis bagi relawan dan perangkat desa
- Penguatan koordinasi, kerjasama dan simpul-simpul sosial di antar kelompok masyarakat untuk menemukan pilihan-pilihan cara penyelesaian masalah yang ada di antara masyarakat desa sasaran secara mandiri.

Program Destana merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali desa sendiri secara lebih baik, mengkaji risiko bencana, menyusun rencana-rencana tindakan mengurangi risiko bencana, musyawarah, kunjungan verifikasi di lapangan, dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan teknis. Sumberdaya pendukung pelaksanaannya dapat berasal dari inisiatif masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD, APBN, lembaga non pemerintah, lembaga asing atau swasta.

Diseminasi informasi pertama kali dilakukan di tingkat kabupaten, dengan menghadirkan berbagai SKPD, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha tingkat kabupaten. Lembaga-lembaga tersebut kemungkinan sudah melaksanakan kegiatan program peningkatan kemampuan masyarakat di

desa sasaran sebelum dilakukan program Destana ini. Kegiatan-kegiatan program tersebut dapat berupa pendidikan informal dan non-formal, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran terkait bencana, ekonomi, kesehatan, pembangunan fisik, lingkungan, air sanitasi, teknologi tepat guna, dll. Capaian dari program-program pihak lain tersebut dapat menjadi modal dasar program Destana. Karenannya, sangat penting mengumpulkan informasi hasil program pihak-pihak lain tersebut dengan membicarakannya secara dalam pertemuan Pengenalan Destana di Kabupaten ini. Selain itu, pengumpulan informasi dasar ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat sederhana berupa tabel/formulir untuk diisi oleh para peserta perwakilan lembaga yang hadir saat pertemuan ini. Hasil pengumpulan data dasar ini digabungkan dengan informasi yang tersedia di desa/kelurahan/kecamatan kemudian diperlakukan sebagai data dasar/baseline. (*Lihat contoh: Tabel 1. Informasi Pengembangan Desa*)

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Program apa saja yang memberikan dampak baik bagi warga masyarakat dan lingkungan di desa sasaran?
- Apa saja manfaat dari hasil program-program sebelumnya yang nantinya dapat disinergikan dengan program Destana?
- Bagaimana caranya agar program-program penguatan di desa dapat saling melengkapi dan selalu berkembang untuk kemanfaatan masyarakat?

### 1.1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengenalan Program Destana Tingkat Kabupaten ini adalah:

- Sosialisasi Program Destana kepada para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.
- Memperoleh gambaran dan informasi mengenai program/kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh lembaga lain di wilayah desa/kelurahan sasaran, baik bidang kebencanaan maupun program pengembangan masyarakat lainnya.
- Mendapatkan masukan dan saran untuk digunakan dalam menyusun strategi pelaksanaan Program Destana yang direncanakan.
- Membangun sinergi para pihak yang mendukung program/kegiatan.
- Meminimalkan dan menghindari pengulangan kerja atau tumpang tindih kegiatan.

### 1.1.3. Hasil Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari pertemuan Pengenalan Program Destana Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman para pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota tentang Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

2. Membangun sikap dukungan, kerjasama, dan kontribusi dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana dari para pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota
3. Informasi dan data dasar tentang program/kegiatan pengembangan masyarakat lainnya dari para pihak pemangku kepentingan lembaga yang berguna dalam (i) penetapan garis dasar (baseline) untuk mengukur kemajuan yang akan dicapai pada akhir program, (2) membantu menentukan prioritas kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan desa/kelurahannya, dan (3) menghindari pengulangan kerja atau tumpang tindih atas satu produk (kajian, peta, rencana, organisasi) di desa/kelurahan yang sama.

#### 1.1.4. Sumberdaya Pendukung

- a. Bahan presentasi
- b. Laptop / komputer, LCD
- c. Kertas plano (*flip chart*) dan spidol
- d. Formulir berisi pertanyaan untuk mengetahui program yang sudah/sedang/akan dilakukan di desa sasaran oleh SKPD atau lembaga lainnya
- e. Alat tulis untuk mencatat poin penting selama diskusi

#### 1.1.5. Peserta

Peserta kegiatan berjumlah kira-kira 30 peserta ini terdiri

1. BPBD Provinsi
2. Bappeda, Kesbangpollinmas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Kehutanan dan SKPD terkait.
3. TNI dan Polri
4. PMI/SAR/RAPI/ORARI, LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan lembaga/organisasi terkait lainnya.

#### 1.1.6. Tempat

- Kantor Balai Kabupten/Kota atau tempat lain yang tersedia dan layak untuk pelaksanaan peningkatan koordinasi di Kabupaten/Kota.

#### 1.1.7. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah PJOK BPBD Kabupaten/Kota.

#### 1.1.8. Tahapan Kegiatan

##### I. TAHAP PERSIAPAN

- BPBD Kabupten/Kota** dan lembaga lain yang berkepentingan **berkoordinasi di kabupaten** dan bersepakat **melaksanakan Program Destana** sebagai pelengkap kegiatan serupa di desa yang ada selama ini.
- Setda, BPBD, atau lembaga lain menginisiasi kegiatan ini mengeluarkan **undangan** (dengan waktu yang tidak mendadak), yang dilampiri **Kerangka Acuan Kegiatan**,



**agenda**, dan permintaan agar setiap lembaga yang diundang dapat berbagi **data/informasi kegiatannya di desa**.

- Ikhtiar verifikasi: Undangan tertulis dan diedarkan

## II. TAHAP PELAKSANAAN

### ▪ Langkah-Langkah:

1. Registrasi dan pengisian form informasi program/kegiatan pengembangan masyarakat oleh lembaga/SKPD.
2. Pembukaan dan Penjelasan maksud dan tujuan kegiatan.
3. Pemaparan Program Destana. Presentasi Program Destana kepada masyarakat, (2) Perkenalan struktur pelaksana program Destana (termasuk memperkenalkan Fasilitator Destana).
4. Presentasi mini oleh setiap pemangku kepentingan/kebijakan utama<sup>1</sup> dan perwakilan kecamatan/desa tentang kegiatan yang sudah/sedang/akan dilakukan, tujuan, pendekatan dan hasilnya.
5. Diskusi, saran, dan rekomendasi konstruktif, serta pembuatan Rencana Tindak Lanjut, termasuk cara untuk melakukan kerjasama, monitoring, dan evaluasi gabungan.
6. Penutupan kegiatan.

## III. TAHAP PELAPORAN

Fasilitator bersama Penyelenggara merangkum inti diskusi dalam;

1. Tulisan laporan singkat ( $\pm$  2 halaman) berisi:
  - Proses pelaksanaan kegiatan
  - Catatan poin-poin penting yang dirangkum selama pertemuan
  - Saran dan Rekomendasi
2. Lampiran-lampiran
  - Daftar kehadiran peserta (nama dan nomor kontak institusi)
  - Formulir yang sudah berisi deskripsi kegiatan oleh SKPD dan lembaga lain yang bekerja di desa sasaran, dilengkapi
  - Peta-peta, sketsa, dsb. bila tersedia dari lembaga yang hadir (*bila ada*)
  - Daftar personil desa terlatih, informasi pengalaman, dll (*bila ada*)

---

<sup>1</sup>SKPD, lembaga non-pemerintah, swasta, dll.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contoh Formulir untuk mengetahui lembaga apa sudah / sedang / akan melakukan program kegiatan apa untuk peningkatan masyarakat di desa sasaran.

**Tabel 1.1 Informasi Pengembangan Desa/Kelurahan**

<b>Nama Lembaga</b>	
<b>Nama Program</b>	
<b>Lokasi Program</b>	
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	...../..... sampai dengan ...../.....
<b>Tujuan:</b>	1. .... 2. .... 3. ....
<b>Kegiatan:</b>	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....
<b>Hasil:</b>	1. .... 2. .... 3. ....
<b>Lampiran:</b>	1. .... 2. .... 3. ....

## 1.2 Pengenalan Program Destana di Desa / Kelurahan

### 1.2.1 Pengantar

Pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang program berguna dapat menggerakkan minat belajar, kesungguhan untuk terlibat aktif, dan proses alih pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan program. Untuk itu pengenalan program kepada semua unsur di desa, termasuk Pokja Destana, perangkat Pemerintah Desa, BPD, Kecamatan, Koramil, Polsek, dan pihak terkait lainnya sebaiknya dilakukan pada hari pertama pada sesi pertama.

Dalam kegiatan ini juga penting untuk membangun pemahaman bahwasanya Program Destana semestinya menjadi “program pelengkap” dari program-program dari kementerian atau dari lembaga non pemerintah lainnya yang ada di desa/kelurahan. Karenanya semua program peningkatan kemampuan masyarakat di desa haruslah bersinergi, dan bukan sebaliknya – bersaing berebut tempat kerja, atau personil di desa yang berkemampuan.

Untuk itu sangat penting untuk menggali informasi mengenai program apa saja yang selama ini sudah/sedang/akan dilaksanakan di desa sasaran. Informasi, dokumen laporan atau hasil program lainnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi pelaksanaan Destana.

*Pokja Destana.* Pada prinsipnya semua program pengembangan masyarakat desa, termasuk Destana, setidaknya perlu diketahui oleh seluruh warga masyarakat desa. Program yang baik niscaya berorientasi untuk memberikan manfaat bagi seluruh warga desa, tanpa terkecuali. Pertanyaannya, bagaimana untuk memastikan bahwa kemanfaatan sebuah program bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh? Siapa yang harus dilibatkan?

Destana dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif di mana pelibatan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa/kelurahan. Namun, dengan pelbagai keterbatasannya, tentu tidak semua warga harus dilibatkan. Untuk itu, pelibatan sejumlah warga yang merupakan keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat menjadi pilihan untuk memastikan bahwa seluruh komponen masyarakat ada dan terlibatkan dalam pelaksanaan program. Di samping itu, keterlibatan perangkat Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh masyarakat juga menjadi penting.

Dalam pembentukan kelompok perwakilan warga, penting juga untuk mempertimbangkan komposisi jumlah laki-laki perempuan dan juga pelibatan kelompok rentan (seperti difabel atau penyandang cacat, anak, usia lanjut, anak-anak yang gagal bersekolah, dll). Secara umum pemilihan perwakilan juga memastikan bahwa;

- Keterwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti kelompok tani, PKK, Karang Taruna, kelompok kesenian, dan sebagainya.
- Keterwakilan kelompok profesi, seperti pedagang, nelayan, ternak, guru/PNS, dll.
- Keterwakilan kelompok rentan/marginal, seperti difabel atau penyandang cacat, anak, usia lanjut, anak-anak yang gagal bersekolah, dll.
- Keterwakilan per wilayah/per dusun.

Hal tersebut di atas digunakan untuk memastikan bahwa semua warga terwakili oleh utusan kelompok dan untuk pemeratakan kesempatan belajar bagi warga lainnya. Selain itu, perwakilan kelompok dipersyaratkan adalah mereka yang;

1. Ingin belajar tentang kebencanaan
2. Dapat berbagi informasi dalam pertemuan di desa, dan
3. Meneruskan informasi kepada kelompoknya.

Setiap perwakilan juga harus dipastikan mendapatkan kesempatan berbicara, merasa bebas berpendapat, dihargai dan setara selama pelaksanaan program Destana. Dan selanjutnya mereka disebut sebagai **Kelompok Kerja Desa (Pokja Destana)**.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Mengapa program Destana diperlukan di desa?
- Siapa saja yang melaksanakan kegiatan program Destana?
- Siapa yang akan mendapatkan kemanfaatan dari program ini?

### 1.2.2 Tujuan

Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama antara semua pihak yang terlibat mengenai perihal Program Destana, yakni tentang:

- Tujuan program, hasil, waktu program, penyelenggara, dana, sumberdaya lain yang diperlukan
- Pembentukan Kelompok Kerja Desa untuk pengembangan desa tangguh bencana: Pokja Destana.
- Peran dari setiap pelaku yang terlibat dalam program (Fasilitator, Pokja Destana, Pemerintah Desa, BPD, BPBD), serta hak dan tanggung jawabnya
- Jadwal agenda, tempat pelaksanaan dan kegiatan program, termasuk lokakarya dalam ruang dan kunjungan verifikasi data di lapangan
- Pendekatan, teknik dan metode fasilitasi yang diterapkan, pentingnya partisipasi Pokja Destana selama pelaksanaan kegiatan program
- Penggunaan dana, termasuk kesepakatan untuk menyisihkan dana sebagai kas bersama untuk dapat menjaga keberlanjutan semangat tumbuh-kembang

Selain itu, pemahaman yang baik dan kesepakatan bersama semua pelaku program Destana yang dicapai di desa sasaran dapat membangun rasa kepemilikan peserta terhadap jalannya proses dan hasil untuk menjaga keberlangsungan kegiatan setelah berakhirnya program.

### 1.2.3 Hasil Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- Adanya pemahaman peserta tentang Program Destana secara utuh
- Kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat mengenai isi program, proses pelaksanaan, hasil dan manfaat program, serta peran dan tugas masing-masing.
- Kesempatan kepada semua pemangku kepentingan di desa sasaran untuk menguatkan semangat kerjasama, komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan peningkatan kemampuan masyarakat desa secara berkelanjutan.
- Kesadaran bahwa program Destana adalah kegiatan milik warga masyarakat dan karenanya partisipasi aktif warga mutlak serta alih pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan benar-benar terjadi kepada perwakilan warga desa demi menjaga kelanjutan proses peningkatan kemampuan masyarakat desa setelah berakhirnya masa kerja program Destana di desa sasaran.
- Pemahaman peserta tentang peran para pihak yang terlibat dalam program, termasuk peran aktif Pokja Destana
- Terbentuknya Pokja Destana

### 1.2.4 Sumberdaya Pendukung

Kertas plano (*flip chart*) dan spidol tersedia secukupnya untuk menuliskan informasi dasar dan penting, atau bila tersedia materi paparan (*powerpoint/ppt*) computer dan LCD proyektor. Bila tersedia informasi tertulis/fotokopi tentang Destana dapat dibagikan kepada semua peserta untuk dipelajari di rumah.

### 1.2.5 Peserta

Peserta terdiri dari perwakilan semua kelompok masyarakat di desa, Fasilitator, BPBD Kabupaten, Camat, Perangkat Pemerintah Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, BPD, relawan (SAR/RAPI/ORARI).

### 1.2.6 Tempat

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di Balai Desa/Kantor Kelurahan atau tempat lain yang tersedia di lingkungan desa dan dimana kondisi ruang layak untuk melakukan pertemuan dan kerja.

### 1.2.7 Tahapan Pelaksanaan

#### I. TAHAP PERSIAPAN

Penyelenggara dan Fasilitator menyepakati informasi yang akan didiskusikan bersama masyarakat. (*Lihat Juknis Desa Tangguh Bencana 2015*). Bila tersedia, cetakan informasi tertulis terkait program Destana dan informasi lain dapat dibagikan kepada peserta sebelumnya.

#### II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Registrasi
2. Penjelasan maksud dan tujuan pertemuan (Waktu ± 10 menit)

3. Pembukaan dan Sambutan (Waktu ± 20 menit)  
Lokakarya pertama di desa dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota/lembaga penyelenggara didampingi Kepala Desa/Lurah/Camat setempat dan Fasilitator.
4. Paparan BPBD Kabupaten/Kota (Waktu ± 30 menit)  
BPBD Kabupaten/Kota menjelaskan penjelasan tentang Kebijakan Nasional dan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan Program Destana.
5. Paparan Kegiatan-Kegiatan Destana (Waktu ± 60 menit)  
Fasilitator menjelaskan tentang kerangka kerja Destana dan pelaksanaan kegiatan oleh Fasilitator. Materi yang dijelaskan meliputi:
  - Tujuan dan strategi pelaksanaan program
  - Proses, tahapan-tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan
  - Hasil-hasil yang hendak dicapai dari tiap kegiatan
  - Pembentukan dan keterlibatan Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Destana
6. Diskusi dan Tanya Jawab (Waktu ± 60 menit)
  - Sesi diskusi dan tanya jawab untuk pemahaman bersama dan menyepakati tentang:
    - Tujuan yang hendak dicapai dalam Program Destana
    - Peran dan Tanggung Jawab<sup>2</sup> serta partisipasi aktif Pokja Destana yang dipilih
    - Menentukan tempat dan jadwal<sup>3</sup> pelaksanaan lokakarya, diskusi kelompok, konsultasi/diskusi, kunjungan lapangan, dll.
    - Sumber pendanaan, jumlah dan pengalokasian untuk semua kegiatan secara proporsional
    - Pengelolaan dana dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa serta menerapkan cara-cara pelaporan yang terbuka dan bertanggung jawab.
    - Dana yang dialokasikan untuk kompensasi kehadiran peserta dapat diusulkan kepada Kelompok Kerja Desa untuk disisihkan sebagian guna mendanai kelanjutan kegiatan ini atau memulai kegiatan ekonomi untuk kemanfaatan bersama. Misalnya, setengah dari uang kompensasi peserta digunakan untuk menambah dana simpanan kelompok atau forum desa yang dibentuk.
    - Pembentukan Kelompok Kerja Destana (Pokja Destana)
7. Penutupan kegiatan (Waktu ± 10 menit)

### III. PELAPORAN

Laporan hasil kegiatan ini berupa **laporan proses** yang berisi rangkuman catatan singkat butir-butir bahasan dan kesepakatan yang dicapai.

---

<sup>2</sup>Lihat contoh di Juknis Destana 2015

<sup>3</sup>Lihat contoh di Juknis Destana 2015

## 1.3 Pengenalan Profil Desa / Kelurahan

### 1.3.1 Pengantar

Pemahaman yang baik tentang gambaran desa/kelurahan adalah kunci bagi Fasilitator. Kegiatan ini dilakukan agar Fasilitator mendapatkan pemahaman dasar untuk mengetahui seluk-beluk kondisi dan karakter lingkungan desa dan penduduknya. Selain pertemuan bersama Pokja Desa, kegiatan pengumpulan data informasi dapat dilakukan secara informal; observasi dan wawancara warga, maupun pengumpulan dokumen-dokumen desa yang terkait.

Dari kegiatan sebelumnya, beberapa dokumen barangkali telah terkumpulkan. Dokumen profil desa misalnya. Dokumen ini menyediakan seluruh data dan informasi formal desa/kelurahan sasaran, meliputi gambaran posisi geografis, kondisi topografi, geomorfologi, hak dan keperuntukkan lahan, demografis, sosial, ekonomi, budaya, kondisi hidro-klimatologi, dll. Dalam dokumen ini seluruh data informasi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, peta, gambar, sketsa, daftar, dan lainnya.

Observasi dan wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk melengkapi data-data desa yang belum tersajikan dalam dokumen desa. Dari metode setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana pendapat maupun kebiasaan-kebiasaan warga, seperti praktik-praktik pengembangan masyarakat yang ada, praktik-praktik masyarakat yang berkenaan dengan kebencanaan, jam-jam penting (kerja) warga, kelompok-kelompok masyarakat, gambaran *stakeholder* desa, dan lainnya. Dengan analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, fasilitator memiliki modal awal untuk langkah dan strategi kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Secara umum, pertemuan ini untuk memastikan bahwa potret desa yang ditemukan di awal terkonfirmasi dan terverifikasi. Selain itu, data informasi yang telah dikumpulkan menjadi bahan pengembangan basis data (*baseline*) tentang ketangguhan desa/kelurahan. Sehingga diharapkan di akhir program, *baseline* ini menjadi basis untuk mengukur hasil maupun capaian dari pelaksanaan Program Destana.

Selain itu, data informasi tersebut nantinya juga akan dipadukan dengan hasil-hasil program Destana lainnya, seperti Kajian Risiko Bencana. Jika profil desa belum tersedia, maka setidaknya akan membantu pemerintah desa dalam membuat profil desa. Dan jika di desa/kelurahan sasaran telah tersedia profil desa dalam bentuk yang masih sederhana atau bahkan sudah rinci, setidaknya akan membantu pemerintah desa dalam membuat atau melakukan pemutakhiran profil desa berbasis masyarakat.

Profil desa merupakan dokumen utama bagi desa. Dokumen tersebut menjadi rujukan dalam membuat dan mengembangkan program/kegiatan desa. Dalam konteks program, profil desa yang sudah memadukan hasil kajian risiko desa, akan bermanfaat dalam pengembangan dokumen capaian program lainnya, seperti (rencana evakuasi, rencana penanggulangan bencana/rencana aksi komunitas).



## Pertanyaan Penting

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Se jauh mana kondisi desa/kelurahan sasaran diketahui?
- Data/informasi atau pengalaman apa yang ada untuk menjelaskan lebih dalam tentang kondisi desa sasaran?

### 1.3.2 Tujuan

Pertemuan ini bertujuan untuk:

1. Membangun pemahaman bersama mengenai kondisi geografis, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan kondisi geo-hidro-klimatologi, kepemilikan tanah (ulayat, adat, dll), sejarah singkat tentang permukiman penduduk, serta kemampuan masyarakat dan desanya.
2. Memperoleh informasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada

### 1.3.3 Hasil Kegiatan

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

- Pemahaman bersama tentang kondisi seluk-beluk perihal kondisi dan karakter desa.
- Kesepakatan rincian data informasi dan peta desa yang akan digunakan sebagai rujukan pelaksanaan program Destana.
- Analisis singkat tentang potret/gambaran desa/kelurahan.

### 1.3.4 Sumberdaya Pendukung

- Dokumen formal desa (profil desa, peta/sketsa desa, informasi dasar terkait data kependudukan dan latar belakangnya, kondisi alam dan penghidupan masyarakat)
- Kertas plano, metaplan dan spidol.

### 1.3.5 Peserta

- Dalam wawancara semi-terstruktur; selain perangkat desa dan tokoh masyarakat; perlu juga melibatkan beberapa warga dari kelompok masyarakat, kelompok profesi, kelompok rentan, sebagai narasumber.
- Peserta lokakarya terdiri dari Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pokja Destana, dan Fasilitator.

### 1.3.6 Tempat

Balai Desa/Kantor Kelurahan atau tempat lain yang tersedia di lingkungan desa dan layak untuk pelaksanaan lokakarya bersama Pokja Destana.

### 1.3.7 Tahapan Pelaksanaan

#### 1. TAHAP PERSIAPAN

1. Pengumpulan data dan informasi dari kaji cepat dokumen desa, wawancara semi terstruktur, dan observasi
2. Sumber data dan informasi berupa profil desa, dokumen desa yang relecan, tulisan, peta, kajian, laporan, dsb dari berbagai sumber yang terpercaya yang memuat informasi penting tentang desa/kelurahan sasaran: wilayah, lahan, demografi, profesi, pembangunan dan penganggaran, dll.
3. Bila profil desa sudah tersedia, gunakan yang ada. Bila informasi belum lengkap, tambahkan informasi penting dengan wawancara semi-terstruktur dengan perangkat dan tokoh masyarakat setempat sebagai narasumber. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam pelaksanaan program ini dapat membantu pemerintah desa dalam membuat atau mengembangkan profil desa.
4. Tentukan topik dan pertanyaan kunci yang akan menjadi bahan diskusi kelompok.
5. Buat check list terkait profil kesiapsiagaan bencana desa. Lampiran Tabel 2 adalah contoh saja, silakan dikembangkan.

#### 2. TAHAP PELAKSANAAN

1. Registrasi
2. Pembukaan dan penjelasan maksud dan tujuan pertemuan lokakarya **(Waktu ± 10 menit)**
3. Diskusi Kelompok. Bagi peserta ke dalam kelompok. Dengan menggunakan peta/sketsa desa, masing-masing kelompok mendiskusikan topik tertentu terkait Profil Desa. Misalnya; wilayah, tata guna lahan/ruang, topografi dan ciri-ciri geomorfologi, sebaran penduduk dan latar belakang kegiatan penghidupannya/mata pencaharian, perkembangan di desa hingga saat ini, dan lainnya. **(Waktu ± 30 menit)**
4. Presentasi dan Diskusi Pleno. Perwakilan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok. Berikan kesempatan anggota kelompok untuk penjelasan tambahan jika ada. Diskusikan dengan mendorong peserta dari kelompok lain untuk menanggapi, mengkoreksi, atau menambahkan informasi. **(Waktu ± 60 menit)**
5. Simpulan. Fasilitator menyimpulkan kembali poin-poin penting hasil diskusi. Selanjutnya, Fasilitator dapat memandu diskusi yang lebih mengerucut pada perihal kejadian-kejadian yang peserta anggap sebagai bencana. Misalnya, topik topografi dengan adanya sungai yang mungkin dapat mengetengahkan ancaman banjir, lereng-lereng untuk ancaman longsor, dll. Buat inventarisasi dari pendapat-pendapat peserta. **(Waktu ± 30 menit)**
6. Penutupan kegiatan. Dalam penutupan ini, fasilitator menyampaikan bahwa hasil diskusi dan inventarisasi kejadian bencana akan digunakan untuk kegiatan berikutnya, yaitu Kajian Risiko Bencana di Desa/Kelurahan **(Waktu ± 10 menit)**

### 3. TAHAP PELAPORAN

Fasilitator merangkum inti pembicaraan menjadi **laporan tertulis singkat** berisi:

- Catatan penting tentang penjelasan, proses, dan hasil-hasil yang disepakati dan rencana tindak lanjut (1-2 halaman)
- Dokumentasi foto
- Lampiran-lampiran bila ada

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Lampiran:

Contoh tabel untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan atau dokumen apa saja sudah dikembangkan di desa sasaran.

**Table. Formulir Data Pelaksanaan Penguatan Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana**

Komponen Penanggulangan Bencana	Ada / Tidak Ada	Dibuat		Keterangan
		Oleh	Tahun	
1. Peta Desa 2. Profil Desa				
1. Peta Ancaman 2. Kajian Ancaman				
3.1. Peta Kerentanan/Kapasitas 3.2. Kajian Kerentanan/Kapasitas				
4.1. Peta Risiko 4.2. Kajian Risiko				
5.1. Rencana Penanggulangan Bencana 5.2. Rencana Aksi Komunitas				
6. Sistem Peringatan Dini				
7. Rencana Evakuasi				
8. Rencana Kontinjensi				
9. Sosialisasi:				
10. Simulasi / Drill Kebencanaan: Jenis latihan: ..... Jenis ancaman: .....				
11. Pelatihan Relawan: Jenis latihan: ..... Lama latihan: ..... Daftar warga yang dilatih: .....				
12. Strategi Pengintegrasian Kajian Bencana–RPJMDes				
13. Forum / Organisasi Penanggulangan Bencana				
14. ....				
15. ....				

# Panduan 2

## Penyusunan Kajian dan Peta Risiko Bencana

### 2.1 Pengantar

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Pasal 1 ayat 17 UU PB).

Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yakni (1) ancaman, (2) kerentanan, dan (3) kapasitas.

Faktor ancaman. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Pasal 1 ayat 13 UUPB). Ancaman dapat berupa kejadian alamiah, hasil samping kegiatan manusia atau gabungan keduanya. Ancaman alamiah seperti gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, wabah, hama, banjir dan longsor. Ancaman akibat hasil samping kegiatan manusia meliputi konflik sosial, pencemaran, kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi. Ancaman seperti banjir, longsor, wabah, hama, dan kecelakaan transportasi juga sering diartikan sebagai kombinasi antara peristiwa alamiah dan kesalahan manusia.

Faktor kerentanan. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu (Perka BNPB No 1. Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana, Bagian D point 12). Dalam kalimat lain kerentanan dapat diartikan sebagai, kondisi-kondisi negatif penyebab masyarakat dapat terpapar ancaman. Tinggal di kawasan rawan bencana, miskin, tidak paham tanda-tanda ancaman, masa bodoh, korupsi, kebijakan pembangunan tidak sensitif bencana adalah contoh-contoh kelemahan paling umum di Indonesia.

Faktor kapasitas. Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana (Perka BNPB No 1. Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana, Bagian D point 11). Dalam kalimat sederhana kerentanan dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk sumberdaya pada masyarakat dan parapihak (misalnya biaya, tenaga, alat, pengetahuan, kebijakan, sikap) untuk mencegah atau mengurangi ancaman, menghindari ancaman serta mengurangi kelemahan-kelemahan.

Pola hubungan tiga faktor diatas sehingga menghasilkan risiko bencana dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini:

$$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman} \times \text{Kelemahan}}{\text{Kekuatan}}$$

Harap diingat, rumusan matematis di atas hanya merupakan ilustrasi untuk menggambarkan pola hubungan ketiga faktor risiko bencana.

Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi apabila ancaman dan kelemahan tinggi sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. Mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, kerentanan dan kapasitas. Risiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila; 1) ancaman dikurangi, dicegah atau dihilangkan, 2) kerentanan lemah diturunkan, atau 3) kapasitas ditingkatkan. Ada jenis-jenis ancaman dapat dicegah atau dihilangkan, misalnya wabah. Ada pula jenis ancaman tidak dapat dicegah misalnya gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi.

Mengurangi risiko bencana pada satu jenis ancaman dapat dilakukan dengan mengurangi kerentanan-kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Membentuk tim siaga bencana kampung, merancang jalur evakuasi tsunami, menentukan tanda bahaya, merupakan bentuk kegiatan mengurangi risiko bencana dengan cara meningkatkan kapasitas sekaligus mengurangi kerentanan.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Apa pengertian risiko bencana?
- Bagaimana pola hubungan antar faktor risiko bencana; ancaman, kerentanan dan kapasitas?
- Bagaimana cara melakukan penilaian ancaman, kerentanan, kapasitas dan tingkat risiko bencana
- Bagaimana menyusun dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana

## 2.2 Tujuan

- Mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis ancaman, karakter atau sifat-sifatnya, serta kemungkinan dampaknya pada individu dan masyarakat.

- Mengidentifikasi dan menganalisa kerentanan individu maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman serta mengembangkan alternatif-alternatif untuk mengurangi kerentanan.
- Mengidentifikasi dan menganalisa bentuk-bentuk kapasitas individu maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman serta mengembangkan alternatif-alternatif untuk meningkatkan kapasitas.
- Menganalisa risiko bencana berdasarkan ancaman, kerentanan dan kapasitas.
- Menyusun dokumen kajian risiko bencana
- Menyusun peta risiko bencana

## **2.3 Hasil Kegiatan**

- Draft dokumen kajian risiko bencana
- Peta risiko bencana

## **2.4 Sumberdaya Pendukung**

- Data dasar desa
- Peta/data kejadian dan sebaran ancaman
- Hasil penelitian perguruan tinggi

## **2.5 Peserta**

Partisipan atau peserta terdiri dari 20-30 orang yang merupakan wakil dari warga untuk pertemuan tingkat padukuhan atau wakil padukuhan untuk pertemuan tingkat desa. Partisipan diharapkan ada keterwakilan dari: laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok/organisasi desa/padukuhan, perangkat desa, lembaga desa, RT, RW dan lain-lain yang mencerminkan isi organisasi/kelompok formal maupun non formal desa/padukuhan

## **2.6 Tempat**

Pengkajian risiko bencana dilakukan di dalam dan luar ruangan.

## **2.7 Metode dan Pendekatan**

### **2.7.1 Metode Partisipatif**

Pendekatan partisipatif dipilih dalam pengkajian risiko bencana karena lebih praktis untuk memecahkan masalah. membangun kesadaran atas permasalahan dan membangkitkan motivasi untuk menangani permasalahan.

Pengkajian partisipatif menggunakan metode-metode luwes dan umumnya kualitatif sehingga mudah dimengerti. Pelakunya masyarakat bersama Fasilitator. Fasilitator berperan memandu pelaksanaan pengkajian, meliputi menjelaskan metode, memotivasi masyarakat melakukan kajian pada diri sendiri, menjadi mitra kritis atas analisis hasil kajian, menjadi wasit perumusan hasil kajian. Sedangkan masyarakat sebagai pemilik hasil sekaligus pelaku pengkajian di wilayahnya sendiri. Hasil kajian dapat langsung dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan tindakan. Dapat pula dianalisis secara lebih mendalam untuk menemukan akar masalah kemudian dirumuskan dalam rencana aksi bersama. Seluruh hasil kajian dipertanggungjawabkan pada diri sendiri.

Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengkajian maka dipilih metode PRA (*participatory rural appraisal*) atau Pengkajian Kondisi Desa Partisipatif. Metode PRA menjadi pilihan metode paling nyaman. PRA menggunakan beragam metoda visualisasi sehingga lebih menarik, mudah dipahami, tidak membosankan, santai dan informal. Selain itu metode-metode PRA lebih berbasis analisis kelompok dibanding perorangan, lebih membandingkan daripada mengukur. Dengan begitu, para pelibat pengkajian dapat saling belajar. Penerapan PRA dapat dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah warga desa dengan memperhatikan prinsip keterwakilan semua golongan masyarakat, survai lapangan dan mengunjungi rumah/keluarga.

### **2.7.2 Pendekatan Aset Penghidupan**

Risiko bencana merupakan perkiraan kemungkinan kerugian pada satu atau lebih aset penghidupan akibat suatu kejadian. Aset penghidupan adalah sumberdaya-sumberdaya dimiliki, dapat diakses, dapat dikontrol oleh suatu unit sosial (individu, keluarga, komunitas) untuk mempertahankan hidup. Jenis aset penghidupan dikelompokkan dalam kategori:

- Aset Manusia; keterampilan, pengetahuan, kesehatan, sikap/perilaku dan motivasi
- Aset Ekonomi/Finansial; tabungan, ternak, pinjaman, harta benda,
- Aset Fisik/Infrastruktur; rumah, bangunan pemerintah, jalan, jembatan.
- Aset Alam/Lingkungan; air, tanah/lahan, hutan, hewan buruan, sungai, udara bersih,
- Aset Sosial-Politik; famili, teman, organisasi/lembaga, kebijakan

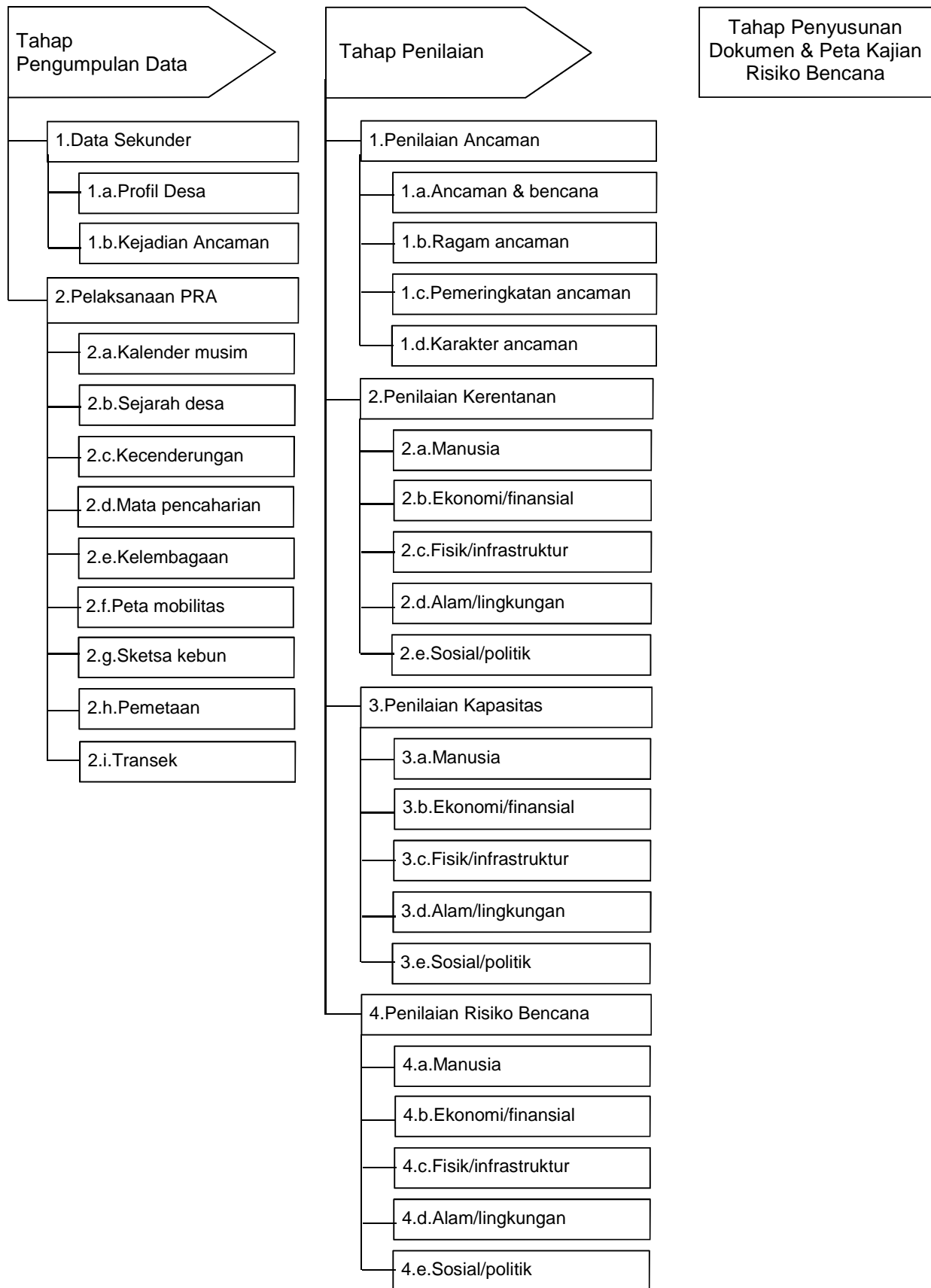
Hampir semua jenis aset penghidupan berpotensi rusak atau hilang akibat suatu kejadian ancaman. Kerusakan atau kehilangan satu atau lebih jenis aset penghidupan dapat mengganggu kemampuan suatu manusia mempertahankan hidup. Pendekatan aset penghidupan digunakan dalam penilaian kerentanan, kapasitas dan kajian risiko.

## **2.8 Tahapan Pelaksanaan**

Penyusunan kajian dan peta risiko bencana merupakan kegiatan kunci dalam pelaksanaan Destana. Diawali dengan pengumpulan data sekunder tingkat desa atau kelurahan dan data sekunder dari instansi terkait dengan kebencanaan. Dilanjutkan pengumpulan data primer dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Setelah data terkumpul baru dapat dilaksanakan penilaian ancaman, kerentanan, kapasitas dan terakhir penilaian risiko. Menyusul kemudian penyusunan peta risiko bencana dengan menggunakan data-data sekunder maupun primer. Secara kronologis, tahapan pelaksanaan penyusunan kajian dan peta risiko bencana dapat digambarkan dengan diagram alir di bawah ini.



Gambar 2.1: Skema Tahapan Penyusunan Dokumen dan Peta Kajian Risiko Bencana



## 2.8.1 Tahap Pengumpulan Data

### 2.8.1.1. Data sekunder

Data sekunder dibutuhkan di tingkat desa/kelurahan meliputi data dasar dalam profil desa seperti monografi, peta, organisasi masyarakat, sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial. Data sekunder tentang kebencanaan bisa diperoleh dari instansi di tingkat kabupaten misalnya BMKG, ESDM, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas , dan hasil-hasil enelitian perguruan tinggi.

### 2.8.1.2. Pelaksanaan PRA

*Participatory Rural Appraisal* (PRA) menjadi metode mengumpulkan data primer bersifat *real time* (kondisi saat ini) untuk diolah dalam pengkajian risiko bencana. Metode PRA merupakan pendekatan dalam penggalian data secara partisipatif. Dalam pelaksanaan PRA masyarakat menjadi pelaku utama sedangkan fasilitator berperan sebagai pemandu proses.

Pelaksanaan PRA dapat dilakukan secara paralel dengan membentuk kelompok-kelompok. Setiap kelompok maksimum terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok bisa melaksanakan 1 sampai 3 alat PRA. Lama waktu pelaksanaan PRA bisa sehari atau lebih. Lokasi pelaksanaan PRA sebaiknya menyebar ke seluruh desa. Hasil-hasil PRA kemudian ditampilkan dan didiskusikan secara pleno untuk mendapat masukan dan perbaikan.

Alat-alat PRA umumnya menggunakan cara visualisasi sehingga lebih menarik, luwes, mudah dipahami, tidak membosankan. Selain itu alat PRA lebih berbasis analisis kelompok dibanding perorangan, lebih membandingkan daripada mengukur, sehingga bisa dilakukan dalam suasana santai dan informal.

Tabel 2.1. Alat-alat PRA

Nama Alat PRA	Jenis/Sifat Data
Kalender musim	Uraian dan analisa tentang kejadian-kejadian berulang setiap tahun baik kejadian alamiah maupun kegiatan manusia di bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan.
Sejarah desa/kelurahan	Uraian dan analisa secara kronologis tentang peristiwa-peristiwa penting baik internasional, nasional maupun lokal dan berpengaruh besar atau membawa dampak perubahan pada masyarakat di desa/kelurahan setempat.
Kecenderungan dan perubahan	Uraian dan analisa secara kronologis tentang perubahan-perubahan kondisi ancaman, sumber daya alam/lingkungan, sosial, ekonomi, politik di desa/kelurahan setempat.
Analisa mata pencaharian	Uraian dan analisa tentang jenis-jenis mata pencaharian penduduk setempat dengan fokus pada produk/jasa dihasilkan, harga, cara pemasaran, serta masalah-masalahnya.
Analisa kelembagaan	Analisa sifat, jenis, dan peran lembaga-lembaga sosial, keagamaan, politik, pemerintahan baik di dalam dan di luar desa/kelurahan tetapi memiliki pengaruh pada masyarakat setempat. Analisa ini menggunakan cara visual/grafik diagram venn.

Nama Alat PRA	Jenis/Sifat Data
Jam kegiatan keluarga	Uraian dan analisa secara kronologis tentang kegiatan-kegiatan seluruh anggota keluarga mulai dari pagi hingga pagi kembali. Keluarga responden dipilih secara acak dalam jumlah mewakili satuan wilayah atau mata pencaharian di suatu desa/kelurahan.
Peta mobilitas desa	Uraian dan analisa tentang pergerakan (bepergian) suatu masyarakat desa/kelurahan. Analisa meliputi arah, jarak, waktu tempuh, berapa lama, keperluan/tujuan, ancaman dihadapi selama bepergian.
Sketsa kebun	Analisa menggunakan grafis tentang jenis-jenis tanaman budi daya masyarakat sesuai musim.
Pemetaan	Analisa keruangan suatu unit permukiman terkecil (dusun/RW/RT) dengan menggunakan peta buatan masyarakat berdasarkan ingatan tentang letak obyek-obyek penting beserta kondisi-kondisi khususnya. Pembuatan peta ini tanpa harus mengikuti kaidah-kaidah baku pembuatan peta teknis. Diakhir proses, peta perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan.
Transek	Analisa keruangan suatu unit permukiman terkecil (dusun/RW/RT) dengan menggunakan gambar potongan melintang untuk menggambarkan dan memberi uraian aspek-aspek khususnya. Aspek kajian dalam setiap garis transek dapat beragam atau satu jenis saja. Misalnya transek khusus untuk aspek topografi kawasan (kemiringan, tinggi dan rendahnya permukaan tanah). Kemudian ada transek untuk beberapa aspek sekaligus, misalnya topografi, penggunaan lahan, sumberdaya, keragaman tumbuhan, masalah-masalah, kepemilikan lahan dan sebaran ancaman.

## 2.8.2 Tahap Penilaian

### 2.8.2.1 Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman dilakukan dengan cara diskusi pleno dan kelompok. Penilaian ancaman bertujuan meletakkan dasar pemahaman istilah ancaman dengan bencana, memahami jenis ancamannya, kemungkinan terjadi dan dampaknya, bagaimana karakter atau ciri-ciri setiap ancaman.

#### Langkah 1. Diskusi pleno perbedaan ancaman dan bencana

Ancaman merupakan suatu kejadian baik alamiah maupun campur tangan manusia atau gabungan keduanya. Ketika kejadian tersebut menyebabkan dampak/kerugian maka bisa disebut bencana. Tetapi jika kejadian tersebut tidak menyebabkan dampak maka kejadian tersebut adalah ancaman. Selama ini telah terjadi kekacauan pemaknaan. Diskusi ini bertujuan agar peserta memiliki kesepahaman tentang perbedaan istilah ancaman dan bencana.

Ancaman ----> masyarakat = dampak (bencana)

Ancaman ----> masyarakat = tidak ada dampak (bukan bencana)

## Langkah 2. Diskusi pleno mengenal keragaman ancaman

Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi ancaman berbeda-beda tergantung kondisi geografis, lingkungan, sosial, ekonomi, politik dan kependudukannya. Diskusi ini bertujuan memperluas pemahaman bersama tentang jenis-jenis ancaman di Indonesia. Tuliskan ragam jenis ancaman dan jelaskan. Tanyakan jenis ancaman apa saja yang pernah terjadi dan mungkin bisa terjadi di desa ini. Tuliskan hasilnya.

Tabel 2.2. Ragam dan jenis ancaman

Jenis Ancaman	Ragam Ancaman
<i>Ancaman geologi</i>	<i>Gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah</i>
<i>Ancaman Hidro-meterorologi</i>	<i>Banjir, topan, banjir bandang, kekeringan</i>
<i>Ancaman biologi</i>	<i>Wabah, hama/penyakit tanaman, penyakit hewan</i>
<i>Ancaman kegagalan teknologi</i>	<i>Kecelakaan transportasi, pencemaran industri</i>
<i>Ancaman lingkungan</i>	<i>Kebakaran, kebakaran hutan, penggundulan hutan.</i>
<i>Ancaman sosial</i>	<i>Konflik, terorisme</i>

## Langkah 3. Diskusi pleno pemeringkatan ancaman

Setiap jenis ancaman memiliki perbedaan dampak dan kemungkinan kejadian. Diperlukan penilaian peringkat ancaman untuk memahami dampak dan kemungkinan kejadian. Diskusi ini bertujuan menentukan peringkat ancaman.

Jelaskan tujuan diskusi, jelaskan cara pengisian nilai, dan pimpin peserta untuk mengisi nilai. Harap diperhatikan bahwa setiap usulan nilai wajib ada alasan atau argumentasinya.

Tabel 2.3. Pemeringkatan ancaman

Ancaman	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Total Nilai
Gempa bumi			
Tsunami			
Banjir			
Gelombang pasang			
Konflik sosial			

**Nilai****Kemungkinan terjadi**

Nilai 1 = Tidak mungkin terjadi  
 Nilai 2 = Kemungkinan kecil terjadi  
 Nilai 3 = Sangat mungkin terjadi  
 Nilai 4 = Pasti terjadi

**Perkiraan dampak**

Nilai 1 = Tidak parah  
 Nilai 2 = Agak parah  
 Nilai 3 = Parah  
 Nilai 4 = Sangat parah

Contoh hasil pemeringkatan:

Ancaman	Dampak	Kemungkinan Terjadi	Total Nilai
Gempa bumi	3	5	8
Tsunami	3	5	8
Banjir	5	5	10
Gelombang pasang	1	5	6
Konflik sosial	1	1	2

**Langkah 4. Diskusi kelompok karakter ancaman**

Setiap bentuk ancaman wajib dikenali karakter atau ciri-cirinya. Karakter atau ciri-ciri tersebut dapat diekspresikan dengan ukuran-ukuran ilmiah maupun alamiah.

Bagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah ancaman, berikan penjelasan tujuan diskusi, lalu jelaskan caraa penggunaan tabel karakter ancaman.

Tabel 2.4.Karakter ancaman

Jenis Ancaman: .....

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	
Faktor Perusak	
Tanda Peringatan	
Sela Waktu	
Kecepatan Hadir	
Frekuensi	
Perioda	
Durasi	

KARAKTER	KETERANGAN
Intensitas	
Posisi	

**Keterangan tabel:**

Asal/Penyebab	: Sumber atau penyebab ancaman
Faktor Perusak	: Bagian dari ancaman yang menyebabkan kerusakan
Tanda Peringatan	: Tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum ancaman datang
Sela Waktu	: Lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman
Kecepatan Hadir	: Kecepatan ancaman
Periode	: Masa atau siklus bahaya/ancaman
Frekuensi	: Jumlah perulangan kejadian ancaman setiap periode
Durasi	: Lama setiap kejadian bahaya/ancaman
Intensitas	: Kekuatan ancaman, luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman
Posisi	: Jarak sumber ancaman dengan permukiman penduduk

Tabel 2.5: Contoh Pengisian Tabel Analisis Ancaman

*Jenis Ancaman: Konflik Sosial*

FAKTOR	KETERANGAN
<i>Asal penyebab</i>	<i>a. Kesenjangan sosial-ekonomi. b. Minuman keras.</i>
<i>Faktor Perusak</i>	<i>Senjata tajam, batu, bom molotov</i>
<i>Tanda Peringatan</i>	<i>Gangguan ketentraman, Cekcok,Isu-isu, Selebaran gelap, Minuman keras</i>
<i>Sela Waktu</i>	<i>1 jam</i>
<i>Kecepatan Hadir</i>	<i>1 jam</i>
<i>Periode</i>	<i>a. 1 tahun sekali (setiap malam tahun baru) b. Sepanjang tahun</i>
<i>Frekuensi</i>	<i>a. 1 kali (konflik dengan warga luar kampung) b. Sekali sebulan (konflik antar warga sekampung)</i>
<i>Durasi</i>	<i>1 hari</i>
<i>Intensitas</i>	<i>1 kampung</i>
<i>Posisi</i>	<i>Di luar kampung (jarak ± 0,5 km)</i>

### 2.8.2.2 Penilaian Kerentanan

Dari karakter ancaman dapat diperkirakan aset-aset berisiko dan perkiraan bentuk risikonya. Kemudian kelemahan-kelemahan penyebab aset tersebut berisiko. Harus ada hubungan masuk akal antara aset berisiko, asumsi bentuk risiko dan kelemahan penyebab aset berisiko.

Pertahankan peserta dalam kelompok diskusi sesuai jumlah ancaman. Jelaskan tujuan diskusi dan jelaskan cara pengisian tabel.

Tabel 2.6: Contoh Tabel Penilaian Kerentanan

Jenis Ancaman: .....

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko
Manusia		
Ekonomi/Finansial		
Fisik/Infrastruktur		
Alam/Lingkungan		
Sosial/Politik		

Tabel 2.7: Contoh pengisian tabel Jenis Ancaman Tanah longsor

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko
Manusia	Meninggal 130 jiwa Luka-luka 300 jiwa Menderita ISPA	Masa bodoh/malas tahu Tidak tahu tanda-tanda longsor Tempat tinggal di kawasan rawan longsor Tidak waspada Tidak sempat melarikan diri
Finansial	Harta benda rusak/hilang: - barang elektronik 80 unit - surat berharga 60 lembar - perhiasan 100 gr - mobil 50 unit - sepeda motor 100 unit  Ternak mati/hilang: - sapi 300 ekor - kambing 100 ekor - ayam 1000 ekor - ...	Tidak sempat diselamatkan

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kelemahan Penyebab Aset Berisiko
Fisik / Infrastruktur	Rumah - rumah rusak ringan 50 unit - rumah rusak sedang 30 unit - rumah rusak berat 50 unit rumah rusak total 100 unit Kantor pemerintah desa 1 unit rusak berat Gedung SD 1 unit rusak berat Puskesmas 1 unit rusak berat	Berada di kawasan rawan longsor
Alam / Lingkungan	Kebun 45 hektar gagal panen Sumber air tercemar abu vulkanik	Belum sempat panen Tanaman mati Sumber air di kawasan sebaran abu dan tidak terlindungi
Sosial/Politik	Kehilangan keluarga Pemerintahan desa lumpuh Terjadi konflik bantuan	

**Catatan:**

*Dari pengalaman empirik dapat disimpulkan bahwa kelemahan dapat dibagi dalam jenis kelemahan lokasi dan kelemahan kondisi. Kelemahan lokasi merupakan kelemahan secara geografis. Contohnya lokasi kampung di kawasan rawan gempa bumi. Kelemahan kondisi berupa keadaan-keadaan (sosial, ekonomi, politik dan sikap/perilaku) menghambat kemampuan masyarakat menghindari ancaman, bertahan dari ancaman, mengurangi kelemahan dan memulihkan diri dari bencana.*

**2.8.2.3 Penilaian Kapasitas**

Kapasitas berupa sumberdaya-sumberdaya tersedia untuk mengurangi kerentanan serta mencegah ancaman atau mengurangi tingkat ancaman. Sumberdaya tersebut dapat berupa kebijakan, kegiatan, pengetahuan, keterampilan, alat, tenaga, dana dan lainnya. Semakin besar sumberdaya tersedia, berarti semakin tinggi kapasitas, risiko semakin rendah. Sebaliknya, semakin sedikit sumberdaya, semakin rendah kekuatan dan semakin tinggi risikonya.

Pertahankan peserta dalam kelompok diskusi sesuai jumlah ancaman. Jelaskan tujuan diskusi dan jelaskan cara pengisian tabel.

Tabel 2.8: Penilaian Kapasitas

Jenis Ancaman: .....

Aset Berisiko	Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana)
Manusia	
Ekonomi/Finansial	
Fisik/Infrastruktur	



Aset Berisiko	Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana)
Alam/Lingkungan	
Sosial/Politik	

Tabel 2.9: Contoh pengisian tabel penilaian kapasitas

Jenis Ancaman: *Angin Puting Beliung*

Aset Berisiko	Kekuatan Tersedia (untuk mengurangi risiko bencana)
Manusia	Ada organisasi pemuda, ada dana desa desa, pengurus RT/RW, kelompok tani
Finansial	-
Fisik/Infrastruktur	Tenaga tukang bangunan Desain konstruksi atap
Alam/Lingkungan	-
Sosial/Politik	-

#### 2.8.2.4 Penilaian Risiko Bencana

Setelah kajian ancaman, kelemahan dan kekuatan bisa ditentukan tingkat risikonya. Tingkat risiko bencana bersifat subyektif. Sangat tergantung pada latar belakang dan konteks individu atau komunitas.

Pertahankan peserta dalam kelompok diskusi sesuai jumlah ancaman. Jelaskan tujuan diskusi dan jelaskan cara pengisian tabel.

Tabel 2.10: Penilaian risiko bencana

Jenis Ancaman: .....

Jenis Aset	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Manusia:				
Ekonomi/finansial:				
Alam/lingkungan:				
Fisik/infrastruktur:				
Sosial/Politik				

Tabel 2.11: Contoh pengisian tabel penilaian risiko

Jenis Ancaman: *Angin Puting Beliung*

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 orang luka-luka</li> <li>- 200 jiwa mengungsi (L: 70, P:70, Balita:40, Lansia:20)</li> <li>- 10 orang mengalami gangguan psikososial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya akses informasi masyarakat (TV dan HP)</li> <li>- Meningkatnya pendidikan masyarakat</li> <li>- masyarakat</li> <li>- Memiliki sarana pendidikan (PAUD, SD dan SMP)</li> <li>- Pernah mengalami berbagai peristiwa (wabah, kelaparan. bencana)</li> <li>- Mampu menyesuaikan diri dan mengatasi kesulitan</li> <li>- Adanya Tim Siaga Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jumlah penduduk</li> <li>- Antara jam 08.00 s/d 10.00 desa Mataram dalam keadaan sepi. Semua orang dewasa bekerja</li> </ul>	S
Ekonomi/ Finansial	70 keluarga kehilangan mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (motor, mobil)</li> <li>- Meningkatnya jumlah dan jenis usaha perdagangan</li> <li>- Ada hasil pertanian sepanjang tahun ( kebun, buah dan sayuran )</li> <li>- Satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan</li> <li>- Banyak jenis produk pertanian/perkebunan/ peternakan dikonsumsi sendiri (sistem pangan lokal kuat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musim tanam padi hanya 1 kali setahun</li> <li>- Bulan 6 dan 7 tidak ada panen berbarengan dengan pendaftaran sekolah</li> <li>- Kelangkaan pupuk pada musim tanam</li> <li>- Produktifitas tanaman perkebunan (coklat, karet, kelapa) menurun pada musim kemarau</li> <li>- Musim penghujan kandungan air terlalu tinggi (karet/nira)</li> <li>- Harga jual produk pertanian/perkebunan/peternakan tidak stabil</li> <li>- Upah buruh/tukang</li> </ul>	S

Aset Berisiko	Asumsi Bentuk Risiko Pada Aset	Kapasitas	Kerentanan	Tingkat Risiko (T/S/R)
			<p>rendah dan pembayaran tidak tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya permodalan usaha (bengkel/dagang)</li> </ul>	
Fisik/ Infrastruktur	70 unit rumah rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material bangunan murah dan mudah didapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak pohon-pohon tinggi di permukiman</li> <li>- Bangunan rumah mudah rusak tertiuip angin Tidak ada akses jalan untuk pengangkutan hasil pertanian</li> <li>- Jalan rusak/tidak terpelihara</li> </ul>	T
Alam/ Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 hektar sawah rusak/gagal panen</li> <li>- 10 hektar kebun karet/kelapa rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentang alam luas dan datar untuk beragam pemanfaatan</li> <li>- Memiliki beragam sumberdaya alam</li> <li>- Jenis tanah dapat ditanami beragam jenis tanaman pertanian dan perkebunan</li> <li>- Tersedia kotoran ternak untuk dimanfaatkan sebagai pupuk organik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal pertanian tadah hujan/ Tidak ada irigasi teknis</li> <li>-</li> </ul>	R
Sosial/ Politik	Terjadi ketegangan sosial antar penyintas dan relawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki banyak organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi tidak aktif</li> <li>- Kegotongroyongan menurun</li> <li>- Sering terjadi pencurian di kebun (kopi, coklat, karet)</li> <li>- Kurangnya pendampingan sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan</li> </ul>	T

## 2.8.3 Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

### 2.8.3.1 Kerangka Dokumen

Di bagian akhir pengkajian dilakukan rancangan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana. Rancangan rencana ini berisi kegiatan-kegiatan bertujuan mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dan/atau mengurangi ancaman. Bentuk kegiatan sebaiknya sederhana dan lebih masuk akal untuk dilaksanakan secara mandiri tanpa tergantung sumberdaya dari luar desa.

Tabel 2.12 : Contoh pengisian tabel rencana aksi PRB

Aset Berisiko	Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana	
	Kegiatan	Waktu & Pelaku
Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda, penyelamatan diri dari puting beliung dan P3K</li> <li>▪ Pembuatan dan distribusi poster peringatan dini angin puting beliung</li> <li>▪ Pelatihan fasilitator penanggulangan bencana</li> <li>▪ Pertemuan rutim Tim Siaga Bencana Desa</li> </ul>	Bulan 1 – 2 Bulan 7 – 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Siaga</li> <li>▪ Pemerintahan desa</li> <li>▪ BPBD</li> <li>▪ SD dan SMP</li> <li>▪ Muspika</li> </ul>
Fisik/ Infrastruktur	Gerakan pengecekan dan perbaikan rumah	Bulan 1 – 2 Bulan 7 – 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Siaga</li> <li>▪ Pemerintahan desa</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>
Ekonomi/ Finansial	Pelatihan keterampilan usaha sampingan	
Sosial/ Politik	Pelatihan tentang pengelolaan bantuan	
Alam/ Lingkungan		

### 2.8.3.2 Penyusunan Dokumen

Tidak ada format baku penyusunan dokumen pengkajian risiko bencana partisipatif. Tetapi suatu dokumen pengkajian risiko bencana partisipatif sekurang-kurangnya disusun dengan sistematika sdi bawah ini:

Tabel 2.13 : Format Dokumen RPB

Bagian	Penjelasan
Halaman Judul	<i>Jelas</i>
Daftar Isi	<i>Jelas</i>
Pengantar	<i>Jelas</i>
<b>BAB 1. Pendahuluan</b>	
1.1.Latar belakang	<i>Membahas latar belakang masalah berupa potensi ancaman dan manfaat dari pengkajian risiko bencana secara garis besar</i>
1.2.Tujuan	
1.2.1.Tujuan umum	<i>Membahas tujuan umum misalnya; membangun kesadaran masyarakat, mengenali ancaman, kerentanan dan kapasitas</i>
1.2.2.Tujuan khusus	<i>Membahas tujuan khusus seperti menyediakan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan</i>
1.3.Pendekatan dan Metode	<i>Menjelaskan pendekatan dan metode penggalan serta pengolahan data</i>
1.4.Waktu dan Pelaksana	<i>Menjelaskan kurun waktu pelaksanaan kajian dan susunan tim pelaksana</i>
<b>BAB 2. Hasil Kajian</b>	
2.1.Penilaian ancaman	<i>Jelas</i>
2.2.Penilaian kerentanan	<i>Jelas</i>
2.3.Penilaian kapasitas	<i>Jelas</i>
2.4.Penilaian risiko bencana	<i>Jelas</i>
<b>BAB 3. Rencana Aksi PRB</b>	<i>Jelas</i>
<b>BAB 4. Penutup</b>	
4.1.Rencana tindak lanjut	<i>Menjelaskan secara terperinci rencana-rencana perbaikan atau perbaharuan hasil kajian dan penggunaan hasil kajian</i>
4.2.Rekomendasi	<i>Saran agar kajian risiko selalu diperbaharukan dalam kurun waktu tertentu</i>
Lampiran	<i>Berisi lampiran seperti peta risiko bencana, foto hasil-hasil penggalan data dengan alat PRA, foto-foto pelaksanaan pengkajian</i>

### 2.8.3.3 Penggambaran Sketsa/Peta Risiko

Menggambar peta dan denah merupakan proses "meniru dan memindahkan" keadaan nyata suatu ruangan atau kawasan (misalnya rumah, kampung, kota), secara tampak atas, ke dalam kertas atau media lainnya. Peta atau denah biasanya dibuat sebagai alat bantu memahami keadaan secara menyeluruh dan kemudian mengelolanya agar menjadi lebih baik. Masyarakat dapat dengan mudah menggambar peta kampungnya berdasarkan ingatan tentang letak obyek-obyek penting atau kondisi-kondisi khusus. Agar semua anggota masyarakat dapat memahami dan turut terlibat, maka kaidah-kaidah baku dalam pembuatan peta harus disederhanakan. Dalam beberapa kasus kaidah baku pembuatan peta dibuang jauh-jauh.

Pembuatan peta risiko bencana ini bertujuan untuk menemukan, memahami, mendokumentasikan jenis dan sebaran ancaman, aset berisiko, bentuk-bentuk kelemahan dan kekuatan. Peta risiko juga berguna sebagai visualisasi ketika Mendiskusikan dan mensepakati solusi atas masalah kampung seperti misalnya 1) titik kumpul evakuasi, 2) jalur evakuasi terpendek dan aman.

Proses:

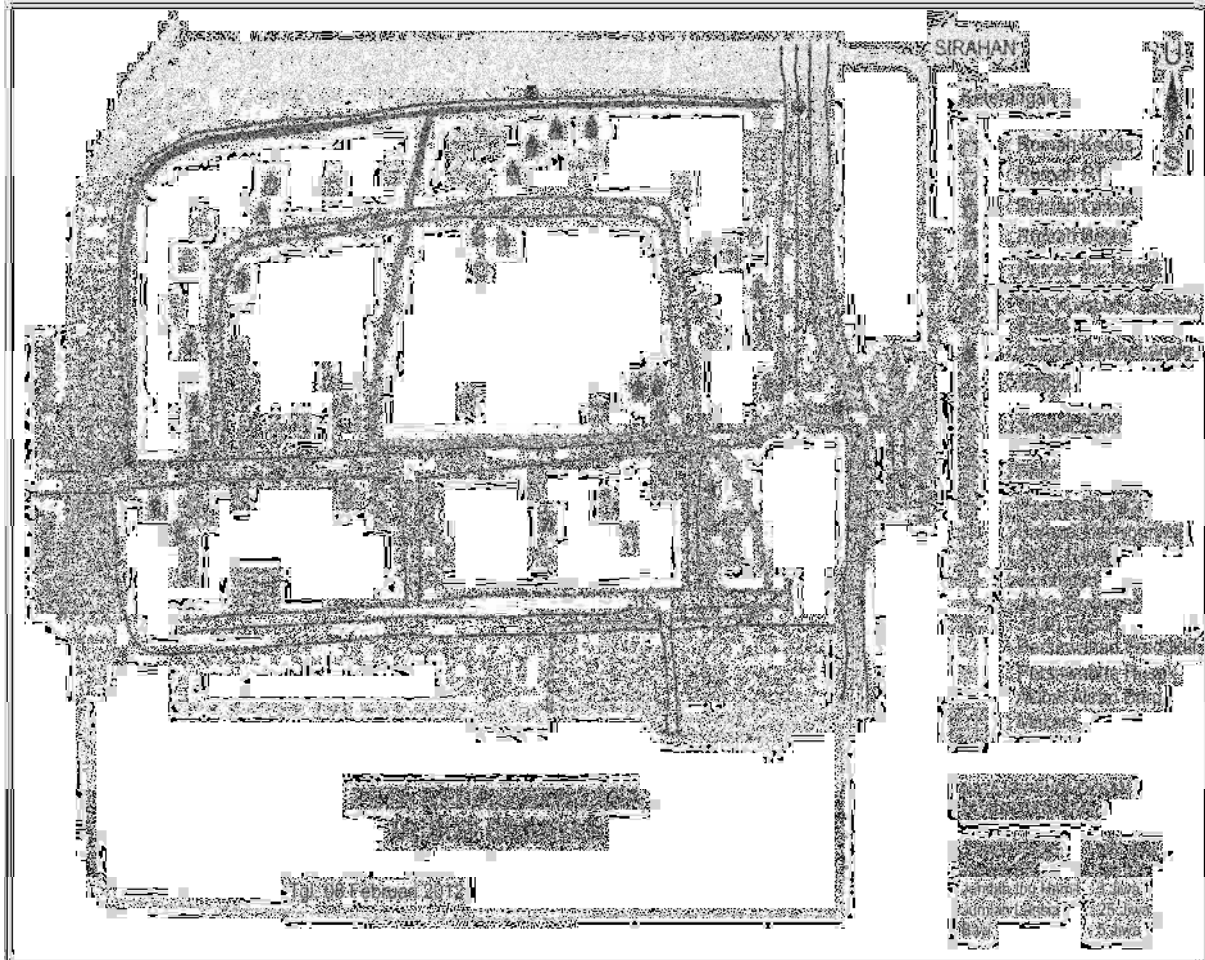
1. Menjelaskan tujuan dan hasil pemetaan. Berikan penjelasan, bila perlu disertai contoh hasil pemetaan.
2. Mensepakati unsur peta. Awali dengan menggali pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari pembuatan peta, cara membuat dan perkiraan hasilnya. Sepakati juga obyek atau unsur apa saja untuk digambar dalam peta. Dalam konteks pengelolaan risiko bencana biasanya unsur peta meliputi; 1) jalan, 2) rumah, 3) rumah dengan penduduk rentan, 4) rumah memiliki kendaraan untuk evakuasi, 5) jalur aman evakuasi, 6) titik tujuan evakuasi, 7) daerah diperkirakan terkena ancaman, 8) arah kedatangan ancaman, 9) kebun, 10) sumber air, 11) bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, balai kampung, dan puskesmas, 12) letak alat tanda bahaya, 13) sungai, 14) bukit/lembah, 15) garis batas wilayah kampung, 16) hutan, 17) data penduduk, dan sebagainya.
3. Mulai menggambar peta. Setelah elemen peta disepakati proses menggambar dapat dimulai. Untuk mempermudah proses, penggambaran dapat dimulai dari menggambar garis-garis dasar seperti batas wilayah kampung, jalan, sungai. Baru kemudian memasukkan unsur-unsur peta lainnya. Disarankan menggunakan simbol dan atau warna berbeda untuk setiap unsur peta.
4. Mengecek lapangan. Usai menggambar, lakukan pengecekan lapangan bersama dengan membawa serta peta hasil penggambaran. Catat temuan penting untuk ditambahkan atau diperbaiki pada peta. Langkah ini perlu untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal penting terlewatkan. Akhiri dengan memberikan apresiasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya.

#### Catatan

*Jenis-jenis peta*

*Peta teknis: Peta teknis dibuat menggunakan kaidah-kaidah ilmiah pembuatan peta. Diantaranya, harus menggambarkan ukuran sebenarnya (skala), menggunakan sistem koordinat, dan orientasi arah utara ke atas. Hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu dapat membuat peta teknis.*

Peta partisipatif: *Siapa saja dapat terlibat pembuatan peta ini. Tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan berdasarkan pemahaman dan ingatan pembuat pada kondisi wilayah dipetakan. Biasanya peta partisipatif dibuat untuk memahami masalah dan menyelesaikannya.*



Gambar 2.1: Contoh peta risiko bencana

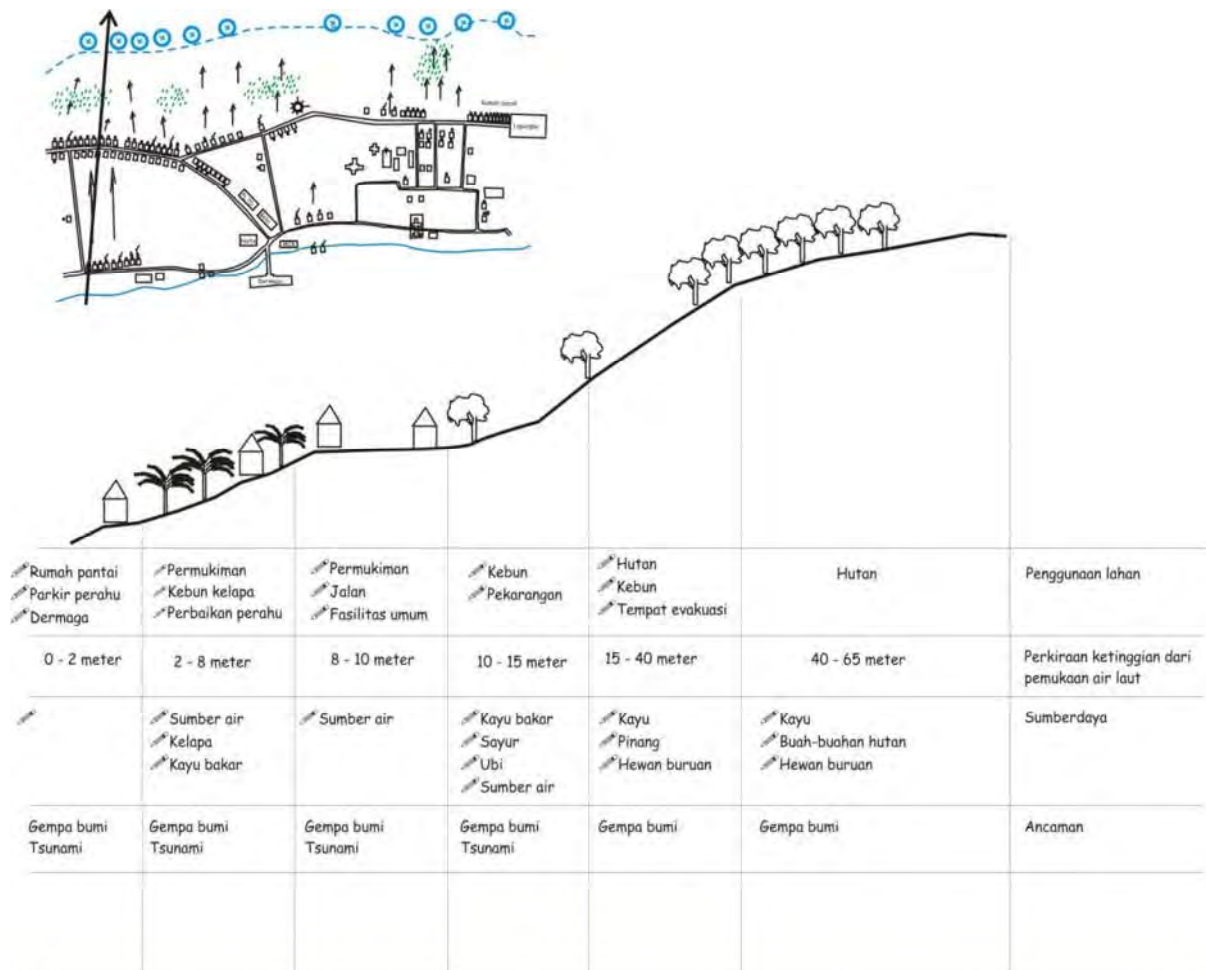
#### 2.8.3.4 Transek

Menggambar peta dan transek sama-sama merupakan proses "meniru dan memindahkan". Bedanya, jika peta tampak atas transek tampak samping. Beragam kondisi sulit digambarkan dalam peta dapat digambarkan dalam transek. Seperti kemiringan lahan misalnya.

Transek atau garis imajiner memotong daerah atau kawasan tertentu untuk dianalisis (misalnya kampung, hutan, kebun). Biasanya berupa garis lurus. Boleh melintang atau membujur. Garis itu akan menjadi basis kajian.

Aspek kajian dalam setiap garis transek dapat beragam atau satu jenis saja. Misalnya transek khusus untuk aspek topografi kawasan (kemiringan, tinggi dan rendahnya permukaan tanah). Kemudian ada transek untuk beberapa aspek sekaligus, misalnya topografi, penggunaan lahan, sumberdaya, keragaman tumbuhan, masalah-masalah, kepemilikan lahan dan sebaran ancaman.

Transek bermanfaat untuk mengidentifikasi topografi wilayah/kawasan; misalnya bukit dan lembah, kemiringan lahan, mengidentifikasi jenis bahaya, daerah berbahaya, sebaran bahaya secara vertikal dan lokasi aman, mengidentifikasi pola penggunaan lahan, sumberdaya, status/kepemilikan dan masalah-masalahnya.



Gambar 2.2.: Contoh transek

Proses:

- Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
- Menetapkan garis transek. Garis transek harus memotong wilayah kajian. Sepakati bersama lintasan garis transek dan jumlahnya.
- Bagi peserta sesuai jumlah transek
- Tentukan bersama aspek-aspek kajian transek (misal, potensi sumberdaya, bahaya, pemanfaatan lahan, bentuk lahan)
- Minta setiap kelompok mulai melakukan perjalanan sesuai garis transek. Catat dan gambar jika perlu temuan-temuan sepanjang transek. Tegaskan pada kelompok agar mencatat dan menggambar temuan di perjalanan dituangkan dalam kertas dan dianalisis secara bersama.
- Menuliskan dan Menggambarkan hasil transek.



- Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan . Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami transek baik-baik dan temukan ancaman, kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Panduan 3

## Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat

### 3.1 Pengantar

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8).

Warga di daerah berpotensi ancaman / bencana akan merasa ingin tahu tentang jenis peringatan seperti yang dapat dijadikan rujukan bersama sebagai **pertanda waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri**. Peringatan yang dimaksud dapat berupa tanda-tanda alam atau peringatan resmi dari instansi pemerintah, seperti BMKG, BPPTKG, Dinas Kehutanan, BPBD, Dinas Kesehatan dll.

Namun peringatan dini oleh lembaga berwenang sering kali gagal karena berbagai sebab yakni;

1. Ancaman berskala mikro sehingga luput dari pantauan lembaga berwenang. Contoh misalnya ancaman tanah longsor skala kecil di suatu kampung.
2. Ancaman bersifat lokal dan sanga tiba-tiba atau jeda waktu antara tanda-tanda dengan kejadian sangat pendek (*rapid-on set*). Contoh misalnya ancaman seperti kebakaran, angin puting beliung, banjir bandang.
3. Peringatan dini oleh lembaga berwenang gagal menjangkau desa-desa terpencil karena tidak tersedia infrastruktur atau teknologi.
4. Rantai penyampaian peringatan dini terlalalu panjang atau berjenjang sehingga telat sampai.
5. Isi peringatan dini terlalu abstrak, tidak tegas, sulit dipahami sehingga menghasilkan tindakan keliru.

Oleh karena itu warga perlu memahami dan menyepakati tanda-tanda alam yang beralasan, selain peringatan dini resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan datangnya satu ancaman dalam waktu dekat. Warga dengan demikian segera dapat bertindak untuk mengikuti prosedur penyelamatan diri, keluarga dan tetangganya, barang berharga, serta bila perlu mengatur penjagaan terhadap aset yang ditinggalkan saat mengungsi.

Satu sistem peringatan dini yang lengkap dan efektif mempunyai empat unsur yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya:

1. **Pengetahuan tentang bahaya dan Risiko** – mengisyaratkan bahwa warga sangat perlu memahami jenis-jenis dan sifat-sifat ancaman (kecepatan datang, kekuatan merusak, keseringan terjadi, dll) yang ada di daerahnya, dan tanda-tanda alam sebelum kejadian (bencana).

Pemahaman tentang risiko dapat dilihat di *Panduan 2. Penyusunan Kajian dan Peta Risiko Bencana*.

2. ***Pemantauan dan Layanan Peringatan*** mengisyaratkan bahwa perlu adanya pusat peringatan dini yang terpercaya, rutinitas dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan tingkat ancaman, dan pada **saat yang tepat mampu mengambil keputusan untuk menyebarkan peringatan kepada masyarakat** yang ada di area berisiko. Beberapa jenis ancaman semacam tsunami dan gunung api misalnya sudah dilakukan melalui dasar kajian ilmiah dan yang mendapat mandat untuk hal ini adalah BMKG dan BPPTKG selaku lembaga pemerintah. Namun untuk sebagian jenis ancaman yang lain masih bergantung pada upaya pemantauan yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri, misalnya jenis ancaman kebakaran, puting beliung, banjir genangan dan longsor.
  - Meskipun telah dilakukan pemantauan oleh lembaga pemerintah, disarankan agar masyarakat tetap melakukan kewaspadaannya dan tidak lengah. Hal ini menuntut warga masyarakat untuk membuat kesepakatan agar melakukan pemantauan terhadap ancaman secara rutin, menentukan parameter atau ukuran tingkat bahayanya untuk disampaikan kepada semua warga masyarakat saat bertindak waspada, siaga atau evakuasi. Peringatan dini yang berpusat pada masyarakat merupakan **kesepakatan** di antara **warga** mengenai 1) **sumber informasi** (alam dan resmi) sebagai rujukan bertindak, 2) **arti peringatan** untuk memutuskan evakuasi mandiri secara tepat waktu. Sumber informasi dapat berasal dari interpretasi umum yang mengartikan tanda-tanda alam, pengalaman, kajian ilmiah, pusat peringatan dini pemerintah. Masing-masing jenis bahaya mempunyai tingkatan dan arti peringatan. Beberapa contoh arti peringatan dapat dilihat di lampiran.
3. ***Penyebarluasan dan Komunikasi*** mengisyaratkan bahwa masyarakat perlu memiliki beragam **alat penyebaran peringatan yang disepakati** untuk mengingatkan masyarakat di desa waktu yang tepat untuk melakukan evakuasi. Alat-alat komunikasi untuk penyebaran peringatan kepada warga harus dijaga dan dirawat agar selalu berfungsi. Jenis alat komunikasi untuk penyebaran peringatan ini perlu mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan, pengoperasian dan perawatan yang dapat dilakukan oleh warga secara mandiri. Karenanya alat yang berasal dari kearifan lokal disarankan untuk digunakan, misalnya kenthongan, bedug, alat tiup / pukul lain. Alat komunikasi berteknologi tinggi atau yang bergantung pada catu daya listrik PLN terkadang tidak selalu handal, misalnya sirine. Alat dengan suku cadang yang didatangkan dari luar daerah juga kadang membuat ketergantungan untuk perawatannya. Setiap warga haruslah mempunyai pemahaman yang sama tentang isi dan arti peringatan yang disepakati untuk dipatuhi bersama.
  - Di sisi lain, layanan peringatan dini dari pemerintah perlu menjangkau semua orang yang berada di area berisiko bencana. Sistem komunikasi untuk menyampaikan peringatan dini dari pusat peringatan (di bagian hulu) ke masyarakat area berisiko (di bagian hilir) harus diidentifikasi – siapa saja pihak atau ‘perantara’ dalam rantai peringatan dari hulu ke hilir. **Konsep rantai peringatan** dirancang sependek mungkin untuk mempercepat penyebaran peringatan dari hulu ke hilir. Para perantara pemegang kewenangan penyebaran peringatan di

setiap rantai harus bersepakat dan dipastikan saling terhubung untuk memberi layanan informasi / peringatan.

- Perlu diupayakan menggunakan beberapa jenis **alat komunikasi penyebaran peringatan** untuk memastikan agar i) bila satu alat penyebaran peringatan gagal ada alat komunikasi lain yang dapat digunakan, ii) peringatan dapat diterima oleh lebih banyak masyarakat, dan iii) untuk memperkuat pesan peringatan. Alat penyebaran peringatan perlu ada di **tempat-tempat berkumpulnya warga di kawasan berisiko**, antara lain permukiman, sekolah, kantor, pasar, rumah sakit, lokasi wisata.
- Perlu diperhatikan bahwa di beberapa tempat tertentu di desa juga ada aktivitas warga, mempunyai kesulitan akses untuk menerima informasi / peringatan. Kesulitan akses dapat disebabkan oleh keberadaan warga di area sangat dekat dengan ancaman atau keterbatasan-keterbatasan menuju jalur evakuasi, kendala teknis teknologi komunikasi, atau alasan lainnya. Kelompok-kelompok rentan ini tetap perlu strategi memahami peringatan dini (alam atau berdasar kearifan lokal) untuk secara mandiri bersiap menyelamatkan diri secara tepat waktu
- Seberapa besar peringatan dapat mengurangi dampak suatu peristiwa bencana akan sangat bergantung pada beberapa faktor, misalnya: jarak waktu yang tersedia antara keluarnya peringatan sampai datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana, kebenaran pesan peringatan, kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk memiliki rencana penyelamatan diri secara tepat waktu (Lihat *Pedoman 6 - Rencana Evakuasi*), serta keputusan dan tindakan warga masyarakat untuk menyelamatkan diri.

Gambar 3.1: Sistem peringatan dini (UNISDR)



4. **Kemampuan Merespons** mengisyaratkan bahwa masyarakat harus memiliki rencana evakuasi untuk penyelamatan diri dan strategi pemberian bantuan evakuasi oleh relawan saat melakukan penyelamatan diri.

### 3.2 Tujuan

Pembahasan mengenai pengembangan sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat bertujuan memandu Kelompok Kerja Desa untuk mengetahui :

1. Waktu kapan akan datangnya ancaman yang diantisipasi
2. Mengetahui dengan baik peringatan alam dan / atau menerima peringatan dari sumber resmi
3. Menyetujui cara-cara untuk menyebarkan peringatan dini secara tepat waktu dan alat komunikasi penyebaran peringatan yang digunakan kepada semua warga masyarakat. Sehingga semua warga dapat bertindak untuk menyelamatkan diri dan aset berharga miliknya.

### 3.3 Hasil Kegiatan

Pada akhir sesi ini Kelompok Kerja Desa menyelesaikan setidaknya draft **Skema konsep peringatan dini untuk desa sasaran** untuk ancaman yang diprioritaskan, dan mengembangkan usulan rencana pewujudan rantai peringatan dini yang efektif dan berfungsi di desa.

### 3.4 Sumber Daya Pendukung

Untuk membuat konsep bagan peringatan dini diperlukan Peta Bahaya atau peta Risiko desa untuk identifikasi area-area yang berpenduduk, Kertas plano dan spidol untuk mencatat dan menggambar rantai peringatan, atau dapat juga menggunakan kertas *meta plan* untuk ditempelkan di dinding

### 3.5 Peserta

Semua anggota Kelompok Kerja Desa, perangkat Pemerintah Desa, BPD

### 3.6 Lokasi

Balai Desa, Kantor Lurah, tempat layak lain yang disepakati warga.

### 3.7 Tahapan Kegiatan

#### 1. PERSIAPAN

Sediakan peta bahaya / peta risiko atau peta dengan gambar yang menunjukkan pusat ancaman (banjir), sebanyak jenis-jenis ancaman yang ada, kertas plano / kertas *meta plan*, dan spidol.

*Satu lembar gambar peta atau sketsa*

#### 2. PELAKSANAAN

Fasilitator mengawali rangkaian sesi ini dengan mengajak Peserta

1. Memberi pengantar mengenai sistem rantai peringatan dini – lihat bagian pengantar di atas. Menentukan jenis-jenis ancaman yang **DIPRIORITASKAN** akan dibuatkan skema peringatan dini, dan sediakan gambar peta bahaya / peta risiko cukup besar (ukuran kertas plano / A0)
2. Membagi peserta menjadi kelompok sebanyak jenis ancaman yang diprioritaskan, dan memberikan gambar peta serta alat tulis untuk ancaman yang dipilih, kemudian (a) meminta

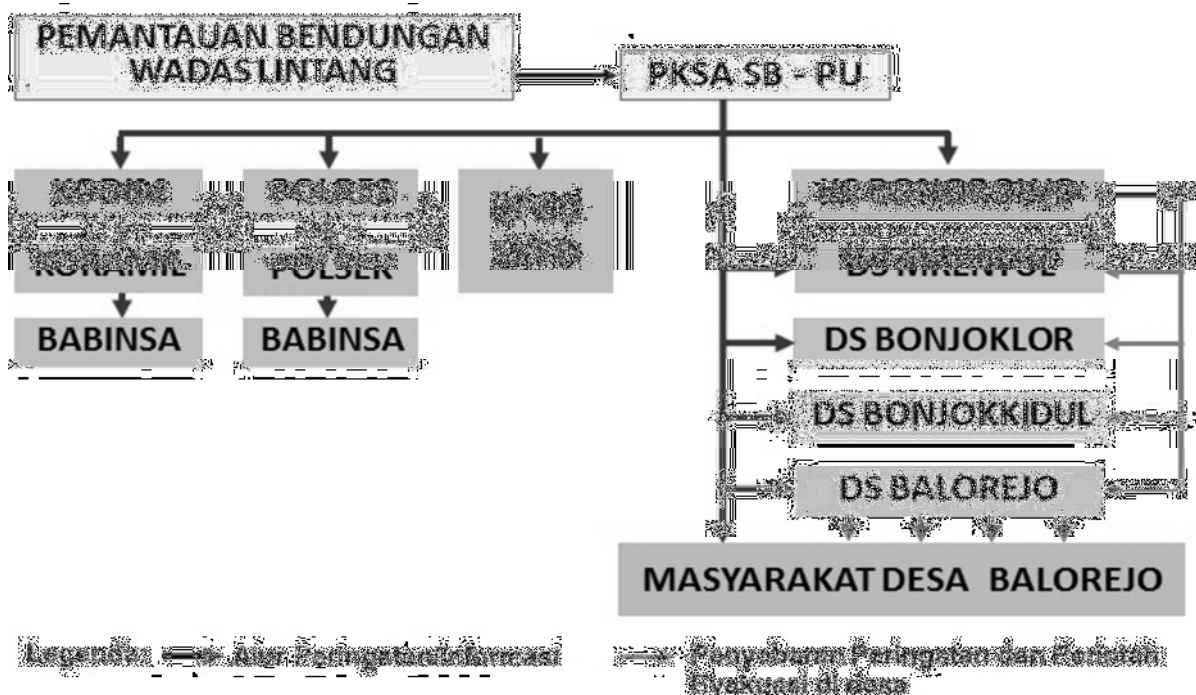
setiap kelompok mulai diskusi dengan mengidentifikasi letak pusat ancaman, (b) mengenali pusat peringatan resmi penyebar informasi / peringatan, (c) mengenali tanda-tanda alam sebelum terjadi ancaman. **Lihat lampiran 1 di bawah.**

3. Menandai dan menulis data/penjelasannya di kertas terpisah, sebagai contoh- ancaman banjir bandang:
  - a. menentukan sumber banjir bandang, misalnya waduk/dam, daerah aliran sungai (DAS) yang terbuka, hutan gundul baru ditebang.
  - b. membuat garis penghubung dari sumber banjir bandang ke desa sasaran.
  - c. memperkirakan jarak (Km) dari sumber banjir bandang ke desa sasaran
  - d. memperkirakan lama waktu tempuh banjir(menit) dari sumber banjir sampai ke desa sasaran
4. Identifikasi desa / kelurahan (kecamatan) mana saja yang dilalui banjir bandang sebelum sampai desa sasaran.
  - a. perkirakan lama waktu tempuh banjir sampai di setiap desa-desa tersebut
  - b. buatlah garis penghubung dari sumber banjir ke desa-desa tersebut sampai ke desa sasaran
5. Usulkan untuk mengembangkan komunikasi untuk :
  - a. menghubungkan desa sasaran dengan pengelola sumber banjir dan para perangkat di desa-desa yang terletak di area-area sebelum desa sasaran
  - b. menggunakan alat komunikasi: HT, HP, Telpon, radio komunitas, dll, untuk saling berkomunikasi
  - c. menyepakati informasi / tingkat peringatan banjir / isi pesan
  - d. menyepakati waktu tercepat untuk menyebarkan peringatan ke desa sasaran
6. Pilih dan tentukan menggunakan alat komunikasi TERCEPAT dan HANDAL yang mana untuk menyampaikan informasi / peringatan dari waduk dan desa-desa sebelum desa sasaran.



Gambar 3.2: Contoh Bagan Alur Peringatan Dini

7. Pilih dan tentukan alat-alat yang dapat digunakan di desa sasaran (khususnya di wilayah berisiko banjir untuk penyebaran peringatan. Misalnya kenthongan, bedug, lonceng, pengeras suara, sirine, HT, HP, Telpn, radio komunitas, bendera warna, lampu tertentu. Alat komunikasi dan bunyi/tanda yang dipilih harus mendapatkan kesepakatan warga masyarakat. Tentukan siapa dan dimana akan dipasang alat komunikasi di desa.
8. Gambarkan skema peringatan dini dari waduk dan desa-desa di atas menuju desa sasaran. Hasil penggambaran ini adalah draft skema rantai peringatan banjir bandang untuk desa sasaran.
9. Tentukan kesepakatan tindakan yang warga bila menerima informasi/peringatan dini.
10. Setiap kelompok mempresentasikan draft skema dan kesepakatan yang dicapai, peserta lain memberikan tanggapan konstruktif
11. Tentukan peserta yang berketampilan untuk memperbaiki skema peringatan dini yang dibuat menjadi gambar yang baik atau didigitalkan. Skema yang baik akan digunakan untuk diskusi dan mencapai kesepakatan dengan pengelola Waduk A dan kepala desa/lurah di atas kita.
12. Rencanakan untuk bertemu dengan pimpinan pengelola Waduk A, kepala desa/lurah, BPBD kabupaten, RAPI/ORARI/SAR membahas pembangunan sistem komunikasi peringatan dini banjir ini.



Gambar 3.3: Contoh rantai Peringatan Dini Desa

### 3. LAPORAN

Pada akhir sesi ini dihasilkan:

- a. **Gambar skema peringatan** (1 halaman) yang menunjukkan
  1. **alur rantai peringatan / informasi** yang datang dari pusat peringatan dini/desa-desa sebelumnya sampai di desa sasaran, tanda alam akan datangnya ancaman yang disepakati,
  2. dilengkapi dengan keterangan **legenda skema** yang penjelasan garis hubung, peran dan tanggung jawab setiap pihak di 'mata rantai', arti pesan dari setiap tingkat bahaya dan tindakan reaksi masyarakat, alat komunikasi yang digunakan, waktu tempuh ancaman.
- b. **Laporan singkat proses** yang dilakukan (2-3 halaman)

### Lampiran 3.1

1. **Contoh pertanyaan untuk memandu peserta menemukan / menentukan pusat pengamatan dan pemantauan di tempat sumber ancaman.** Misalnya, untuk ancaman banjir di Kantor Pengairan atau balai pengelolaan waduk / dam / situ, atau unit pemantauan lain setempat, untuk gempa bumi dan tsunami di BMKG Jakarta, dan untuk letusan gunung api di PVMBG (atau BPPTKG).
  - a. **Tempat / kantor / balai apa yang melakukan pengamatan dan pemantauan rutin?**
    - *Tanda-tanda alam apa yang dirujuk?*
    - *Apa alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ancaman (waspada, siaga, awas atau lainnya)?*
    - *Apa parameter/ukuran yang digunakan untuk menentukan ancaman terjadi ?*
    - *Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau dan menentukan bahwa ancaman (akan/sedang) terjadi ?*
    - *Siapa yang bertanggung jawab untuk menyebarkan peringatan kepada masyarakat di desa/kelurahan?*
    - *Apa isi peringatan yang disebarkan ?*
    - *Berapa jarak sumber ancaman dari lokasi desa/kelurahan kita ?*
    - *Berapa waktu yang tersedia dari saat ancaman terjadi sampai bahaya tiba di lokasi desa kita ?*
  - b. **Pemantauan Alternatif**
    - *Siapa pihak lain yang bertanggung jawab mengamati dan memantau ancaman?*
    - *Siapa yang bertanggung jawab menginformasikan kedatangan ancaman kepada masyarakat di desa/kelurahan kita?*
    - *Apa alat yang digunakan untuk menyampaikan peringatan kepada warga di desa/kelurahan kita?*



- *Berapa jarak ancaman yang diamati dari lokasi desa/kelurahan kita?*
- *Berapa waktu yang tersedia dari saat ancaman diinformasikan sampai bahaya tiba di lokasi desa/kelurahan kita ?*

**2. Contoh pertanyaan untuk memandu Peserta menemukan jaringan komunikasi di desa yang memantau tanda alam dan / atau menerima peringatan resmi untuk kemudian disebarkan kepada semua warga masyarakat di desa sasaran.**

**1. Penerimaan dan Penyebaran Peringatan di Desa**

- ***Di mana / tempat berupa apa** di desa kita yang bertanggung jawab untuk memantau tanda alam dan / atau menerima peringatan resmi yang dikirim ke desa/kelurahan kita?*
- ***Siapa** personil desa yang bertugas (sukarela) memantau tanda alam dan peringatan? (apakah 24/7 atau sepanjang waktu)*
- ***Apa saja alat penerima peringatan** yang digunakan?*
- ***Apa saja tindakan** yang harus dilakukan oleh si penerima peringatan di desa/kelurahan kita untuk diteruskan ke semua warga?*
- ***Apa alat penyebaran peringatan** yang dipakai agar menjangkau semua warga di area berisiko di desa/kelurahan kita?*

**2. Tindakan Penyelamatan Diri dan Aset Berharga**

- ***Apa saja tindakan** yang disepakati untuk dilakukan segera oleh warga setelah menerima peringatan? Bila sedang berada di rumah, sekolah, kantor, rumah sakit, perusahaan, pasar, dll.*
- ***Apa saja barang berharga / aset** kita yang dapat kita amankan saat evakuasi?*
- *Apa aturan untuk evakuasi melalui jalur evakuasi yang disepakati?*
- *Siapa saja yang membantu warga yang mengalami evakuasi? Apa alat yang digunakan?*

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Panduan 4

## Penyusunan Rencana Evakuasi

### 4.1 Pengantar

Masyarakat di kawasan rawan bencana wajib memiliki rencana penyelamatan diri beserta harta bendanya ketempat lebih aman sebelum datang ancaman. Rencana penyelamatan atau rencana evakuasi efektif dapat dikembangkan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana. Rencana evakuasi tersebut efektif dilandasi oleh informasi dan pengetahuan serta pemahaman memadai pada karakter ancaman dan sistem peringatan dininya.

Pengertian evakuasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna *“pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah berbahaya, misalnya bahaya perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api, ke daerah aman”*. Sedangkan SNI 7743:2011 tentang Rambu Evakuasi Stunami menjelaskan, *“rencana evakuasi merupakan tindakan perpindahan, pemindahan dan penyelamatan masyarakat dari tempat bahaya ke tempat aman’*. CEDIM (2005) mendefinisikan, *“rencana evakuasi merupakan tindakan terorganisir untuk keluar dari area berbahaya ke tempat aman, dimana warga ditampung sementara dan diberi pelayanan.”*

Dari definisi-definisi di atas, maka kita bisa mensintesis pengertian rencana evakuasi efektif sebagai, *“rencana pemindahan penduduk beserta harta bendanya ke tempat lebih aman, sebelum kejadian ancaman, secara terorganisir, untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kebutuhan dasar.”* Tentang layanan kebutuhan dasar serta standar-standarnya dibahas di Panduan Penyusunan Rencana Kontijensi.

Dalam mengembangkan rencana evakuasi efektif akan digunakan istilah-istilah (terminologi) yakni 1) tempat evakuasi, 2) jalur evakuasi, 3) peta evakuasi, dan 4) strategi atau cara/tahapan/hirarki evakuasi. Setiap terminologi mengandung pengertian dasar serta syaratnya masing-masing sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

### Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Dimana tempat aman untuk menyelamatkan diri?
- Mana saja jalan-jalan di desa yang disepakati sebagai jalur evakuasi / mengungsi?
- Bagaimana cara-cara atau strategi penyelamatan ke tempat evakuasi?

Tabel 4.1. Pengertian umum dan syarat, istilah dalam perencanaan evakuasi

Istilah/Terminologi	Pengertian Umum	Syarat
Tempat Evakuasi	Ruang perlindungan berupa bangunan dan/atau lahan terbuka dengan perlengkapan untuk menampung warga masyarakat terdampak bencana (penyintas) selama masa tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>2. Merupakan lokasi paling aman dari segala bentuk ancaman utama maupun ancaman ikutan sebagai dampak dari ancaman utama</li> </ol>
Tempat Evakuasi Sementara (TES)	Perlindungan penyintas bersifat sementara karena 1) ada potensi peningkatan intensitas ancaman dan/atau 2) sumberdaya tersedia terbatas/tidak memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Merupakan lokasi terdekat dengan tempat asal warga masyarakat terdampak</li> <li>4. Mudah dijangkau oleh bantuan kemanusiaan dari pihak luar</li> <li>5. Luasannya cukup untuk menampung seluruh warga terdampak</li> </ol>
Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	Tempat perlindungan penyintas bersifat permanen dengan sumberdaya lebih memadai dan aman dari segala bentuk ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tersedia dan/atau dekat dengan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi hunian/tempat tinggal, air bersih, santasi, layanan kesehatan, pangan dan gizi, dan pendidikan.</li> </ol>
Jalur Evakuasi	Jalan dan/atau arah disepakati untuk menghindari ancaman menuju TES atau TEA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penentuannya disepakati dan diketahui oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>▪ Cukup luas untuk menampung arus penyintas dan kendaraan pengangkutnya</li> <li>▪ Arah jalan menjauhi sumber ancaman</li> <li>▪ Tidak terlanda oleh ancaman utama</li> <li>▪ Paling aman dari segala bentuk ancaman ikutan</li> <li>▪ Merupakan jalur terdekat menuju TES atau TEA</li> <li>▪ Dilengkapi rambu penunjuk arah menuju TES atau TEA</li> </ul>
Peta Evakuasi	Gambar dua dimensi atau instalasi multi dimensi (maket/miniatur) memuat informasi tentang daerah rawan bencana, sumber ancaman, perkiraan sebaran ancaman, jalur atau arah evakuasi, dan tempat-tempat evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didasarkan pada informasi memadai tentang jenis ancaman dan karakternya</li> <li>2. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>3. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>4. Mudah dipahami semua golongan warga masyarakat</li> <li>5. Mengandung pengertian tegas, tidak bermakna ganda</li> <li>6. Disyahkan oleh otoritas pemerintah setempat</li> <li>7. Ditaati oleh seluruh warga masyarakat</li> </ol>

Istilah/Terminologi	Pengertian Umum	Syarat
Strategi Evakuasi	Serangkaian keputusan mengatur cara-cara evakuasi efektif dalam upaya penyelamatan diri warga beserta harta benda sebelum ancaman tiba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun dan disepakati oleh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>2. Disosialisasikan secara terus menerus ke seluruh warga masyarakat kawasan rawan bencana</li> <li>3. Memuat pembagian peran dan penggunaan alat pengangkut</li> <li>4. Mengutamakan penyelamatan kelompok rentan (berkemampuan beda, sakit, lansia, anak, ibu hamil, balita dan ibu menyusui)</li> <li>5. Didasarkan pada analisis intensitas (kekuatan, sebaran/luasan) ancaman</li> <li>6. Memuat cara-cara penyelamatan harta benda</li> <li>7. Memuat cara-cara pengamanan harta benda ditinggalkan di lokasi rawan bencana</li> </ol>

## 4.2 Tujuan

Menyediakan pedoman fasilitator dalam memandu peserta lokakarya mengembangkan perencanaan evakuasi efektif

## 4.3 Hasil Kegiatan

Peserta lokakarya mampu menyelesaikan rencana evakuasi tingkat desa untuk satu atau dua jenis ancaman prioritas, dalam bentuk dokumen dan peta

## 4.4 Sumberdaya Pendukung

1. Dokumen hasil kajian risiko bencana (hasil kegiatan 2 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana)
2. Peta Bahaya atau Peta Risiko Bencana untuk jenis ancaman prioritas (hasil kegiatan 2 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana)
3. Dokumen sistem peringatan dini (hasil kegiatan 3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Di Masyarakat)
4. Peta administratif desa
5. Kertas *flip chart* dan spidol warna
6. Bila ada, gunakan plastik bening untuk menggambar di atas peta dasar.

## 4.5 Peserta

1. Warga desa
2. Kelompok Kerja Desa
3. Pemerintah Desa

## 4.6 Tempat

1. Balai Desa, Kantor Lurah, tempat lain yang disepakati warga
2. Tempat-tempat evakuasi (TEA dan TES) untuk verifikasi penentuan tempat.

## 4.7 Tahapan Pelaksanaan

### 4.7.1 TAHAP PERSIAPAN

#### Langkah 1. Pengantar.

Jelaskan kepada fasilitator bahwa kita akan menyusun rencana evakuasi efektif. Sebagai warga masyarakat kawasan rawan bencana harus memiliki rencana penyelamatan diri beserta harta bendanya ketempat lebih aman sebelum datang ancaman. Berikan secara berulang-ulang pengertian rencana evakuasi efektif yakni, *“rencana pemindahan penduduk beserta harta bendanya ke tempat lebih aman, sebelum kejadian ancaman, secara terorganisir, untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kebutuhan dasar.”*

#### Langkah 2. Penyiapan data.

Mintalah peserta menyiapkan data-data dasar sebagai bahan menyusun rencana evakuasi yakni;

- a. Dokumen hasil kajian risiko bencana (hasil kegiatan 2 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana)
- b. Peta Bahaya atau Peta Risiko Bencana untuk jenis ancaman prioritas (hasil kegiatan 2 Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana)
- c. Dokumen sistem peringatan dini (hasil kegiatan 3 Pengembangan Sistem Peringatan Dini Di Masyarakat)
- d. Peta administratif desa
- e. Lembaran plastik bening, spidol *marker* berwarna, buku catatan

### 4.7.2 TAHAP PENYUSUNAN PETA RENCANA EVAKUASI

#### Langkah 1. Mengidentifikasi tempat-tempat aktivitas masyarakat.

Mintalah peserta untuk mengenali lokasi sebaran penduduk atau tempat-tempat aktivitas masyarakat / fasilitas umum (hunian, pasar, sekolah, kantor, ibadah, puskesmas, pabrik / perusahaan, terminal, wisata, dll.) dan lokasi infrastruktur (jembatan, gardu induk listrik, pintu air DAM, dll.) yang ada di area berisiko. Kemudian, peserta menandai tempat-tempat tersebut di atas peta tersebut. Masing-masing ciri tempat dengan simbol-simbol gambar yang berbeda – gunakan simbol yang umum dimengerti masyarakat, misalnya puskesmas dengan tanda palang merah.

#### Langkah 2. Menentukan tempat-tempat evakuasi

Mintalah peserta untuk mengidentifikasi tempat-tempat yang dapat dijadikan tujuan evakuasi di area-area aman dengan memperhatikan ciri-ciri ancaman. Kemudian mintalah

untuk menandainya di atas peta. Pemilihan tempat-tempat evakuasi tersebut perlu memperhatikan kondisi tertentu (lihat *6.1 Pengantar, Tempat Evakuasi* di bab ini).

### **Langkah 3. Mensepakati jalur-jalur evakuasi**

Peserta diminta untuk menyepakati jalan-jalan dan gang-gang yang ada dan dapat digunakan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat-tempat aktivitas masyarakat di area berisiko menuju tempat-tempat evakuasi yang dipilih, kemudian menggambarkannya dengan jelas di atas peta. Daerah perkotaan mempunyai kompleksitas tersendiri untuk menyusun rencana evakuasi oleh karena biasanya kepadatan penduduk dan lalu lintas yang melampaui jumlah dan kapasitas jalur-jalur evakuasi yang tersedia.

## **4.7.3 TAHAP PENYUSUNAN CARA EVAKUASI**

### **Langkah 1. Mensepakati strategi atau cara evakuasi**

Mintalah peserta mendiskusikan dan mensepakati cara evakuasi, misalnya:

- a. Setelah menerima / melihat / merasakan tanda-tanda peringatan alam atau peringatan resmi dari pemerintah, masyarakat diminta segera evakuasi ke tempat (sektor) yang sudah disepakati. Untuk jenis bencana yang terjadi cepat (*rapid on-set disaster*), setiap warga diminta untuk segera menuju tempat evakuasi, tanpa mencari kerabat.
- b. Untuk warga dari rumah agar memastikan kompor dan listrik dimatikan, membawa harta paling berharga (surat berharga, sertifikat, perhiasan), menutup jendela dan mengunci pintu.
- c. Warga mentaati kesepakatan untuk evakuasi, misalnya boleh atau tidak evakuasi dengan menaiki kendaraan bermotor (khususnya di daerah perkotaan dan padat lalu lintas).
- d. Warga yang difable, anak, lansia, terluka, ibu hamil, dan warga yang kesulitan evakuasi dibantu oleh relawan desa sesuai kesepakatan.

### **Langkah 2. Penegasan kesepakatan**

Tuliskan kesepakatan-kesepakatan hasil diskusi setiap kelompok di kertas atau papan dengan huruf besar. Tegaskan bahwa itu hasil kesepakatan cara evakuasi

## **4.7.4 TAHAP PRESENTASI**

Mintalah perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil Peta Evakuasi dan Strategi Evakuasi, dan peserta lain memberikan masukan dan saran konstruktif.

## Lampiran 4.1

### Contoh pertanyaan untuk memandu peserta menemukan lokasi aman dan jalur evakuasi.

1. Di mana daerah-daerah berisiko dan daerah aman? Buatlah garis yang membatasi kedua daerah.
2. Di mana tempat-tempat dimana terdapat kumpulan / aktivitas warga?
3. Dimana kelompok paling rentan?
4. Di mana tempat-tempat aman alternatif yang dipilih (horisontal/vertikal) sebagai TPS/TPA?
5. Bagaimana kondisinya untuk evakuasi (dan distribusi bantuan kedaruratan)?
6. Jalan-jalan mana saja untuk rute evakuasi?
7. Apa saja kemungkinan kendala?
8. Apa tanda-tanda yang lazim diketahui umum (*landmark*)?
9. Berapa lama waktu untuk evakuasi – dari tempat berisiko sampai di tempat aman?
10. Apa alternatif bila tidak mencapai tempat (titik kumpul) evakuasi?
11. Kapan warga masyarakat mulai evakuasi? (Berdasarkan tanda alam dan/atau sirine/arahan dari Otoritas setempat)
12. Bagaimana pengaturan evakuasi individu/kelompok (sekolah, pasar, tempat wisata, perusahaan)?
13. Berjalan kaki atau berkendara?
14. Bagaimana warga yang sedang melakukan evakuasi berkomunikasi dan mendapatkan update informasi?

### Contoh pertanyaan untuk memandu peserta menentukan prosedur evakuasi dan membangun kesepakatan antar warga untuk dilakukan saat tindakan evakuasi:

1. Apa tanda/tengara yang dipakai untuk mulai evakuasi?
2. Apa yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan rumah?
3. Apa saja yang penting dan perlu dibawa?
4. Apakah perlu/tidak mencari anggota keluarga/kerabat sebelum evakuasi atau semua akan bertemu di tempat evakuasi?
5. Membantu warga yang terluka atau kesulitan (berkebutuhan khusus) atau kelompok rentan (ibu hamil, anak-anak dan lansia) saat evakuasi?
6. Apakah boleh/tidak menggunakan kendaraan?



Tabel 4.2: Contoh Kesepakatan Evakuasi Desa

No	Evakuasi	Kesepakatan yang Dicapai Masyarakat Desa
1	Siapa saja yang perlu dievakuasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warga yang mana?</li> <li>▪ Barang berharga?</li> <li>▪ Ternak, dll?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ .....</li> <li>✓ .....</li> <li>✓ .....</li> </ul>
2	Siapa yang membantu mengevakuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ .....</li> <li>✓ .....</li> </ul>
3	Bagaimana tata cara evakuasi yang disepakati	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) .....</li> <li>2) .....</li> <li>3) Dst.</li> </ul>
4	.....	..... .....

Tabel 4.3: Contoh Daftar Tempat Evakuasi 1

Jenis Ancaman	Area-Area Di Desa		Jalan Desa Sebagai Jalur Evakuasi	Nama Lokasi Aman	
	Rawan	Aman		Akhir	Sementara
a. Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) RT ....</li> <li>2) RT ....</li> <li>3) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) ....</li> <li>2) ....</li> <li>3) dst</li> </ul>			
b. Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) RT....</li> <li>2) RT ....</li> <li>3) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) ....</li> <li>2) ....</li> <li>3) dst</li> </ul>			
c. Gunung Api	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) RT ....</li> <li>2) RT ....</li> <li>3) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) ....</li> <li>2) ....</li> <li>3) dst</li> </ul>			
d. Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) RT</li> <li>2) RT ....</li> <li>3) dst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) .</li> <li>2) ....</li> <li>3) dst</li> </ul>			

Tabel 4.3: Contoh Daftar Tempat Evakuasi 2

Ancaman	RT	Nama Titik Kumpul	Tempat Evakuasi Sementara	Tempat Evakuasi Akhir
Banjir kiriman	01/01	Balai desa	Rumah panggung banasari selatan	Kecamatan puring
	02/01	Utara di masjid An nur Selatan jembatan S. Salak	Utara ke rumah panggung Selatan ke Dusun Kebaturan	Kecamatan Puring
Banjir genangan	01/01 02/01	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi
Banjir pasang	01/01 02/01	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi
Kekeringan	01/01 02/01	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi	Tidak mengungsi
Kebakaran	01/01 02/01	Tidak mengungsi	Menjauhi lokasi kebakaran	Tidak mengungsi
Angin ribut	0101	Sawah sebelah timur dan selatan dusun	Sawah timur, selatan dan utara dusun	-
	02/01	Utara ke sawah di selatan dusun Selatan ke jembatan S. Salak	Sawah timur, selatan dan utara dusun	
Gempabumi	01/01	Sawah sebelah timur dan selatan dusun	Sawah timur, selatan dan utara dusun	
	02/01	Utara ke sawah di selatan dusun Selatan ke jembatan S. Salak	Sawah timur, selatan dan utara dusun	
Tsunami	01/01 02/01	Sekitar Balai desa	Kesebelah utara dusun Banasari selatan	Menuju gombong menjauhi S. Banda

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 5.1 Pengantar

Kontinjensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar-benar terjadi. Perencanaan kontinjensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi. Adanya unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi (BNPB, *Panduan Perencanaan Kontinjensi, 2011*).

Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat yang di dalamnya terdapat situasi potensi bencana, di mana skenario, kebutuhan sumber daya (analisa kesenjangan) kesepakatan jumlah sektor dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat.

Rencana Kontinjensi disusun untuk satu ancaman, dan kemungkinan ancaman ikutan bila ada. Penentuan ancaman yang diprioritaskan dilakukan dengan menilai bobot pada Kemungkinan Kejadian dan/atau Skala Dampak. Rencana Kontinjensi disusun untuk satu periode waktu yang disepakati. Perencanaan kontinjensi menggunakan asumsi skenario dan dampak yang disepakati.

Rencana kontinjensi memastikan warga dalam menyelamatkan diri, serta mendapatkan hak-hak dasar serta upaya untuk memulihkan kembali kehidupan dan penghidupannya secara mandiri. Masyarakat desa sangat perlu mempunyai modalitas pengetahuan risiko yang benar dan rencana-rencana kesiapan yang memadai dan disepakati bersama untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian bencana.

Beberapa butir penting bahwa perencanaan kontinjensi:

1. Dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan.
2. Lebih merupakan proses daripada menghasilkan dokumen.
3. Merupakan suatu proses partisipasi membangun kesepakatan skenario dan tujuan yang akan diambil.
4. Merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi.
5. Mencakup upaya-upaya pencegahan risiko yang lebih tinggi
6. Aktivasi dari perencanaan kontinjensi beralih ke rencana operasi tanggap darurat
7. Rencana Kontinjensi memetakan sumberdaya yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan untuk melakukan tanggap darurat

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Apa pengertian Rencana Kontinjensi?
- Mengapa Rencana Kontinjensi harus disusun
- Kapan Rencana Kontinjensi disusunnya?
- Bagaimana menyusun Rencana Kontinjensi?

## 5.2 Tujuan

Memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana menyusun Dokumen Rencana Kontinjensi

## 5.3 Hasil Kegiatan

1. Tersusunya Dokumen Rencana Kontinjensi
2. Menyusun rencana kontinjensi untuk jenis ancaman yang diprioritaskan
3. Kesepakatan tentang rencana kontingensi untuk jenis ancaman yang dipilih
4. Penentuan Kejadian / pengembangan Skenario
5. Usulan rencana kontinjensi
6. Rencana tindak lanjut untuk penyelesaian dokumen

## 5.4 Sumber Daya Pendukung

1. Profil wilayah desa
2. Karakter bahaya potensial
3. Peringatan dini
4. Rencana Evakuasi
5. Sumberdaya desa

## 5.5 Peserta

- Tokoh masyarakat/Tokoh Keagamaan
- Perangkat desa/kelurahan/suku/adat/ondoafi (tergantung wilayah)
- Perwakilan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
- Tenaga Pendidik
- Keterwakilan Lansia
- Keterwakilan Difabel
- Keterwakilan Anak
- Pemuda/karang taruna
- BPD
- LPMD

- PKK
- Gapoktan (kelompok Tani, Ternak, Nelayan)
- Kader Kesehatan
- Tim Siaga Desa

## 5.6 Lokasi

- Dalam ruangan (gedung balai desa/aula, sekolah)
- Di luar Ruangan (lapangan, dll)

## 5.7 Tahapan Kegiatan

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan serangkaian kegiatan dengan tahapan-tahapan:

### 1. TAHAP INISIASI

Pada tahap ini dilakukan 1) pemetaan para pihak untuk mengetahui dan memastikan pihak mana saja akan dilibatkan dalam proses penyusunan sesuai mandat, kewenangan atau kompetensi masing-masing, 2) koordinasi para pihak untuk memastikan kesanggupan dan ketersediaan waktu masing-masing mengikuti proses penyusunan rencana kontinjensi, 3) pembentukan tim kerja untuk memastikan tersedianya tim pelaksana kegiatan selanjutnya, 4) pengumpulan data dasar berupa data sekunder dan data primer dan 4) verifikasi data untuk memastikan kebenaran data.

### 2. TAHAP PELAKSANAAN LOKAKARYA

Pelaksanaan pertemuan-pertemuan penyusunan rencana kontinjensi sesuai kesepakatan waktu. Pelaksanaan ini memakan waktu lebih dari 5 hari.

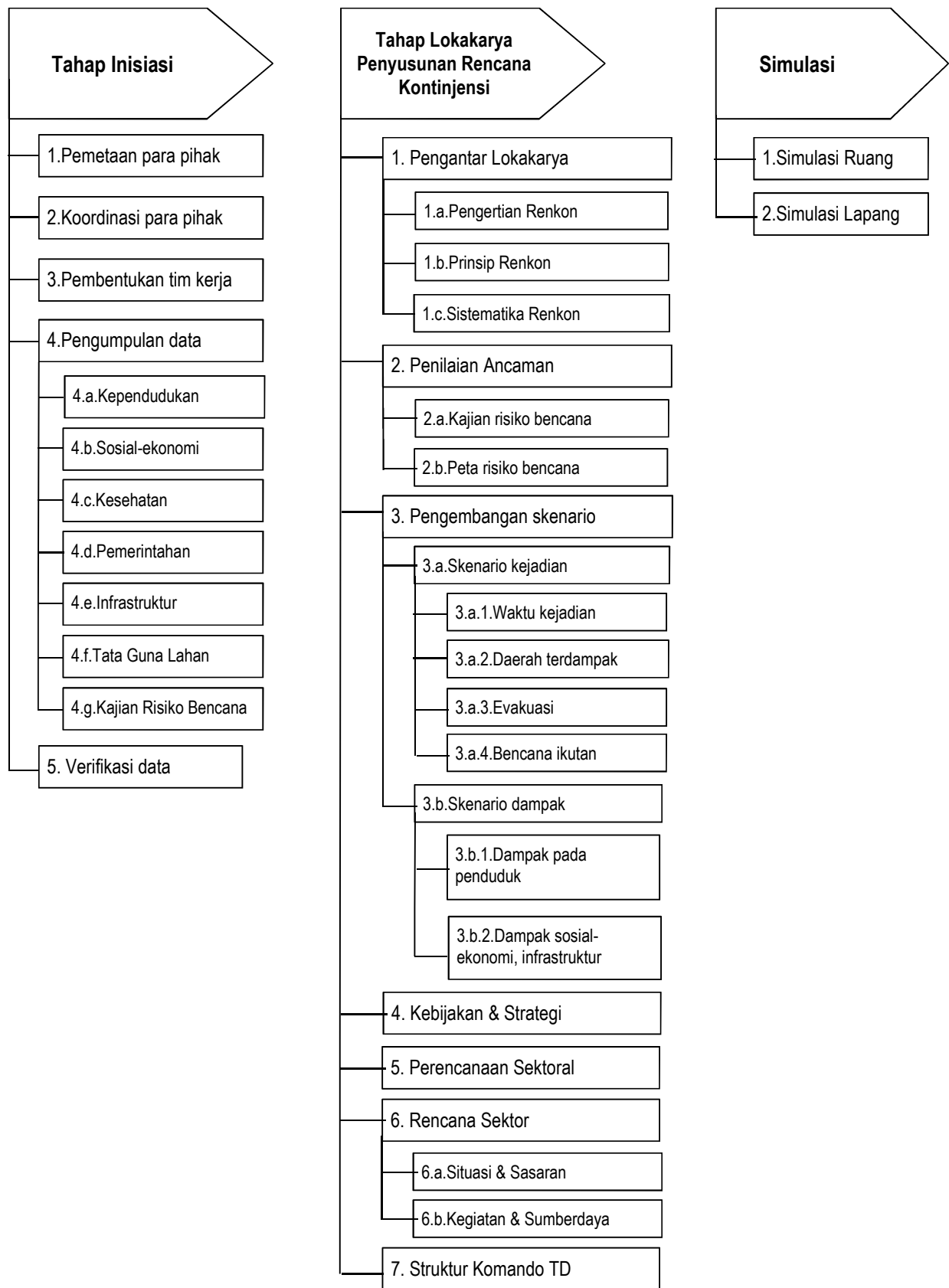
### 3. SIMULASI RUANG

Pelaksanaan simulasi dalam ruangan menggunakan satu atau lebih skenario untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan memastikan seluruh unsur dalam perencanaan kontinjensi mengetahui peran atau tugas masing-masing.

### 4. SIMULASI LAPANG

Pelaksanaan simulasi lapangan dengan melibatkan seluruh unsur dan masyarakat sebagai pelaku sesuai peran dan tugas masing-masing. Simulasi lapang menggunakan skenario sesuai kesepakatan dan dirancang semirip mungkin dengan keadaan sesungguhnya. Pelaksanaan simulasi ruang sebaiknya menggunakan unit skala Dusun atau RT.

Gambar 5.1: Skema Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi



### 5.7.1 Tahap Inisiasi

Tahap ini merupakan kegiatan awan dan wajib dilakukan sebelum pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana kontinjensi. Tahap ini bertujuan:

- Memastikan semua pihak berkomitmen terlibat penyusunan rencana kontinjensi,
- Memastikan ketersediaan data penunjang,
- Memastikan tersedianya tim kerja,
- Memastikan disepakatinya waktu pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana kontinjensi dan
- Pengumpulan serta verifikasi data.

#### LANGKAH 1. PEMETAAN PARA PIHAK

Lakukan pemetaan para pihak yang berkompeten atau memiliki sumberdaya dalam tanggap darurat bencana. Tidak terbatas pada parapihak di internal desa, para pihak dari luar desa, apabila memungkinkan bisa dimasukkan dalam pemetaan. Langkahnya, buatlah daftar para pihak, rincikan kompetensi masing-masing, pelajari keunggulan dan kelemahannya dan terakhir, jangan lupa selalu lakukan verifikasi hasil pemetaan.

Tabel 5.1: Peta para pihak

Pihak	Kompetensi	Keunggulan	Kelemahan
<i>Pak Bardi (warga RT 04)</i>	<i>Memiliki 6 truk, siap digunakan untuk evakuasi setiap saat</i>	<i>Mudah dihubungi Kooperatif Kesadaran dan komitmen tinggi dalam PRB</i>	<i>Berseberangan dengan lurah</i>

#### LANGKAH 2. KOORDINASI PARA PIHAK

Kunjungi para pihak dan jelaskan maksud tujuan lokakarya penyusunan rencana kontinjensi lalu berikan undangan pertemuan koordinasi.

Dalam pertemuan koordinasi para pihak perlu diberi penjelasan ulang tentang maksud dan tujuan lokakarya penyusunan rencana kontinjensi. Berikutnya sepakati waktu pelaksanaan lokakarya. Pastikan semua pihak berkomitmen hadir dan terlibat penuh dalam lokakarya.



### **LANGKAH 3. PEMBENTUKAN TIM KERJA**

Masih di pertemuan koordinasi, jelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran proses lokakarya diperlukan tim kerja. Tim ini bisa beranggotakan dari 3 sampai 5 orang dan bertanggungjawab mencatat kesepakatan-kesepakatan dalam lokakarya, mengumpulkan data dan menyusun dokumen rencana kontinjensi. Mintalah peserta memberi masukan siapa saja orang yang tepat untuk menjadi anggota tim kerja.

### **LANGKAH 4. PENGUMPULAN DATA DAN VERIFIKASI**

Pimpin dan kawal tim kerja dalam pengumpulan dan verifikasi data-data dasar untuk keperluan penyusunan rencana kontinjensi. Jenis-jenis data tersebut biasanya sudah ada tetapi sudah usang atau tidak sesuai keadaan sekarang. Data-data penting dalam penyusunan rencana kontinjensi diantaranya:

- Data kependudukan (menurut umur, menurut jenis kelamin, menurut pekerjaan, dsb)
- Data sosial-ekonomi
- Data infrastruktur
- Data kejadian ancaman dan dampak (ada di hasil kajian risiko bencana)
- Data luas lahan dan peruntukan

#### **5.7.2 Tahap Lokakarya**

Lokakarya bisa memakan waktu antara 5 hari hingga seminggu. Tetapi tidak harus secara maraton, bisa dilakukan secara serial dengan jeda beberapa hari antara lokakarya pertama dengan selanjutnya. Tahapan proses dan langkah-langkah di bawah ini dilakukan dalam lokakarya.

#### **I. PENGANTAR LOKAKARYA**

##### **Langkah 1. Pengertian rencana kontinjensi**

Berikan uraian pengantar tentang pengertian perencanaan kontinjensi. Gunakan dan kembangkan kalimat penjelasan dari pertanyaan kunci berikut ini:

1. Kesiapan menghadapi keadaan darurat bencana
2. Disusun setelah ada peringatan bahaya atau diketahui potensinya melalui pengkajian risiko bencana
3. Alat atau media pengorganisasian para pelaku dan sumberdaya

##### **Langkah 2. Sistematika dokumen rencana kontinjensi**

Perlu ditegaskan bahwa penyusunan rencana kontinjensi tidak semata-mata untuk menghasilkan dokumen, tetapi lebih untuk menata kesiapan menghadapi bencana. Untuk apa dokumen indah, rapi, bagus tetapi tidak bisa diterapkan.

Berikan uraian penjelasan tentang sistematika dokumen perencanaan kontinjensi di bawah ini.

Tabel 5.2: Sistematika dokumen rencana kontinjensi

Bagian	Isi
1. Latar Belakang	Berisi penjelasan latar belakang mengapa dibutuhkan rencana kontinjensi, ruang lingkupnya, serta ladasan-landasan formal dan pengertian rencana kontinjensi
2. Tujuan	Berisi penjelasan tujuan umum dan khusus perencanaan kontinjensi
3. Pengkajian risiko bencana /penilaian ancaman	Berisi deskripsi hasil pengkajian risiko atau penilaian ancaman sebagai dasar pengembangan skenario
4. Pengembangan skenario	Berisi skenario kejadian ancaman dan kerugian-kerugian pada aspek manusia, sosial, ekonomi, politik, infrastruktur dan lingkungan/alam
5. Kebijakan dan strategi	Berisi pernyataan kebijakan untuk mengurangi risiko becana akibat ancaman serta strategi-strategi untuk melaksanakan atau mencapai hasil dari pernyataan kebijakan
6. Perencanaan sektoral	Berisi pemetaan aktor/ <i>stakeholder</i> /pelaku, kebutuhan jumlah dan nama sektor, penjelasan situasi, tujuan, sasaran, proyeksi kebutuhan sumberdaya dan analisa kesenjangan (kebutuhan vs ketersediaan sumberdaya) per sektor
7. Simulasi ruang dan lapang	Berisi rencana simulasi ruang dan lapang
8. Rencana tindak lanjut	Menjelaskan rencana-rencana untuk melakukan perbaikan, formalisasi, pelatihan

### Langkah 3. Prinsip perencanaan kontinjensi

Prinsip-prinsip perencanaan kontinjensi sangat penting diketahui oleh semua partisipan agar menjadi pedoman dalam proses penyusunan.

Buatlah 10 buah kartu dan tuliskan prinsip rencana kontinjensi pada kartu (1 kartu 1 prinsip). Bagikan 10 kartu secara acak. Minta peserta penerima kartu satu per satu membacakan isinya. Mintalah peserta lainnya menanggapi dengan penjelasan kira-kira maksud dari isi kartu tersebut. Tuliskan semua tanggapan di papan. Ajak semua peserta menyimpulkan.

Tabel 5.3: Prinsip rencana kontinjensi

Isi Kartu	Penjelasan
1. Dasarnya jelas	Setelah ada kajian risiko bencana, setelah ada peringatan bahaya, memasuki musim hujan/kemarau
2. Hanya untuk satu jenis ancaman	Rencana akontinjensi disusun untuk satu jenis ancaman saja

Isi Kartu	Penjelasan
3. Disusun secara partisipatif	Melibatkan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, organisasi dan lembaga-lembaga dengan proses terbuka serta tidak ada keputusan-keputusan tertutup
4. Berdasarkan kesepakatan	Skenario, tujuan dan prosedur ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
5. Harus bisa dioperasikan	Semua prosedur dalam rencana kontinjensi harus masuk akal, bisa dijalankan, mudah dipahami dan bisa dijadikan dasar rencana operasi.
6. Tidak menimbulkan keresahan	Penyusunan rencana kontinjensi harus menggunakan kehati-hatian ekstra agar tidak diartikan sebagai usaha menakut-nakuti sehingga memicu keresahan
7. Mengutamakan sumberdaya lokal	Kebutuhan-kebutuhan sumberdaya dalam rencana kontinjensi sebisa mungkin dipenuhi dengan mengerahkan sumberdaya setempat. Ini agar rencana kontinjensi tidak dijadikan alasan untuk pembelian baru atau pembangunan infrastruktur baru.
5. Dipatuhi oleh semua pihak	Setiap kesepakatan dalam rencana kontinjensi bersifat mengikat
6. Selalu dimutakhirkan	Rencana kontinjensi harus selalu diperbaiki secara berkala agar selalu sesuai dengan perkembangan ancaman, penduduk dan perkiraan dampak
7. Tujuan kemanusiaan	Penyusunan rencana kontinjensi ditujukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan. Sekaligus rencana kontinjensi harus mengutamakan kelompok rentan dan menghormati adat istiadat setempat

## II. PENGKAJIAN RISIKO BENCANA/PENILAIAN ANCAMAN

Dalam kegiatan-kegiatan desa tangguh bencana proses pengkajian sudah dilakukan di awal. Sehingga pada penyusunan rencana kontinjensi tidak perlu dilakukan kajian ulang (dengan asumsi jarak waktu antara kajian risiko dengan penyusunan rencana kontinjensi tidak lebih setahun). Tinggal melakukan pembahasan hasil kajian.

### Langkah 1. Pembahasan hasil kajian

Siapkan hasil kajian risiko bencana dan mintalah salah satu peserta memaparkan secara ringkas hasil kajian risiko bencana meliputi garis besar proses dan kesimpulannya. Pimpin diskusi dengan fokus pembahasan pada jenis ancaman dengan nilai tertinggi (kemungkinan terjadi dan perkiraan dampak). Jelaskan bahwa jenis ancaman dengan nilai tertinggi tersebut akan dibuatkan rencana kontinjensi. Lalu bahas pula karakter ancaman tersebut.

## **Langkah 2. Pembahasan peta risiko**

Siapkan peta risiko bencana (jenis ancaman terpilih) hasil kajian lalu minta salah satu peserta memaparkan dan peserta lain menanggapi. Fokuskan diskusi pada sebaran ancaman (luas wilayah terdampak).

### *Catatan:*

*Jika belum dilakukan pengkajian risiko bencana, maka penilaian ancaman mutlak harus dilakukan. Langkah-langkahnya: pemeringkatan ancaman, pemetaan ancaman*

## **III. PENGEMBANGAN SKENARIO**

### **A. SKENARIO KEJADIAN ANCAMAN**

Skenario dimaksudkan disini adalah perkiraan tentang kejadian ancaman. Dapat menggunakan skenario kejadian terburuk atau skenario kejadian paling mungkin (seperti pernah terjadi sebelumnya). Pengembangan skenario harus berpedoman pada hasil kajian karakter ancaman dan peta risiko bencana. Penyusunan skenario kejadian ancaman meliputi:

- Waktu kejadian, misalnya ancaman terjadi pada tengah malam atau dini hari saat semua masyarakat sedang terlelap tidur (ini contoh skenario terburuk).
- Kecepatan datangnya ancaman, misalnya melebihi dari kecepatan dalam karakter ancaman.
- Lama kejadian, misalnya sampai 4 jam atau 4 hari.
- Perulangan kejadian, misalnya setelah kejadian ancaman pertama disusul kejadian berikutnya dengan jeda waktu sempit.
- Luas daerah terdampak, bisa satuan luas (hektar) atau unit wilayah (dusun, RT/RW).
- Ketersediaan jalur dan alat evakuasi
- Potensi bencana ikutan, misalnya banjir menyebabkan aliran listrik arus pendek sehingga menyebabkan korban dan membahayakan penolong.

### **Langkah 1. Kesepakatan waktu kejadian ancaman, kecepatan dan lama kejadian**

Gunakan karakter ancaman hasil kajian risiko bencana. Tanyakan pada peserta tentang waktu kejadian, kecepatan, dan lama kejadian. Jelaskan bahwa bisa menggunakan skenario terburuk melebihi hasil kajian. Pimpin diskusi dan tuliskan kesepakatannya.

### **Langkah 2. Kesepakatan luas daerah terdampak**

Gunakan peta/sketsa hasil kajian risiko bencana kajian lalu ulangi langkah 1 dengan fokus diskusi luas daerah terdampak (dalam satuan wilayah dusun, RT atau RW).

### **Langkah 3. Jalur dan ketersediaan alat evakuasi**

Gunakan peta risiko hasil kajian untuk memperhitungkan arah, tujuan dan ketersediaan alat evakuasi penduduk terdampak. Diskusikan dan catat kesepakatannya.

#### Langkah 4. Potensi bencana ikutan

Tanyakan pada peserta, dengan kesepakatan waktu kejadian dan luas daerah terdampak tersebut, apa saja perkiraan kemungkinan bencana ikutannya. Tuliskan pendapat-pendapatnya lalu pimpin diskusinya.

*Contoh skenario paling ekstrim dari rencana kontinjensi erupsi gunungapi Merapi desa Ngargomulyo, Dukun, Magelang. Letusan mendatang diawali dengan peningkatan status Merapi dari WASPADA menjadi SIAGA dalam waktu satu bulan. Empat hari setelah itu status ditingkatkan menjadi AWAS pada tepat pukul 02.00 dini hari. Karena diperkirakan sifat letusan eksplosif maka seluruh kawasan Merapi dalam radius 10 kilometer diharuskan mengungsi saat itu juga. Kemudian Merapi benar-benar meletus dengan tipe eksplosif pada pukul 03.00. Desa-desa dalam jarak 15 kilometer dari puncak terlanda awan panas, hujan abu, pasir dan batu pijar. Sebagian warga mengungsi dan sebagian lainnya tidak mau mengungsi.*

#### B. SKENARIO DAMPAK

Dengan skenario kejadian disepakati, maka dapat diperkirakan kemungkinan apa saja bentuk dampak ancaman. Pembahasan dampak difokuskan pada aspek-aspek untuk ditangani yakni, kemungkinan korban jiwa dan luka-luka, jumlah penyintas/pengungsi, kerugian ekonomi, gangguan pelayanan masyarakat, dan kerusakan infrastruktur, akibat kejadian ancaman.

##### Langkah 1. Dampak pada penduduk

Dampak pada aspek kependudukan maksudnya perkiraan dampak pada sejumlah penduduk di daerah terdampak ancaman. Tentu saja keparahan perkiraan dampak selaras dengan kerentanan pada penduduk termaksud yakni, posisi penduduk terhadap sumber ancaman, sikap, kemampuan menyelamatkan diri, ketersediaan alat atau jalur evakuasi, jangkauan terhadap alat peringatan dini, dan sebagainya. Untuk skenario pada aspek kependudukan dapat menggunakan tabel di bawah ini.

Tabel 5.4: Skenario dampak pada manusia

Dusun (RT/RW)	Total Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Terancam	Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Mengungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan kolom:

1. Dusun (RT/RW) : Satuan wilayah terdampak
2. Total jumlah penduduk : Total jumlah penduduk dari data termutakhir (menurut sex dan umur)
3. Jumlah Penduduk Terancam : Perkiraan jumlah penduduk terancam karena kerentanannya
4. Meninggal Dunia : Perkiraan jumlah penduduk meninggal akibat ancaman
5. Hilang : Perkiraan jumlah penduduk hilang akibat ancaman
6. Luka Berat : Perkiraan jumlah penduduk luka berat akibat ancaman
7. Luka Ringan : Perkiraan jumlah penduduk luka ringan akibat ancaman
8. Mengungsi : Perkiraan jumlah penduduk mengungsi

Pada penduduk mengungsi perlu dirincikan jumlahnya menurut kelamin dan umur. Rincian tersebut berguna dalam memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan pelayanan pengungsi (sektor tempat/penampungan, peralatan, bahan pangan, air dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan). Contoh tabel perincian berikut ini:

Tabel 5.5: Jumlah pengungsi menurut umur

Dusun (RT/RW)	Total Jumlah Penduduk	0 – 4 Tahun		5 – 10 Tahun		11 – 16 Tahun		17 – 20 Tahun		21 – 30 Tahun		31 – 50 Tahun		>50 Tahun	

Setelah dirinci menurut kelamin dan umur, jumlah penduduk rentan di antara pengungsi juga perlu dirincikan. Ini berguna untuk menyediakan layanan dasar khusus bagi mereka. Data kelompok rentan dapat mengadaptasi dari tabel di bawah ini.

Tabel 5.6: Jumlah pengungsi kelompok rentan

Dusun (RT/RW)	Total Jumlah Penduduk Rentan	Balita	Lansia/ Jompo	Anak Berkebutu han Khusus	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Orang Sakit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

## Langkah 2. Dampak pada infrastruktur

Perkiraan dampak kerusakan atau gangguan fungsi pada infrastruktur perlu ditangani agar dapat diandalkan keberfungsian dalam memenuhi kebutuhan dasar dan penyelamatan nyawa. Untuk memperkirakan dampak pada infrastruktur dapat mengadaptasi tabel berikut ini:

Tabel 5.7: Dampak pada Infrastruktur

Jenis	Jumlah dan Tingkat Kerusakan			Perkiraan Lama Gangguan Fungsi (hari)
	Parah	Sedang	Ringan	
Rumah				
Jalan				
Jembatan				
Balai desa				
Puskesmas				
Sekolah				

## Langkah 3. Dampak-dampak pada aspek ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat (administrasi, pendidikan dan kesehatan)

Tidak semua wilayah akan mengalami dampak sama pada satu ancaman sama. Kembangkanlah perkiraan dampak pada aspek-aspek sesuai dengan kebutuhan

*Contoh perkiraan dampak akibat angin puting beliung desa Panggungrejo, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung. Pernyataan perkiraan dampak dicampur antara dampak pada infrastruktur dan manusia. Ini karena dampak pada infrastruktur hanya pada rumah sehingga tidak dibahas tersendiri. Jumlah perkiraan rumah roboh/ rusak di Pekon Panggungrejo diperoleh dari hasil identifikasi rumah berpeluang roboh atau rusak parah terkena angin puting beliung karena konstruksi non permanen, terbuat dari bambu, rumah tua, rumah dalam keadaan rusak dan rumah-rumah berdekatan dengan pohon berbahaya.*

Tabel 5.8: Contoh perkiraan dampak angin puting beliung desa Panggungrejo

Perkiraan Dampak	Jumlah
Rumah roboh/rusak	39
Lansia ( L )	5
Balita ( B )	16
Orang Sakit ( SO )	0
Hamil ( H )	0
Perkiraan Jumlah Pengungsi	195

#### IV. PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dimaksud disini adalah tujuan-tujuan khusus dan indikatif yang hendak dicapai dari adanya perencanaan kontinjensi. Strategi merupakan cara spesifik yang akan dilakukan untuk mencapai kebijakan. Kebijakan dan strategi harus merupakan hasil kesepakatan bersama dalam penyusunan rencana kontinjensi.

Kebijakan atau tujuan diekspresikan dengan kalimat-kalimat pernyataan tegas (tidak bermakna ganda) serta mudah dipahami. Biasanya dimulai dari hal-hal umum tentang tujuan utama penyusunan rencana kontinjensi, yaitu tertanganinya situasi sehingga sedikit mungkin korban dan kerugian dan kemudian tentang pengeralahan seluruh sumberdaya daerah hingga penetapan panjang masa tanggap darurat. Sedangkan strategi atau cara diekspresikan dengan kalimat-kalimat pernyataan tegas dan bersifat mengatur bagaimana suatu hal harus dilakukan.

##### Langkah 1. Penetapan kebijakan

Berikan penjelasan pada partisipan/peserta bahwa langkah awal penting dari suatu perencanaan kontinjensi adalah penetapan kebijakan. Berikan ilustrasi tentang pernyataan kebijakan paling umum dan merupakan tujuan utama perencanaan kontinjensi lalu lanjutkan ke kebijakan berikutnya. Tuliskan kesepakatan kalimat kebijakan pada tabel.

##### Langkah 2. Penetapan strategi

Setelah usai dengan pernyataan kebijakan, lanjutkan dengan kalimat-kalimat strategi atau cara mencapai kebijakan. Caranya, ulas satu persatu cara-cara mencapai setiap butir kebijakan dengan menggunakan tabel berdampingan seperti pada contoh.

Tabel 5.8: Kebijakan dan strategi

Kebijakan	Strategi
Memastikan semua warga terdampak tertangani dan tercukupi kebutuhan dasarnya	Mengerahkan semua sumber daya dan Potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipasif.
	Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Penyediaan Logistik dan fasilitas pengungsian bagi pengungsi, serta pos-pos kesehatan, rumah sakit lapangan di setiap titik pengungsian, menyiapkan obat-obatan, penyediaan darah, dokter dan paramedis.



*Contoh pernyataan kebijakan:*

- 1. Memastikan semua warga terdampak tertangani dan tercukupi kebutuhan dasarnya*
- 2. Memastikan keberlanjutan proses pendidikan*
- 3. Memastikan tidak munculnya risiko ikutan*
- 4. Meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik serta memastikan bahwa para korban bebas dari tindakan diskriminasi.*
- 5. Memastikan inventarisasi dan penyelamatan aset penting negara.*
- 6. Memastikan semua korban manusia, dapat segera di tolong, bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan, sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan.*

*Contoh pernyataan strategi:*

- 1. Memerintahkan seluruh Dinas instansi/lembaga/masyarakat untuk mengerahkan semua sumber daya dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta pelibatan semua elemen masyarakat dan sumber daya lokal yang tersedia dalam penanggulangan bencana, pengawasan dan monitoring penerimaan dan penyebaran bantuan.*
- 2. Pembentukan Posko Penanggulangan Bencana dan Penyediaan Logistik dan fasilitas pengungsian bagi pengungsi, serta pos-pos kesehatan, rumah sakit lapangan di setiap titik pengungsian, menyiapkan obat-obatan, penyediaan darah, dokter dan paramedis.*
- 3. Mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan masyarakat.*
- 4. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan.*
- 5. Mengerahkan semua sumber daya dan Potensi yang ada untuk dapat dipergunakan dalam tanggap darurat penanggulangan bencana, dan bersifat partisipatif.*
- 6. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam manajemen dan pengendalian (Posko), manajemen bantuan-bantuan sampai dengan penyimpanan dan distribusi tepat sasaran.*
- 7. Melakukan kegiatan mengurus para korban bencana dengan kegiatan evakuasi, penyelamatan korban luka-luka, dan pelayanan kesehatan.*
- 8. Melaksanakan kegiatan mengurus para pengungsi korban bencana dengan kegiatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara, dan MCK serta air bersih.*

## V. PERENCANAAN SEKTORAL

Perencanaan sektoral dimaksud disini adalah perencanaan sektor atau bidang yang perlu ditangani, siapa menanganinya, bagaimana dan kapan menanganinya serta kebutuhan sumberdayanya. Jenis dan jumlah sektor untuk ditangani selaras dengan pernyataan kebijakan. Beberapa sektor atau bidang paling umum ada dalam rencana yakni, SAR, penampungan pengungsi, layanan kesehatan, air-sanitasi.

### Langkah 1. Analisa sektor dan pemangku kepentingan

Tanyakan pada partisipan sektor atau bidang kerja apa saja yang perlu ada dalam penanganan bencana. Tuliskan kesepakatan pada tabel kolom kiri lalu tanyakan siapa saja pelaku di sektor tersebut.

Tabel 5.9: Sumberdaya pelaku

Sektor	Pelaku
Pencarian dan penyelamatan (SAR)	TRC BPBD, Polisi, TNI, PMI, Satpol PP
Pengkajian dampak	TRC BPBD
Evakuasi	PMI, Pramuka

Rencana satu sektor biasanya selalu terhubung dengan sektor lainnya. Maka hal terpenting harus diperhatikan dalam penyusunan rencana sektor adalah keterkaitan dan sinergi antara sektor satu dengan lainnya. Agar mempermudah melihat keterhubungan dan kepaduan antar sektor, maka rencana tiap sektor sekurang-kurang harus memuat 6 penjelasan di bawah ini:

1. Situasi. Menjelaskan dalam situasi seperti apa sektor bersangkutan mulai bekerja
2. Tugas. Menjelaskan apa saja jenis-jenis tugas tiap sektor
3. Sasaran. Menjelaskan rincian dan ukuran-ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas sektor
4. Kegiatan dan Pelaku. Menjelaskan bentuk kegiatan dan pelakunya (dalam bentuk tabel)
5. Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya. Menjelaskan kebutuhan-kebutuhan sumberdaya oleh sektor agar dapat melaksanakan tugasnya
6. Analisa Kesenjangan Sumberdaya. Menjelaskan perbedaan atau selisih sumberdaya antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Penjelasan ini menjadi alat untuk mengukur kemampuan serta sebagai acuan dalam pengembangan rencana kontinjensi.

#### *Contoh Rencana Sektor:*

##### **Seksi Pemantau, Peringatan Dini dan Pendataan**

###### 1. Situasi

Memasuki masa peralihan dari musim penghujan ke kemarau (bulan Maret-April) dan dari musim kemarau ke penghujan (bulan September-Oktober) dimungkinkan terjadi angin puting beliung. Setiap gejala atau tanda-tanda angin puting beliung perlu dideteksi dan segera disebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa Mataram. Usai kejadian puting beliung dibutuhkan data-data tentang jumlah penyintas, jumlah relawan, dan kerugian harta benda.

2. Sasaran
- Terdeteksinya tanda-tanda ancaman angin puting beliung
  - Tersebarluaskannya aba-aba tanda bahaya angin puting beliung
  - Tersedianya data penyintas, korban luka, dan kerugian harta benda
3. Kegiatan
- Memantau tanda-tanda ancaman
  - Memberikan aba-aba (peringatan dini) penyelamatan diri pada masyarakat
  - Mendata warga masyarakat terdampak bencana
  - Mendata kerugian akibat bencana

Tabel 5.10: Contoh kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya

No	Jenis Kebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1	Kentongan	7	Buah	7		7 kentongan
2	Megaphone	7	Buah		7	
3	Hp	7	Buah	7		7 dusun
4	Teropong	7	Buah		7	
5	Buku,pena penggaris	1	Set	1		1 dusun
6	HT	7	Buah	1	6	Warga

*Contoh Rencana Sektor:*

Seksi P3K, Kesehatan dan MCK

1. Situasi

Angin puting beliung menyebabkan 25 orang mengalami luka-luka (patah tulang, lecet, sayat, potong dan perdarahan). Semua korban luka harus mendapatkan pertolongan pertama agar tidak menjadi lebih parah dan berkurang penderitaanya.

Sementara itu, 200 orang penyintas serta 50 orang relawan dilokasi penampungan membutuhkan air bersih dan MCK.

2. Sasaran

- Semua korban luka mendapatkan pertolongan pertama
- Semua korban luka dirujuk ke pusat layanan kesehatan terdekat
- Tersedianya MCK dan air bersih bagi penyintas dan relawan

3. Kegiatan

- Memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban luka
- Merujuk korban luka ke rumah sakit/layanan kesehatan terdekat
- Menyiapkan air bersih dan MCK untuk para penyintas

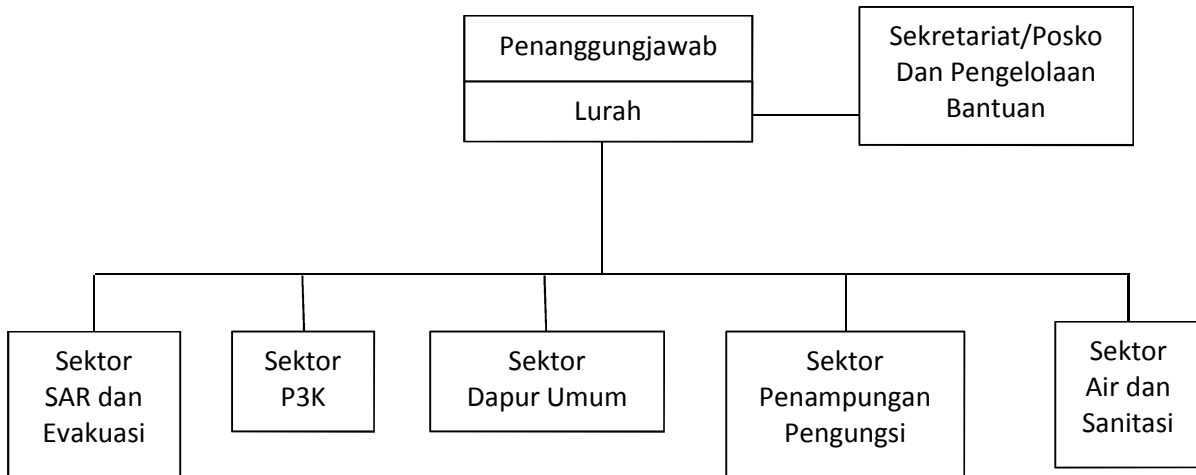
Tabel 5.11: Contoh kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya

No	Jenis Kebutuhan	Vol	Satuan	Tersedia	Kekurangan	Ket
1	Mobil	1	Unit			Warga
2	Motor	7	Unit			Warga
3	Obat merah	7	Kotak		7	Puskesmas
4	Kain kasa	7	Gulung		7	Puskesmas
5	Alcohol	7	Kotak		7	Puskesmas
6	Tandu	7	Buah		7	Dinas terkait
7	WC Umum					
	▪ Ember	1	Biji		7	
	▪ Gayung	1	Biji		7	
	▪ Sabun	1	Bungkus		7	
8	Kapas					
9	Sepal atau daplok					
10	Kain segitiga					
11	Minyak angin					
12	Truck tangki					
13	Penampungan Air					
14	WC darurat					

## VI. STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT

Setelah semua seksi membuat perencanaan kegiatan, proses lokakarya dapat dilanjutkan dengan menyusun struktur komando tanggap darurat (SKTD). Struktur ini akan menggambarkan secara jelas hirarki, rantai komando dan rantai koordinasi antar sektor, pengambilan keputusan dan alur pertanggungjawaban. Struktur komando tanggap darurat dapat disusun menggunakan organogram seperti di bawah ini.

Gambar 5.2: Organogram Komando Tanggap Darurat



### 5.7.3 Simulasi Ruang

Simulasi merupakan rekayasa kejadian untuk menggerakkan setiap unsur dalam suatu rencana kontinjensi dan memastikan unsur-unsur tersebut memahami tugas-tugasnya. Simulasi menjadi cara mencari kelemahan pada sebuah rencana kontinjensi. Selain juga berguna untuk memastikan tiap sektor tahu dan paham betul tugas masing-masing.

Simulasi ruang di selenggarakan di dalam ruangan. Menggunakan skenario sedekat atau semirip mungkin dengan situasi kejadian sesungguhnya. Melibatkan seluruh unsur dan pelaku-pelaku sesungguhnya dalam suatu rencana kontinjensi. Karenanya wajib dihindari dalam simulasi adalah adanya aktor atau pelaku palsu, pemeran pengganti. Dalam simulasi seharusnya pak lurah memerankan lurah, agar mereka paham betul apa saja tugas dan tanggungjawab mereka sesuai dengan rencana kontinjensi.

#### Langkah 1. Pengantar simulasi ruang dan persiapan

Berikan penjelasan singkat bahwa kita akan melakukan simulasi ruang. Para pihak harap berkumpul dengan sektor masing-masing dan koodinator sektor memeriksa kelengkapan anggotanya. Setelah siap, pastikan setiap sektor memegang dokumen berisi perencanaan sektor masing-masing.

#### Langkah 2. Pengaturan ruang

Ajak semua sektor berkumpul di satu meja (satu meja per sektor) dan atur jarak masing-masing agar tidak terlalu dekat atau terlalu jauh agar masing-masing bisa saling mendengar. Biasanya

simulasi ruang menggunakan format *round table*. Tapi jika ruangan tidak tersedia meja maka tiap sektor bisa membentuk lingkaran sendiri.

### **Langkah 3. Skenario simulasi ruang**

Jelaskan, siapa pemberi aba-aba dan seperti apa aba-abanya. Setelah ada aba-aba sektor, bergerak melakukan tugasnya dengan menyebutkan apa saja kegiatannya sebagaimana tertulis dalam rencana kontinjensi. Beberapa sektor akan bergerak melaksanakan kegiatannya susul menyusul tetapi ada juga sektor yang bergerak secara bersamaan. Biarkan tiap sektor menentukan sendiri kapan mereka akan bergerak.

### **Langkah 4. Pelaksanaan simulasi ruang**

Simulasi ruang biasanya berjalan sampai 3 atau 4 putaran. Fasilitator biasanya menjadi pemberi aba-aba di putaran awal simulasi ruang. Selanjutnya serahkan pemberian aba-aba pada sektor peringatan dini jika ada atau pihak yang ditunjuk sesuai dalam dokumen rencana kontinjensi.

Di bawah ini gambaran tentang berjalannya simulasi ruang.

*Fasilitator (pemberi aba-aba):*

*“Selamat siang, nama saya XXXX, kepala badan meteorologi dan geofisika kabupaten YYYY. Dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai awal minggu depan kita memasuki periode peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, wilayah kabupaten YYYY berpotensi terjadi angin puting beliung. Maka kepada seluruh masyarakat diharap waspada”.*

*Seksi peringatan dini (menyebutkan kegiatan-kegiatannya):*

*“Kami seksi peringatan dini. Melakukan kegiatan peyebarluasan peringatan kepala BMKG kepada seluruh masyarakat dan sektor/sektor lain dan mulai melakukan pengamatan tanda-tanda serta gejala angin puting beliung.”*

*-----Terdeteksi tanda-tanda puting beliung-----*

*Seksi peringatan dini: “Membunyikan sirine, memukul kentongan dan menghubungi koordinator-koordinator seksi agar bersiap.”*

*-----Terjadi puting beliung-----*

*Seksi P3K: “Melakukan pertolongan pada korban luka.”*

*Seksi Evakuasi: “Membantu seksi P3K melakukan pertolongan dan melakukan evakuasi korban luka ke layanan kesehatan terdekat.”*

*Seksi barak pengungsian: “Mempersiapkan tempat penampungan, menerima pengungsi dan menempatkan pengungsi sesuai umur dan jenis kelamin.”*

*Dan seterusnya*

## **Langkah 5. Evaluasi**

Usai beberapa kali putaran simulasi ruang, lakukan evaluasi. Evaluasi ini ditujukan untuk mencari kelemahan rencana kontinjensi diantaranya 1) ada sektor belum paham kegiatannya, 2) kalimat dalam rencana sektor tidak mudah dipahami, 3) ada sektor belum paham kapan mulai melaksanakan kegiatannya dan, 4) ada sektor melaksanakan kegiatan lebih awal dari seharusnya.

Beberapa pertanyaan kunci evaluasi:

- Sektor mana yang melakukan kegiatan setelah aba-aba? Bagaimana urutannya?
- Adakah kalimat di rencana sektor yang tidak mudah dipahami?
- Apakah ada sektor yang belum tahu kapan akan melakukan kegiatannya?

### **5.7.4 Simulasi Lapang**

Kalau simulasi ruangan dilakukan di dalam ruang, maka simulasi lapang dilakukan di wilayah rawan bencana sesungguhnya. Simulasi lapang melibatkan sejumlah masyarakat sebagai korban luka, meninggal dan mengungsi. Pelibatan masyarakat ini bertujuan untuk menguji kecepatan dan ketepatan respon setiap sektor. Pelaksanaan simulasi atau geladi lapang dibahas dalam panduan berikutnya.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Panduan 6

## Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan

### 6.1 Pengantar

Pemerintah telah menyusun berbagai regulasi yang mengatur upaya penanggulangan bencana, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang merupakan amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana beserta peraturan-peraturan turunannya. RAN PRB menjadi arahan bagi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan membuat prioritas program secara sistematis. Dokumen RAN PRB juga menyebutkan secara spesifik tentang diperlukannya suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui suatu Platform/Forum. Inisiasi dan pembentukan forum juga menjadi kebutuhan baik di tingkat nasional maupun lokal yang meliputi; tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa/Kelurahan.

Dorongan untuk memperkuat peran forum tingkatan lokal ini juga kembali dipertegas dalam dokumen Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 (SF-DRR). Dokumen ini merupakan dokumen lanjutan dari Kerangka Aksi Hyogo yang telah berakhir Juni 2015. Dokumen yang diadopsi dan disepakati dalam *3rd World Conference for Disaster Risk Reduction (WCDRR)*, telah menegaskan pentingnya peran forum yang disebutkan dalam indikator prioritas aksi 2; “Membangun dan memperkuat forum koordinasi pemerintah yang terdiri dari *stakeholder* yang relevan di tingkat nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana, dan titik fokus nasional yang ditujukan untuk pelaksanaan kerangka pasca 2015”. Dalam dokumen SF-DRR ini juga disinggung cara mengakselerasikan kerja-kerja baik melalui kebijakan dan perencanaan yang terkait dengan isu Adaptasi Perubahan Iklim (API).

Forum sebagai sebuah mekanisme koordinasi dalam pengarusutamaan PRB dan berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB yang menyeluruh diberbagai tingkatan. Diharapkan Forum PRB akan dapat mengawal kerja kerja PRB, termasuk penyusunan Rencana Aksi - PRB di masing-masing tingkatan.

Di tingkat Desa/Kelurahan, forum mewadahi, mewakili dan menyuarakan berbagai elemen masyarakat. Dalam proses pembentukan Forum PRB tingkat desa/kelurahan harus memperhatikan partisipasi/keterwakilan dari berbagai unsur meliputi; pemerintah, lembaga usaha, organisasi masyarakat, kelompok-kelompok profesi, kategori-kategori lain, termasuk kelompok difabel, kelompok perempuan, dan keterwakilan dari wilayah. Hal ini penting, agar cakupan partisipasi masyarakat bisa lebih luas dan pemerataan partisipasi sekaligus mendukung promosi PRB ke semua wilayah yang ada di Desa/Kelurahan. Terbentuknya forum akan lebih menjamin keterlibatan, integrasi dan kesinambungan PRB termasuk implementasi Rencana Penanggulangan Bencana dan

Rencana Aksi Komunitas menuju Desa/Kelurahan yang tangguh bencana yang berakar pada masyarakat.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Kenapa harus ada Forum PRB di Desa/Kelurahan?
- Siapa saja pelaku atau potensi pelaku PRB di Desa/Kelurahan?
- Elemen atau siapa saja yang dapat gabung dalam Forum PRB Desa/Kelurahan?
- Di manakah kedudukan Forum PRB Desa/Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan?
- Kapan waktu yang tepat dalam pembentukan/penguatan Forum PRB Desa/Kelurahan?
- Apa tugas dan fungsi elemen atau pelaku yang terlibat dalam Forum RPB?
- Apa saja bentuk mandat Forum PRB terkait implementasi Rencana Aksi Komunitas?
- Peran apa yang dapat dilakukan oleh Forum PRB dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat Desa/Kelurahan terkait Pengurangan Risiko Bencana?

## 6.2 Tujuan

- Mengidentifikasi lembaga/forum di Desa/Kelurahan atau membentuk forum untuk penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.
- Mengawal proses pembuatan RPB dan RAK serta mengawasi proses pelaksanaannya.
- Untuk melakukan kerja-kerja pengurangan risiko bencana di tingkat Desa/Kelurahan dengan menyelaraskan/mengintegrasikan dalam pembangunan.
- Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya dalam membentuk dan memperkuat jaringan untuk pengurangan risiko bencana.
- Mengawal dan mengontrol pelaksanaan aksi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan tangguh.

## 6.3 Hasil Kegiatan

- Tersusunnya dokumen formulasi perangkat kelembagaan forum PRB Desa/Kelurahan, yang meliputi; AD/ART (Statuta), struktur kepengurusan, tugas pokok dan fungsi yang disepakati.
- Adanya rencana kerja pengurangan risiko bencana konkrit dan periodik yang merupakan kesepakatan bersama oleh seluruh komponen Forum PRB Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan
- Dokumen pengesahan Forum PRB Desa/Kelurahan.
- Rencana tindak lanjut oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan.

## 6.4 Sumber Daya Pendukung

- Profil Umum/Baseline Desa/Kelurahan
- Profil Risiko Bencana dalam RPB Desa/Kelurahan
- RPJM (Lima tahun) dalam bentuk Perdes/Keputusan Lurah dan RKP atau yang setara
- RAD berbentuk Pergub/Perbup/Perwali selama lima tahun
- Potensi berbagai kelompok kepentingan di Desa/Kelurahan

## 6.5 Peserta

Elemen atau unsur keanggotaan forum PRB : Pemerintah Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat (guru, tokoh budaya, tokoh agama, sesepuh Desa/Kelurahan, dll), BPD, LPMD, Organisasi Masyarakat, PKK, Kelompok Pemuda/Karang Taruna, KWT – Kelompok Wanita Tani atau Anggota Gapoktan, Kader Kesehatan, Wakil dari penyandang disabilitas, Kelompok UMKM, Kelompok Potensi lainnya – relawan.

## 6.6 Tempat

Di balai atau kantor Desa/Kelurahan, atau tempat lain yang layak.

## 6.7 Tahapan Kegiatan

Tahapan pembentukan forum dimulai dengan merujuk pada hasil kajian risiko bencana. Hasil kajian yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan, dan wadah atau kelompok untuk menjamin pelaksanaan pengurangan risiko bencana di tingkat Desa/Kelurahan. Hasil dari kajian tersebut kemudian dibawa dalam rembug Desa/Kelurahan, dan disepakati adanya wadah seluruh elemen masyarakat desa/kelurahan. Wadah tersebut selanjutnya disebut Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan.

- Adapun tahapan proses pembentukan Forum PRB meliputi:
- *(Tahapan berikut ini sangat fleksibel karena tergantung kondisi dan kesiapan Desa/kelurahan)*

Tahap	Langkah Memandu Kegiatan dan Perkiraan Waktu	Metode & Media
1. Persiapan (Inisiasi)	Pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Kunci di Tingkat Desa/Kelurahan : Fasilitator memberikan pengantar tentang perlunya forum untuk menyatukan berbagai pihak, meliputi ; pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan elemen dalam masyarakat yang memiliki perhatian dalam pengurangan risiko bencana di tingkat Desa/Kelurahan.	Presentasi dengan peraga <i>power point</i> atau kertas plano atau foto copy materi
	Mengidentifikasi keberadaan semua kelompok masyarakat yang dapat menjadi pendukung pembentukan Forum di Desa/Kelurahan yang dapat berfungsi sebagai wahana untuk kegiatan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat.	Pleno - curah pendapat untuk identifikasi semua kelompok masyarakat yang ada di desa / kal. Usul – masukan peserta

Tahap	Langkah Memandu Kegiatan dan Perkiraan Waktu	Metode & Media
	<p>Dalam identifikasi ini bisa juga dilakukan dengan mengisi formulir yg berisi informasi dasar dari setiap kelompok masyarakat. Apabila menggunakan formulir harus dilakukan di dalam kelompok-kelompok kecil.</p>	<p>ditulis di papan / kertas <i>flip chard</i> / <i>power point</i> agar bisa dilihat oleh seluruh peserta.</p>
<p>2. Pelaksanaan (Pembentukan)</p>	<p>Fasilitator memberikan pengantar tentang peran, fungsi dan perlunya dibentuknya Forum PRB di desa/kelurahan</p>	<p>Presentasi dengan peraga <i>power point</i> atau kertas plano atau foto copy materi</p>
	<p>Pembentukan Draft Struktur Organisasi Forum, termasuk personil dan tugas-tugasnya:</p> <p>Kelompok Kerja memutuskan untuk menguatkan Forum yang sudah ada (yang belum ada Forum membentuk Forum lebih dahulu) atau memperbarui forum yang ada sesuai dengan potensi dan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Dalam pembentukan ini termasuk memilih pengurus dan menentukan strukturnya dan unit-unit (Pokja) yang diperlukan. Kepengurusan forum ini harus mempresentasikan semua unsur perwakilan masyarakat desa/kelurahan termasuk keterwakilan perempuan minimal 30% dan keterwakilan kelompok difabel.</p> <p>Pemilihan pengurus bisa melalui musyawarah maupun dengan melalui voting, tergantung kesepakatan bersama.</p> <p>Dalam hal ini Fasilitator dapat memperkenalkan (memberikan referensi) tentang struktur Struktur Organisasi Forum.</p>	<p>Diskusi kelompok dan pleno dengan peraga alat tulis.</p>
	<p>Setelah Forum PRB disepakati, Forum merumuskan AD/ART (termasuk visi dan misi) serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, sebagai pedoman perjalanan Forum.</p>	<p>Diskusi kelompok dan pleno dengan peraga alat tulis</p>
	<p>Merumuskan rencana kerja forum, paling tidak untuk satu tahun.</p>	<p>Diskusi kelompok dan pleno dengan peraga alat tulis</p>
	<p>Membuat rencana tindak lanjut termasuk rencana legalisasi forum (SK atau Perdes). Perlu ada analisis (walau sederhana) tentang kekuatan dan kelemahan bentuk legal Forum, baik berbentuk SK atau Perdes.</p>	<p>Diskusi kelompok dan pleno dengan peraga alat tulis.</p>

Tahap	Langkah Memandu Kegiatan dan Perkiraan Waktu	Metode & Media
3. Pelaporan	<p>Pada akhir sesi ini dihasilkan:</p> <p>Gambar Bagan Struktur Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan atau bentuk lembaga lain yang disepakati oleh warga masyarakat.</p> <p>Laporan singkat proses yang dilakukan (2 halaman)</p>	

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Panduan 7

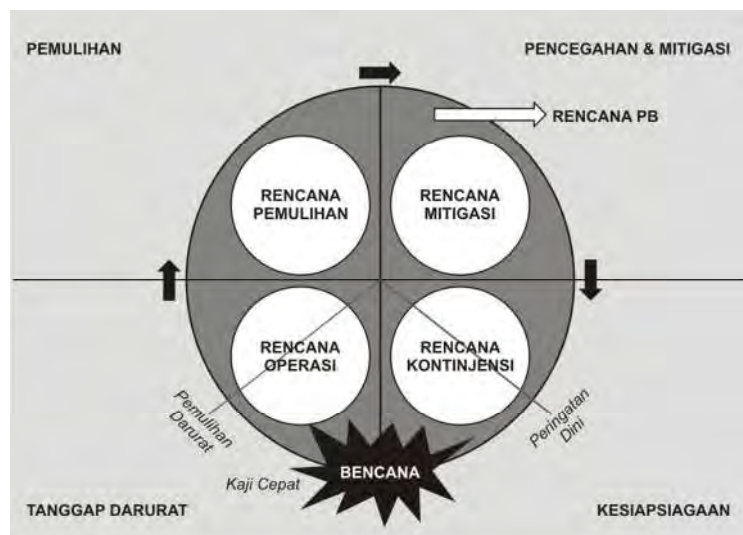
## Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

### 7.1 Pengantar

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa disusun pemerintah desa bersama masyarakat secara partisipatif. Sebagai representasi masyarakat dapat melibatkan Forum PRB Desa. RPB Desa tersebut memuat rencana tindakan yang bersifat programatik selama 5 (lima) tahun) berdasarkan profil risiko bencana pada desa/kelurahan dalam waktu tertentu, dalam arti luas RPB merupakan program strategis pada seluruh bidang/cakupan pengurangan risiko bencana, baik dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

Menimbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Induk, posisi RPB merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terpisah dengan RPJM. RPB menjadi dokumen acuan bagi desa/kelurahan dalam menyusun program pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana desa/kelurahan melalui proses perencanaan pembangunan ditingkat desa/kelurahan, sekaligus sebagai dokumen pendukung program Penanggulangan Bencana dalam dokumen RPJM Desa/Kelurahan yang sudah ada, juga menjadi rujukan program-program pembangunan yang diselenggarakan baik oleh elemen pemerintah maupun non-pemerintah.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini selain memuat data dan informasi tentang risiko bencana, juga mengandung strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana (Perka BNPB No 4 Tahun 2008). RPB juga merupakan sarana koordinasi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana yang menekankan sinergi lintas bidang pembangunan melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa/kelurahan mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.



RPB juga memuat Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang merupakan rencana kegiatan komunitas (operasional) dalam bentuk matrik kegiatan untuk mengelola pengurangan risiko bencana, sekaligus sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan rencana penanggulangan bencana. RAK tersebut merupakan turunan dari Bab III yang memuat Prioritas Program dengan ruang lingkup berupa upaya-upaya/pilihan tindakan pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan) atau diistilahkan manajemen risiko.

Keberadaan dokumen RPB merupakan kemajuan langkah dan seharusnya mendorong komitmen dan realisasi aksi. Maka, pengawalan realisasi RPB oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Pemerintah Desa dengan Koordinasi secara intensif melalui integrasi dalam rencana pembangunan desa/kelurahan sangat penting. RPB perlu dilakukan pembaharuan secara periodik menimbang tingkat risiko yang berubah.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Apa Rencana Penanggulangan Bencana dan apa tujuannya?
- Apa Rencana Aksi Penanggulangan Bencana dan apa tujuannya?
- Siapa yang berperan dalam menyusun dan menyiapkan RPB dan RAK?
- Kapan waktu menyusun dokumen RPB-RAK?
- Siapa yang berkewajiban memantau langsung pelaksanaan RPB dan RAK?
- Bagaimana cara memahami bahwa PRB bersifat multi sektor untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan program-program lain, seperti PNPM, kesehatan, pengembangan air bersih dan sanitasi dll.?
- Strategi apa yang dijalankan untuk memadukan RPB dan RAK ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa ?

## 7.2 Tujuan

Kegiatan penyusunan RPB dimaksudkan untuk:

- a. Menyusun program-program strategis penanggulangan bencana
- b. Menyusun kegiatan-kegiatan operasional pengurangan/pengelolaan risiko bencana
- c. Sinergi program penanggulangan bencana lintas bidang dan multisektor yang diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Desa.

## 7.3 Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan yang diharapkan berupa:

- a. Peserta mempunyai pemahaman dan proses yang sama dalam menyusun dokumen RPB dan RAK.
- b. Draft Dokumen RPB, termasuk RAK di dalamnya.
- c. Rencana tindak lanjut untuk penyelesaian dokumen.

## 7.4 Sumber Daya Pendukung

Sumberdaya yang dapat digunakan berupa:

- a. Dokumen Kajian Risiko/profil risiko
- b. Profil Desa
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- d. RKPDes/Kelurahan

## 7.5 Peserta

Peserta tidak terbatas pada:

- a. Forum PRB Desa
- b. Kepala Desa / Lurah, Sekretaris Desa / Kelurahan, Kaur Pembangunan,
- c. Tokoh Masyarakat /Tokoh Keagamaan / Tokok Perempuan
- d. Badan Permusyawaratan Desa
- e. Camat

## 7.6 Tempat

- a. Balai / Kantor Desa / Kelurahan
- b. Rumah warga

## 7.7 Tahapan proses

### 1. PENGANTAR

Fasilitator membuka acara dengan menjelaskan tujuan kegiatan. Dilanjutkan dengan memberikan pengantar tentang urgensi penyusunan RPB sebagai perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk seluruh ancaman bencana prioritas.

Fasilitator perlu memaparkan beberapa topik berikut:

1. Hasil Kajian Risiko; ancaman prioritas, kerentanan, kapasitas, dan risiko.
2. Kaitan antara RPB, RPJMDes dan RKPDes,
3. Tahapan proses penyusunan RPB dan susunan isi RPB
4. Kerangka Isi RPB memuat beberapa materi
  - Bab 1 Gambaran wilayah, profil desa/kelurahan, sejarah kebencanaan,
  - Bab 2 Profil Risiko Bencana,
  - Bab 3 Prioritas Program
  - Bab 4 Rencana Aksi Desa/Kelurahan (yang disusun untuk periode lima (5) tahun)
  - Bab 5 Monitoring dan Evaluasi
  - Bab 6 Penutup

### 2. ALAT DAN BAHAN

- Kertas plano, spidol, metaplan, isolasi
- Juknis RPB
- Peta Risiko dan Tabel Kajian Risiko



### 3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Penyusunan program pembangunan haruslah didasarkan pada kebutuhan yang berasal dari kesenjangan kenyataan dan kondisi ideal. Begitu pula program penanggulangan Bencana, program didasarkan pada kesenjangan antara kerentanan dan kapasitas sehingga dapat mengidentifikasi kapasitas yang dibutuhkan.

Setelah partisipan mendapatkan informasi ulang risiko bencana desa (karakteristik ancaman, kerentanan, kapasitas), fasilitator memfasilitasi identifikasi kapasitas yang dibutuhkan dengan tabel berikut:

Tabel 7.1: Identifikasi Kebutuhan

No.	Kerentanan	Kapasitas yang dimiliki	Kapasitas yang dibutuhkan Penanggulangan Bencana
1	2	3	4

Tabel 7.2: Contoh identifikasi kebutuhan ancaman tanah longsor

No.	Kerentanan	Kapasitas yang dimiliki	Kapasitas yang dibutuhkan Penanggulangan Bencana
1	2	3	4
1	Kondisi tanah yang labil dengan kelereng curam.	Upaya penanaman pohon	Upaya rehabilitasi hutan dengan memperbanyak tanaman berakar kuat dengan sistem lahan terasiring
2	Sistem Drainase yang tidak memadai	Gotong royong	Penjadwalan kegiatan bhakti lingkungan yang rutin
3	Pengetahuan warga masih sangat kurang untuk mengelola risiko tanah longsor atau lainnya	Lembaga pemerintahan dan kepemudaan	Media peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola ancaman longsor
4	Penghasilan pokok dari pertanian tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok	Sumber daya tanaman lokal	Latihan teknis kerja dan peralatan yang mendukung usaha ekonomi produktif
5	Belum mempunyai perencanaan kedaruratan	Organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan	Rencana kedaruratan
6	Tidak memiliki jaminan kesehatan dan	Arisan dan dana sosial kelompok tani	Merancang model tabungan/asuransi di masyarakat

**Catatan:** Diskusi identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan metode diskusi kelompok apabila lebih dari 1 ancam prioritas. Untuk menyingkat waktu, fasilitator dapat menyusun rancangan identifikasi sebelumnya pada kertas plano untuk disepakati dalam diskusi.

#### 4. PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Setelah disepakati kebutuhan kapasitas untuk mengelola ancaman, fasilitasi penyusunan program strategis penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun. Perencanaan program yang baik menggunakan kata kerja dan haruslah menerapkan prinsip SMART.

*S* = *Specific*, spesifik tujuan, lokasi, sasaran

*M* = *Measurable*, terukur capaiannya

*A* = *Achievable*, realistis dapat dicapai

*R* = *Relevant*, penting untuk mencapai tujuan

*T* = *Time-bound*, target waktu

Tabel 7.3: Prioritas Program Penanggulangan Bencana  
(Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Respon Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi)

No	Program	Target	Pelaksana	Asal Sumberdaya
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

Tabel 7.4: Program Prioritas  
(Mitigasi, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Rehabilitasi, Rekonstruksi) ancaman Tanah Longsor

No	Program	Target	Pelaksana	Asal Sumberdaya
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi kawasan rentan longsor	Pembuatan terasiring pada lahan yang rentan longsor) terutama di petak 24, 27, dan 29	Masyarakat, Pemerintahan desa, Perhutani, Dishutbun, Bappeda, Bapedal, dinas ESDM, Dinas Pertamanan, dinas P.U.	Dana Desa, APBD
2	Menyediakan hunian yang aman	Keluarga yang berada di kawasan rawan aman dari tanah longsor	Pemerintah Desa, Pemkab Cilacap, Pemprov Jawa Tengah	APBD

No	Program	Target	Pelaksana	Asal Sumberdaya
1	2	3	4	5
3	Meningkatkan kesiapsiagaan	Masyarakat dapat memahami sistem peringatan dini dan rencana evakuasi	Pemerintah Desa/Kelurahan	APBDes
4	Memenuhi kebutuhan dasar warga	Terpenuhinya kebutuhan warga ketika mengungsi		
5	Menyiapkan peralatan pada kondisi darurat (tenda, tandu, obat, dll)	Alat-alat untuk kondisi darurat tersedia	Pemerintah Desa	APBDesa, APBD

## 5. PENYUSUNAN KEGIATAN PRIORITAS

Peserta menurunkan hasil prioritas program menjadi rencana kegiatan tahunan/Rencana Aksi Komunitas untuk PRB.

Tabel 7.5: Tabel RAK/ Rencana Tahunan  
(Kegiatan Pencegahan / Mitigasi / Kesiapsiagaan)

No	Kegiatan	Target	Lokasi	Waktu	Jumlah Dana	Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							

Tabel 7.6: Kegiatan Pencegahan / Mitigasi / Kesiapsiagaan

No	Kegiatan	Target	Lokasi	Waktu	Dana (juta)	Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membuat terasiring pada lahan yang berpotensi longsor	Pembuatan terasiring lahan yang rentan longsor	Dusun 1, kawasan hutan di petak 24, 27, dan 29	Bulan 6	200	Dana Desa, APBD	Masyarakat, Pemerintahan desa, Perhutani, Dishutbun, Bappeda, Bapedal, dinas ESDM, Dinas Pertamanan, dinas P.U.

No	Kegiatan	Target	Lokasi	Waktu	Dana (juta)	Sumber Pendanaan	Pelaksana/ Koordinasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Mengatur drainase lahan yang berpotensi longsor	Perbaikan sistem drainase pada lahan-lahan rentan longsor	Dusun 1, kawasan hutan di petak 24, 27, dan 29	Bulan 7	200	Dana Desa	Tim relawan Desa, Pemerintahan Desa,
3.	Menanam tanaman yang dapat menahan gerakan tanah	Tutupan vegetasi untuk menahan gerakan tanah	Dusun 1, kawasan hutan di petak 24, 27, dan 29	Bulan 9	100	APBDes, Dishutbun	Tim relawan Desa
4	Membangun hunian di lokasi yang lebih aman atau pindah ke lokasi aman	Hunian masyarakat yang aman dari tanah longsor	Dusun 2	Tahun 2018	4.000	APBD	BPBD
5	Menerapkan sistem peringatan dini	Masyarakat dapat memahami sistem peringatan dini	Seluruh dusun, masjid, gereja, dsb.	Tahun 2017	30	APBDes	Pemerintah Desa/Kelurahan
6	Menyiapkan jalur evakuasi	Tanda/petunjuk untuk evakuasi  Peta jalur evakuasi dan lokasi aman	Seluruh Dusun	Tahun 2017	5	Swadaya	Forum PRB
7	Menyiapkan tempat pengungsian di daerah yang aman	Lokasi pengungsian yang aman dan nyaman	Dusun 3	Tahun 2018	500	APBDesa, APBD	Pemerintah Desa

## 6. PENYUSUNAN RENCANA MONITORING-EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Monitoring dan evaluasi pada prinsipnya mengukur dan menilai keberhasilan program serta mendokumentasikan pembelajaran. Peran serta masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi sangat penting untuk memastikan hak merasa aman terpenuhi, meskipun tidak jarang ada pihak yang merasa dirugikan ketika dilakukan monitoring/evaluasi, hal inilah yang perlu dihindari dan

semua pihak harus menjaga diri tidak saling menjatuhkan, terbuka menerima perbedaan, egaliter dengan semangat mencari pembelajaran demi mencapai tujuan desa yang aman dan tangguh.

Pada tahap ini bertujuan merencanakan mekanisme monitoring dan evaluasi dan evaluasi secara periodik.

Tabel 7.7: Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Sumber Daya		Keterangan
				Anggaran	Lain - lain	

Tabel 7.8: Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Sumber Daya		Keterangan
				Anggaran	Lain - lain	
Membuat terasiring pada lahan yang berpotensi longsor	Pembuatan terasiring lahan yang rentan longsor	Seluruh lahan telah menerapkan sistem terasiring		-	Swadaya pada musyawarah desa	Dilakukan pada tahun 2017
Mengatur drainase lahan yang berpotensi longsor	Perbaikan sistem drainase pada lahan-lahan rentan longsor	Adanya sistem drainase lahan		-	Swadaya pada musyawarah desa	Dilakukan pada tahun 2017
Menanam tanaman yang dapat menahan gerakan tanah	Tutupan vegetasi untuk menahan gerakan tanah	Seluruh lahan telah tertutup dengan tanaman		-	Swadaya pada musyawarah desa	Dilakukan pada tahun 2017

Tahapan menyusun rencana tindak lanjut ialah menyusun upaya yang perlu dilakukan terutama oleh pemerintah desa, agar dokumen RPB tidak hanya menjadi sekedar tumpukan kertas yang terpajang di almari arsip. Upaya yang perlu dilakukan misalnya melegalkan dengan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, mengintegrasikan atau memasukkan program penanggulangan bencana dalam RPJM melalui mekanisme musrenbangdes/musrenbangkel.

Tabel 7.9: Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan	Indikator	Sumber Daya		Keterangan
		Penanggung Jawab	Waktu	

Tabel 7.10: Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan	Indikator	Sumber Daya		Keterangan
		Penanggung Jawab	Waktu	
Legalisasi RPB	Perdes/peraturan kepala desa	BPD	Oktober	
Integrasi RPB dalam RPJM	Program PB menjadi prioritas program pembangunan dalam RPJM	LPMD	November	
Review RPB	Penyusunan ulang RPB	Forum PRB	2020	

\*Tabel Kajian Risiko disamakan dengan Panduan yang ada di Kajian Risiko

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Panduan 8

## Pembentukan Kelompok Relawan

### 8.1 Pengantar

Saat terjadi bencana di suatu tempat, maka masyarakat setempatlah yang akan menerima akibat langsung, menjadi korban atau penanggap pertama (*first responder*). Masyarakat sendiri dapat melakukan segala usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pada kondisi tanggap darurat, dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap untuk memberikan pertolongan segera, pencarian, penyelamatan dan evakuasi, membantu memenuhi kebutuhan darurat. Tenaga-tenaga tersebut bernama relawan tanggap darurat bencana. Untuk menjamin relawan-relawan dapat memberikan respon atau tanggap darurat yang efektif dalam situasi tanggap darurat, diperlukan pengorganisasian yang baik dan berkesinambungan. Untuk itu dibentuklah kelompok relawan desa/kelurahan sebagai wadah pembinaan, pendidikan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku jiwa korsa dalam penanggulangan bencana.

Kelompok relawan akan menjadi salah satu bagian dari upaya penyatuan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat untuk menanggulangi bencana yang dihadapi bersama. Pembentukannya dapat merupakan bentukan perorangan atau kelompok yang sudah ada dalam masyarakat yang bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing menyumbang agar dapat menanggulangi bencana secara efisien--tepat guna dan tepat waktu. Pada pra-bencana tugas utama kelompok relawan ini adalah membuat perencanaan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya.

#### 8.1.1 Anggota Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana

Kelompok dengan tugas utama seperti di atas, perlu berupaya agar memiliki berbagai kemampuan yang diperlukan dalam mengelola tanggap darurat dan mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Anggota kelompok harus dapat mengisi kemampuan yang diperlukan.

Beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi anggota kelompok relawan, adalah:

- Sehat jasmani, diutamakan orang dewasa (18 tahun ) dan tidak lebih dari 45 tahun
- Memiliki kemauan dan waktu untuk terlibat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Memiliki kemampuan (pengetahuan, keahlian dan ketrampilan) tertentu dalam Penanggulangan Bencana
- Memiliki jiwa kerelawanan, semangat, dan dedikasi tinggi
- Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain



- Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum pidana atau tindak subversi
- Telah diakui dan dikukuhkan sebagai relawan penanggulangan bencana oleh organisasi induk relawan
- Persyaratan lain ditentukan oleh masing-masing organisasi

Tetapi pada prinsipnya kelompok relawan dapat terdiri dari warga laki-laki maupun perempuan yang peduli dan mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan pada penanggulangan bencana dalam bentuk dan nama apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berasal dari organisasi sosial masyarakat setempat dibentuk atas hasil keputusan bersama. Setiap anggota kelompok relawan harus terlibat seluruh proses untuk terlibat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kelompok relawan.

Besarnya jumlah anggota kelompok relawan tergantung pada besarnya wilayah, besarnya cakupan kemungkinan bencana dan sumber daya manusia yang ada. Kelompok ini kemudian dibagi menjadi beberapa sektor sesuai dengan kebutuhan di rencana kontijensi desa. Sehingga kelompok relawan menjadi alat atau wadah operasional yang efektif dalam penanganan bencana di masing-masing desa/keLurahan.

Jiwa korsa--diartikan sebagai rasa senasib sepenanggungan, perasaan solidaritas, semangat kesatuan (korps), kesadaran kolektif dsb-nya. Jiwa korsa yang kuat tidak mudah padam selama di dalam kelompok. Terkandung di dalamnya loyalitas, merasa ikut memiliki, merasa bertanggungjawab, ingin mengikuti pasang surut serta perkembangan kelompok. Seorang yang memiliki jiwa korsa tinggi pasti penuh inisiatif, tetapi tahu akan kedudukan, wewenang dan tugas-tugasnya.

### **8.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelompok/Relawan**

BNPB melalui berbagai program penguatan kelembagaan secara regular melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok relawan penanggulangan bencana di daerah. Dengan sasaran peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam hal kerelawanan, tanggap darurat bencana, dan menumbuhkan jiwa korsa dan kemanusiaan; BNPB melaksanakan pengembangan kapasitas praktik kelompok relawan desa/kelurahan khususnya:

- a. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi pada tanggap darurat
- b. Pengelolaan dapur umum saat tanggap darurat
- c. Pengelolaan logistik saat tanggap darurat
- d. Pengelolaan manajemen barak (Pengelolaan Air Bersih, Sanitasi, Pelayanan Kesehatan dan Hunian)
- e. Komunikasi dan informasi dalam tanggap darurat
- f. Pengurangan Risiko Bencana
- g. Peningkatan Kompetensi antara lain pendidikan dan pelatihan, gladi, dan simulasi

Setelah mendapatkan pelatihan, anggota relawan mempunyai mandat untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, dan melatih warga lain agar memiliki kepedulian terhadap risiko bencana desa/kelurahan, pengetahuan dan ketrampilan kesiapsiagaan serta tanggap darurat.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Siapa yang merespon pertama (*first responder*) ketika bencana terjadi di desa/kelurahan?
- Apa manfaat adanya kelompok relawan dari desa/kelurahan dalam penanggulangan bencana?
- Siapa sebaiknya yang dipilih menjadi pengurus kelompok relawan desa/kelurahan?
- Apa tugas pokok kelompok relawan penanggulangan bencana desa/kelurahan?
- Siapa sebaiknya yang direkrut untuk menjadi relawan atau anggota kelompok relawan desa/kelurahan?
- Bagaimana cara meningkatkan kemampuan yang diperlukan kelompok relawan desa/kelurahan?

## 8.2 Tujuan

Membentuk kelompok relawan desa/kelurahan yang terdiri dari warga masyarakat yang peduli pada penanggulangan bencana dan memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan kelompok dalam melaksanakan tugas pokok relawan penanggulangan bencana. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (memperhatikan besarnya wilayah, dan cakupan risiko bencana), anggota perempuan setidaknya berjumlah 30%. Kelompok dan pengurus dibentuk atas hasil keputusan bersama.

## 8.3 Hasil Kegiatan

- Daftar nama relawan desa/kelurahan
- Isian formulir daftar relawan yang kemudian diserahkan kepada BPBD
- Susunan pengurus kelompok relawan penanggulangan bencana
- Melaksanakan hasil pelatihan kelompok relawan penanggulangan bencana sesuai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan
- Rencana kerja kelompok relawan satu periode (minimal 1 tahun)

## 8.4 Sumber Daya Pendukung

- Daftar nama relawan desa/kelurahan
- Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Rencana Aksi Komunitas (RAK)
- Rencana Kontijensi
- Rencana Evakuasi
- Sistem Peringatan Dini
- Hasil kesepakatan

## 8.5 Peserta

Pembentukan kelompok relawan desa/kelurahan melibatkan seluruh perwakilan warga masyarakat, perangkat pemerintah desa/kelurahan, dan calon-calon anggota kelompok yang telah diidentifikasi sebelumnya (misalnya oleh kelompok kerja Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana setempat). Harus ada pelibatan perwakilan lembaga/organisasi di wilayah setempat.

## 8.6 Tempat

Pertemuan pembentukan kelompok relawan penanggulangan bencana dilaksanakan di kantor atau bali desa/kelurahan. Atau di tempat umum atau fasilitas pemerintah yang mudah dijangkau dan dapat menampung seluruh peserta.

## 8.7 Tahapan Kegiatan

### Langkah 1. Persiapan

- Kegiatan awal ini dilakukan dengan identifikasi kelompok relawan desa/kelurahan melibatkan seluruh perwakilan warga masyarakat, perangkat pemerintah desa/kelurahan, dan calon-calon anggota kelompok yang telah diidentifikasi sebelumnya (misalnya oleh kelompok kerja Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana setempat)
- Inisiasi dengan melibatkan Forum PRB Desa/Kelurahan
- Rekrutmen calon relawan secara terbuka dan melibatkan seluruh komponen pemerintah desa/Forum.

### Langkah 2. Pelaksanaan

1. Fasilitator membantu memfasilitasi pengambilan keputusan pembentukan kelompok relawan, menyusun dan menyepakati tugas dan tanggung jawab anggota dan pengurus kelompok relawan, menetapkan anggota pertama dan pengurus kelompok relawan, dan dukungan yang diberikan dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk warga desa/kelurahan.
2. Kelompok Kerja, pemerintah desa/kelurahan, dan anggota pertama - mensahkan berita acara penetapan pengurus.
3. Peserta Desa/Kelurahan dipandu untuk mengembangkan daftar calon anggota relawan-relawan dari warga masyarakat desa/kelurahan. Anggota dan Pengurus terpilih memberikan usulan nama warga yang berpotensi untuk menjadi anggota.
4. Fasilitator mensosialisasikan adanya rencana kegiatan peningkatan kapasitas untuk anggota kelompok relawan dan persyaratan peserta pelatihan relawan PB yang ditetapkan oleh BNPB – yakni relawan yang sehat jasmani dan berusia tidak lebih dari 45 tahun.
5. Fasilitator memandu penyusunan Rencana Tindak Lanjut dari kegiatan musyawarah pembentukan Kelompok Relawan Desa/Kelurahan. Utamanya untuk rencana perekrutan anggota kelompok, menyusun basis data anggota kelompok (biodata, minat/spesifikasi kemampuan, dan informasi relevan lainnya), dan kegiatan awal kelompok lainnya.

### Langkah 3. Pelaporan

1. Kumpulkan seluruh dokumentasi dari proses pembentukan kelompok relawan penanggulangan bencana desa/kelurahan, khususnya kegiatan musyawarah pembentukan. Dokumentasi minimal adalah daftar nama relawan penanggulangan bencana desa/kelurahan (anggota dan pengurus kelompok relawan), basis data anggota kelompok, struktur dan nama pengurus, serta rencana tindak lanjut.
2. Setelah perekrutan anggota dilakukan, mintalah pengurus untuk menetapkan relawan yang didaftarkan untuk mendapat pelatihan relawan yang dilaksanakan BNPB/BPBD melalui kegiatan pengembangan relawan di tingkat kabupaten/kota.
3. Mintalah mereka yang didaftarkan untuk mengisi formulir pelatihan dan isian lain yang diminta, kemudian diserahkan kepada BNPB/BPBD yang bertugas melaksanakan pelatihan

Tabel 8.1: Pemetaan Kebutuhan Kapasitas

Sektor/Tahapan	Kegiatan Sektor/Tindakan	Rincian Kebutuhan Kemampuan (Rencana Kontinjensi dan Respon Tanggap Darurat)

8.2: Daftar Anggota Pertama Kelompok Relawan

No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (PR/LK)	Alamat	Kontak Informasi (Telpon/email jika ada)

Tabel 8.3: Struktur Pengurus Kelompok Relawan

Nama Jabatan	Tanggung Jawab		Keterangan	Nama
	Tugas	Kewenangan		
Ketua				
Wakil Ketua				
Sekretaris				
Bendahara				
Seksi-seksi				

Tabel 8.4: Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan	Indikator	Sumber Daya		Keterangan
		Penanggung Jawab	Waktu	

Tabel 8.5: Basis Data Anggota

No. Anggota	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (PR/LK)	Alamat	Kontak Informasi (Telpon/email jika ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Agama	Suku/ Marga/ Etnis	Tanggal Lahir	Tinggi Badan	Berat Badan	Golongan Darah
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Profesi/Pencapaian	Minat/Kemampuan	Pelatihan Sesuai Minat/Kemampuan	Keterangan
(12)	(13)	(14)	(15)

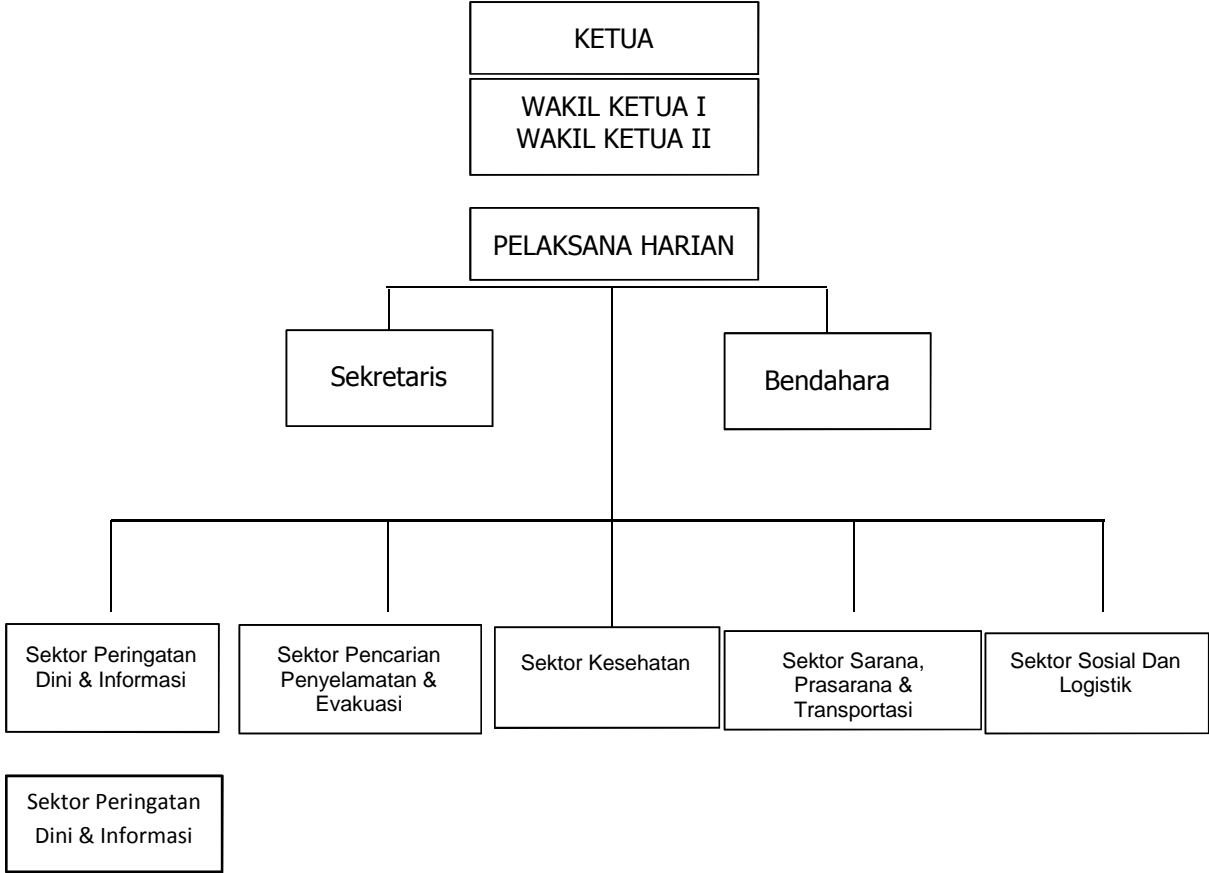
Tabel 8.6: Contoh susunan kelembagaan Satgas Tanggap Darurat.

SUSUNAN ORGANISASI SATGAS TANGGAP DARURAT

DESA : .....

No	Jabatan Organisasi	Nama Lengkap	Keterangan
1	Ketua		KepalaDesa
1	Wakil Ketua I		Babinsa
2	Wakil Ketua II		Babinkamtibmas
3	Pelaksana Harian		Kabag Pemerintahan
4	Sekretaris		Kabag Umum
5	Bendahara		Kabag Pendapatan
6	Regu-regu		
	1. Sektor Peringatan Dini dan Informasi		Koordinator
			Anggota
			Anggota
	2. Sektor Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		Koordinator
			Anggota
			Anggota
	3. Sektor Kesehatan		Koordinator
			Anggota
			Anggota
	4. Sektor Sarana, Prasarana dan Transportasi		Koordinator
			Anggota
			Anggota
	5. Sektor Sosial dan Logistik		Koordinator
			Anggota
			Anggota
	6. Sektor Keamanan		Koordinator
			Anggota
			Anggota

Gambar 8.1: Contoh Bagan Kelembagaan Satgas Tanggap Darurat



Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



### 9.1 Pengantar

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen perencanaan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. RPB adalah sebuah rencana prioritas bagi usaha masyarakat desa untuk melindungi warganya dari ancaman dan risiko bencana. RPB inilah yang diturunkan dalam RAK atau sering disebut Rencana Aksi Masyarakat (RAM) yang memuat Rencana Aksi atau dukungan yang dilakukan oleh berbagai pihak di semua tahapan atau siklus PB (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana). Sebagaimana dokumen perencanaan desa, maka RPB maupun RAK dibuat secara partisipatif dalam musyawarah desa yang diinisiasi dan dipimpin oleh Badan BPD. Dokumen inilah yang nantinya akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJM Desa maupun RKP Desa.

#### **PENTING!**

Saat penyusunan RAK, perlu memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pasal 8:

- a. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Permasalahan yang sering dihadapi, RPB-RAK yang sudah disusun tidak terfasilitasi oleh desa karena kedua dokumen tersebut tidak masuk dalam dokumen RPJM Desa maupun RKP Desa. Padahal RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan pembangunan desa. Masa berlaku dokumen ini 6 tahun dan akan diperbaharui kembali. RPJM Desa disusun masa pemerintahan awal kepala desa, atau ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pelantikan Kepala Desa. Dokumen akan ditinjau ulang untuk diperbaiki kembali setelah masa berlakunya, 6 tahun, selesai. RPJM Desa ini yang menjadi acuan kegiatan pembangunan desa dan pengalokasian Anggaran

Pembangunan Belanja (APB) Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga setiap kegiatan yang akan dibiayai dari dua sumber tersebut harus masuk dalam RPJM Desa.

Penyebab permasalahan tersebut diatas adalah, (a) Saat dokumen RPB disusun, desa sudah selesai menyusun RPJM Desa. (b) Program Destana tidak dapat mengintegrasikan RAK ke dalam RKP Desa karena RKP Desa sudah selesai disusun. Sehingga dalam kondisi tersebut tidak mudah merubah RPJM Desa maupun RKP desa, karena sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal (a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/kerusakan sosial yang berkepanjangan, atau (b) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Namun demikian bukan berarti tidak ada peluang untuk melakukan perubahan RPJM Desa. Bukan berarti peluang untuk melakukan perubahan RPJM desa atau mengintegrasikan dokumen tersebut tidak ada. Kuncinya adalah dimasyarakat, apabila masyarakat menghendaki perubahan dengan alasan yang sangat rasional maka integrasi RPB dalam RPJM Desa dan integrasi RAK dalam RKP Desa akan bisa dilakukan. Untuk itu fasilitator Destana penting untuk mencari strategi yang tepat untuk mengintegrasikan RPB RAK dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Apakah Desa sudah memiliki RPB dan RAK?
- Apabila belum, apakah desa memiliki rencana program Pengurangan Risiko Bencana (PRB)?
- Apabila sudah, apakah sudah diintegrasikan dalam RPJM Desa dan RKP Desa
- Mengapa RPB harus diintegrasikan kedalam RPJM Desa?
- Apa kelemahan dan kekuatan ketika RPB dan RAK diintegrasikan ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa?
- Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal proses pengintegrasian RPB dan RAK ke dalam dokumen perencanaan desa?

## 9.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada Kelompok Kerja Desa/Kelurahan mengenai penggunaan dokumen RPB dan RAK sebagai rujukan dan mengintegrasikannya ke dalam penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan.
2. Memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan sesuai Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah 21 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta memastikan pengintegrasian upaya pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan Desa.

### **9.3 Hasil yang diharapkan**

1. Kesepakatan oleh Kelompok Kerja Desa/Kelurahan tentang tindakan untuk mewujudkan pengintegrasian dokumen RPB dan RAK ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan.
2. Kegiatan PRB menjadi bagian dari RPJM Desa dan RKP Desa/kelurahan dan dianggarkan dalam APBDes.
3. Tersusunnya dokumen RPJM Desa dengan proses yang sesuai dengan kepmendagri dengan adanya pengintegrasian PRB dalam perencanaan pembangunan.

### **9.4 Sumber Daya Pendukung**

- UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
- PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- RPB Desa dan Kabupaten dan RAK
- RPJM Desa dan RAP Desa serta APB Desa.

### **9.5 Peserta**

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, Forum PRB Desa, dan Perwakilan Kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan temuan identifikasi pada desa/kelurahan. Peserta ini dikumpulkan dalam suatu musyawarah Desa (pasal 54 UU Desa)

### **9.6 Tempat**

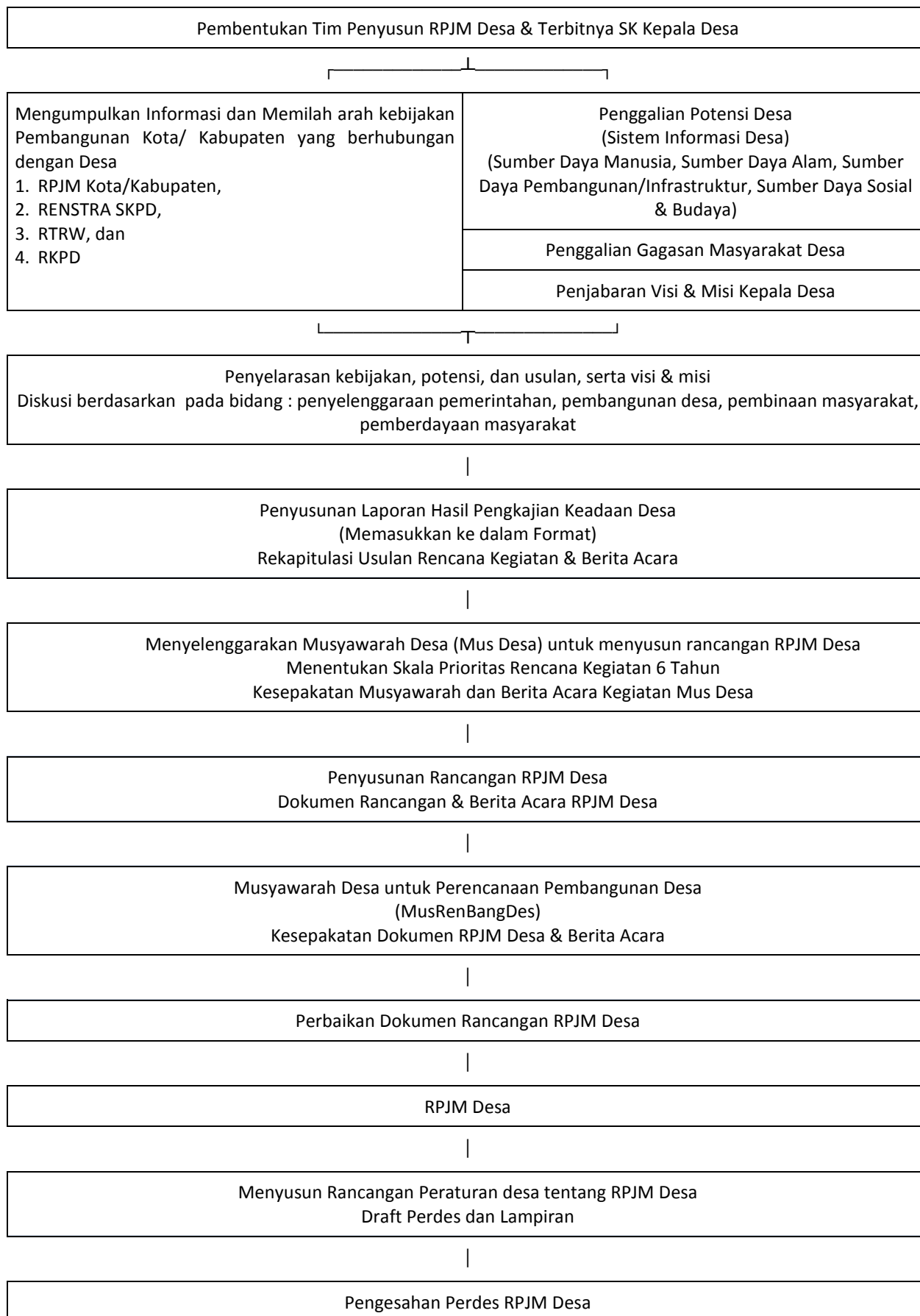
Ruang pertemuan warga (balai desa) atau menyesuaikan pada kelompok-kelompok dan/atau kegiatan-kegiatan masyarakat desa/kelurahan.

### **9.7 Langkah-Langkah Integrasi**

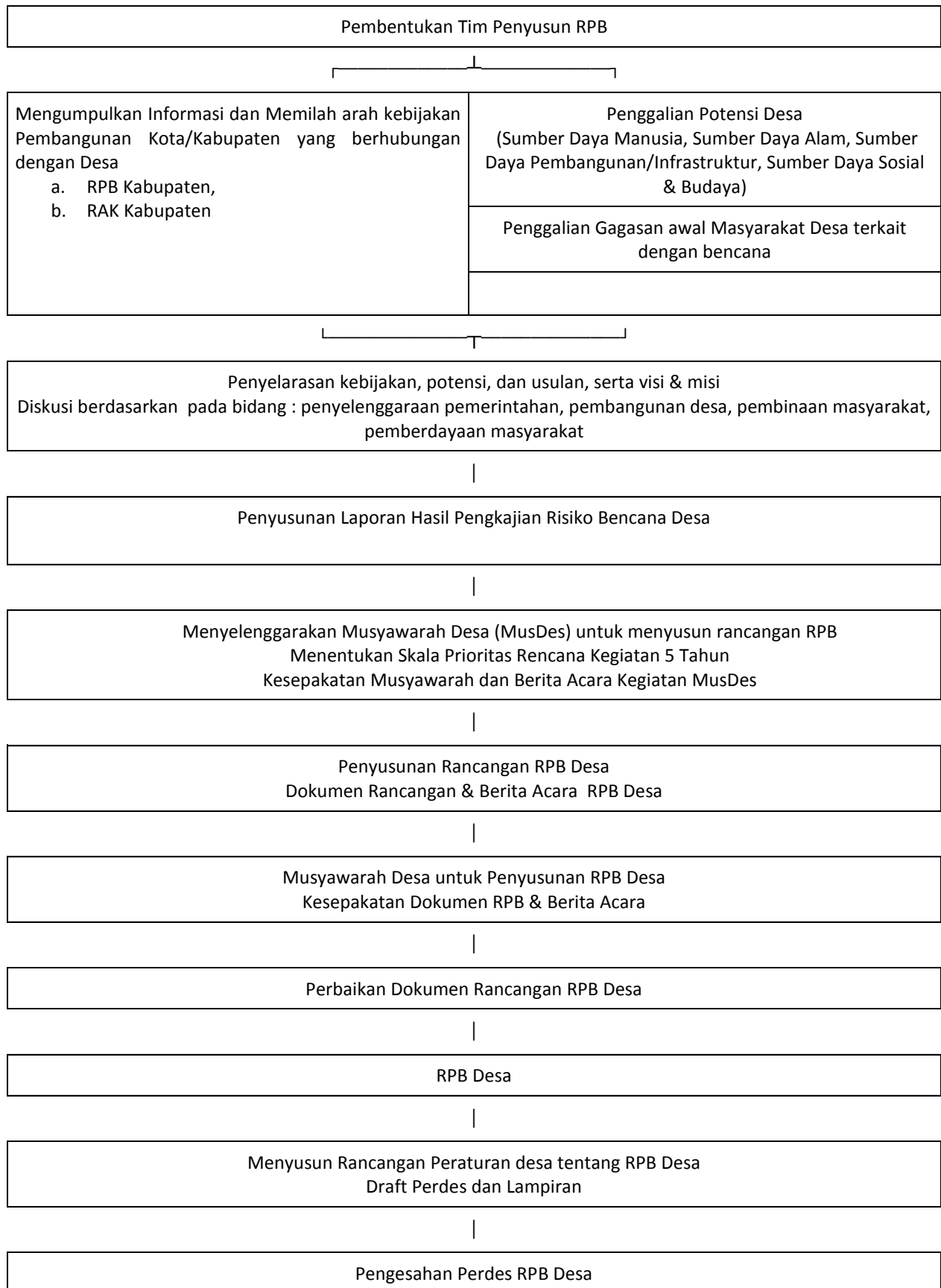
#### **9.7.1 Identifikasi Strategi integrasi RPB-RAK ke RPJM Desa RKP Desa.**

Dalam menyusun strategi mengintegrasikan RPB dan RAK dalam RPJM Desa dan RKP Desa fasilitator harus memahami alur proses penyusunan RPJM Desa sesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014. Dengan memahami alur maka fasilitator akan mengetahui peluang dan menentukan strategi yang efektif untuk melakukan integrasi RPB kedalam RPJM Desa.

Berdasarkan Permendagri No.114 tahun 2014 alur proses penyusunan RPJM Desa sebagai berikut:



Gambar 9.1: Alur penyusunan RPJM Desa



Gambar 9.2: Alur penyusunan RPB Desa

Berdasarkan alur proses penyusunan dokumen RPJMDes dan RPB di atas, ternyata tahapan proses penyusunan dokumen tidak jauh berbeda. Setelah disandingkan hasilnya seperti di bawah ini:

Tabel 9.1: Perbandingan penyusunan RPJM Desa dan RPB Desa

RPJM DESA					RPB	
TAHAPAN	PELAKSANA	KEGIATAN	KEBUTUHAN	HASIL	TAHAPAN	
PERSIAPAN	Kepala Desa	Pembentukan Tim RPJM Desa	Beranggotakan sejumlah 7/9/11 orang (termasuk perempuan)	TIM RPJM Desa & Terbitnya SK Kepala Desa	Pembentukan Tim RPB	Memastikan tim renaksi merupakan anggota dari tim RPJM Desa
PENGKAJIAN KEADAAN DESA	TIM RPJM Desa	Mengumpulkan Informasi dan Memilah arah kebijakan Pembangunan Kota/ Kabupaten yang berhubungan dengan desa	Dokumen : a) RPJM Kota/Kabupaten, b) Renstra SKPD, c) RTRW,& d) RKPD	Matrix tentang Rencana Program yang akan Masuk Desa	Pengkajian Risiko Perubahan Iklim	Mereview untuk memastikan dokumen Profil Desa sudah memuat informasi risiko bencana
	TIM RPJM Desa	Penggalian Potensi Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID)	a) Data Informasi Desa (potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Pembangunan, Sumber Daya Sosial Budaya), b) Dokumen Rencana Kegiatan di desa	Dokumen Potensi dan Peluang Penggunaan Sumber Daya Desa,		Melengkapi dokumen dengan analisis risiko bencana
	TIM RPJM Desa & Masyarakat Desa	Penggalian Gagasan (pagas) Masyarakat Desa	a) Potensi dan Peluang Penggunaan Sumber Daya Desa, b) Aspirasi Masyarakat (Diskusi Kelompok/Dusun), c) Sketsa Desa, d) Kalender Musim, e) Bagan Kelembagaan Desa	Usulan Kegiatan		Memastikan dokumen memuat usulan kegiatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak risiko bencana

RPJM DESA					RPB	
TAHAPAN	PELAKSANA	KEGIATAN	KEBUTUHAN	HASIL	TAHAPAN	
	TIM RPJMDes	Visi & Misi Kepala Desa	Dokumen Visi & Misi Kepala Desa	Penjabaran Visi & Misi Kades		Memastikan Visi dan Misi berperspektif pada risiko bencana
	TIM RPJMDes/RKP	Penyelarasan kebijakan, potensi, dan usulan, serta visi & misi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan Kegiatan</li> <li>b. Dokumen Potensi dan Peluang Penggunaan Sumber Daya Desa,</li> <li>c. Matrix tentang Rencana Program yang akan Masuk Desa</li> <li>d. Penjabaran Visi &amp; Misi Kades</li> </ul>	Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa	RPB/Renaksi	Memastikan dokumen RPJMDes memasukan rencana adaptasi dan mitigasi
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDES	TIM RPJMDes	Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Memasukkan ke dalam Format)	Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa	Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan & Berita Acara		
	BPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MusDes) untuk menyusun rancangan RPJMDes</li> <li>b. Menentukan Skala Prioritas Rencana Kegiatan 6 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekapitulasi &amp; Berita Acara Usulan Rencana Kegiatan (Beserta Lampiran)</li> <li>b. Visi &amp; Misi Kepala Desa</li> <li>c. Anggaran Dana Desa</li> <li>d. Proiritas Rencana Kegiatan 6 Tahun</li> <li>e. Rencana kegiatan Desa termasuk Kerjasama Antar Desa atau Pihak Ketiga</li> </ul>	Kesepakatan Musyawarah dan Berita Acara Kegiatan MusDes		
	TIM RPJMDes	Penyusunan Rancangan RPJMDES	Kesepakatan Musyawarah dan Berita Acara Kegiatan MusDes	Dokumen Rancangan & Berita Acara	Penyusunan Rancangan RPBDES	Dokumen Rancangan & Berita Acara RPBDes

RPJM DESA					RPB	
TAHAPAN	PELAKSANA	KEGIATAN	KEBUTUHAN	HASIL	TAHAPAN	
				RPJMDes		
LEGALISASI RPJMDES	PEMDES & BPD	Musyawarah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa (MusRemBangDes)	Dokumen Rancangan & Berita Acara RPJMDes	Kesepakatan Dokumen RPJMDes & Berita Acara	Musyawarah Desa untuk Perencanaan Pembangunan Desa	Kesepakatan Dokumen RPBDes & Berita Acara
	TIM RPJMDes & KEPALA DESA	Perbaikan Dokumen Rancangan RPJMDes	Kesepakatan Dokumen RPJMDes & Berita Acara	RPJMDES	Perbaikan Dokumen Rancangan RPBDes	RPBDES
	KEPALA DESA & BPD	Menyusun Rancangan Perdes tentang RPJM Desa	RPJM Desa	Draft Perdes dan Lampiran	Menyusun Rancangan Perdes tentang RPBDes	Draft Perdes dan Lampiran
	KEPALA DESA & BPD	Pengesahan Perdes RPJM Desa	Draft Perdes dan Lampiran	Perdes tentang RPJM Desa	Pengesahan Perdes RPB Desa	Perdes tentang RPB Desa

Berdasarkan hasil persandingan tersebut di atas, teridentifikasi 3 strategi dalam mengintegrasikan RPB dalam RPJM Desa:

- Mengkaji profil desa untuk mengarusutamakan hasil risiko bencana ke dalam profil desa.
- Strategi mengintegrasikan RPB dan RAK pada RKP Desa setiap tahun pada desa yang sudah memiliki RPJM Desa
- Apabila desa dalam proses penyusunan RPJM Desa, strateginya mengarus-utamakan RPB dan RAK dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

### 9.7.2 Pelaksanaan Integrasi RPB dan RAK ke RPJM Desa dan RKP Desa

Pelaksanaan integrasi RPB/RAK dilakukan berdasarkan :

- Apakah profil sudah berpersepektif risiko ?
- Apakah desa sudah memiliki RPJMDes ?
- Apakah RPJMDes sudah berperspektif risiko bencana ?

Setelah fasilitator melihat kondisi di atas, maka dapat memilih strategi berdasarkan kebutuhan.



## 1. Pengintegrasian Hasil Pengkajian Risiko ke dalam Profil Desa.

Dokumen yang menjadi rujukan penyusunan RPJM Desa adalah profil desa. Profil desa merupakan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa. Data dalam dokumen ini berupa gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumber dana, kelembagaan sarana – prasarana fisik dan social, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. Komponen tersebut merupakan komponen SLA (*Sustainable Livelihood Analysis*) yang digunakan analisis dalam kajian risiko desa.

Maka sangat penting untuk melihat apakah aspek risiko bencana sudah masuk dalam profil desa, apabila Dokumen kajian keadaan desa tidak memasukan aspek risiko bencana dalam pengalihan data dan analisisnya. Maka tim FPRB penting memanfaatkan peluang ini untuk mengintegrasikan kajian risiko ke dalam profil desa. Peluang yang sangat mungkin dilakukan merujuk pada pasal 12 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, tentang pengkajian desa yaitu pada kegiatan penyalarsan, penggalan gagasan masyarakat, dan penyusunan lapoaran hasil pengkajian keadaan desa. Apabila data kajian risiko berhasil diintegrasikan dalam dokumen profil desa, maka profil desa akan berperspektf risiko bencana. Karena dokumen ini menjadi acuan penyusunan RPJM Desa, sehingga RPJM Desa akan berperspektif risiko. Sehingga perencanaan RPB akan masuk dalam perencanaan RPJM Desa. Langkah-langkah pengintegrasian hasil pengkajian risiko dalam profil desa:

### a. Review Profil Desa dan Kajian Risiko

- **Sesi Pengantar Diskusi.** Fasilitator mengawali pertemuan ini dengan mengenalkan secara singkat profil desa, meliputi pengertian, proses penyusunan dan fungsi profil desa dalam penyusunan RPJM Desa sesuai UU Desa.
- **Sesi Diskusi Review.** Fasilitator dapat membagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membahas dokumen profil desa disandingkan dengan Kajian risiko desa. Hal-hal yang perlu direview mulai dari tim kajian (siapa dan komposisi), tahapan kajian, dan apa kelebihan dan kelemahan masing-masing kajian.
- **Sesi Diskusi integrasi.** Fasilitator menyampaikan catatan-catatan dari hasil diskusi review terkait kelebihan dan kelemaham kedua dokumen tersebut dan menyampaikan pertanyaan pentingnya mengintegrasikan dua dokumen. Kedua dokumen tersebut dapat diintegrasikan, saling melengkapi, sehingga akan menjadi dokumen yang berperspektif risiko bencana.
- **Sesi Penutup.** Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Di akhir sesi fasilitator meminta peserta untuk mensepakati hasil diskusi untuk disempurnakan oleh Tim Forum PRB Desa.

### b. Penyusunan Dokumen Profil Desa Berperspektif Risiko Bencana

Fasilitator memfasilitasi proses penyusunan dokumen profil desa berperspektif risiko, dengan format sesuai yang digunakan tim kajian desa. Proses ini melibatkan pendamping desa, yang akan berperan memfasilitasi Tim Desa dan Forum PRB pada proses selanjutnya,

yaitu mempresentasikan hasil kajian ke Pemerintah Desa (Kepala Desa) untuk mendapatkan pengesahan perubahan profil desa.

## 2. Pengintegrasian RAK pada RKP Desa.

Bagi desa yang sudah memiliki RPJM Desa peluang untuk mengintegrasikan RAK pada RKP Desa. Dengan memanfaatkan momentum penyusunan RKP Desa yang dilakukan setiap tahun. Sedangkan untuk Kelurahan di kabupaten/kota, maka peluang integrasikan RAK bisa dilakukan dalam musyawarah ditingkat kelurahan untuk menyepakati kegiatan yang diusulkan dalam penyusunan RKP Desa yang dilakukan setiap tahun. Langkah-langkah strategi pengintegrasian RAK pada RKP Desa:

### a. Pembentukan Tim Kerja

- **Sesi Pengantar Diskusi.** Fasilitator mengenalkan secara singkat tujuan pembentukan tim kerja untuk review RPJM Desa, alur proses pembentukan, dan gambaran pihak-pihak yang penting untuk terlibat dalam proses review. Pembentukan tim kerja untuk memastikan proses review berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
- **Sesi Diskusi Pembentukan Tim.** Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan berbagai hal tentang tim review, terkait dengan ruang lingkup, fungsi, dan perannya. Serta siapa saja yang penting untuk menjadi tim review. Dalam proses diskusi fasilitator memastikan bahwa minimal anggota tim review terdiri dari Tim Penyusun RPJM Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan masyarakat, dan tim FPRB Desa.
- **Sesi Diskusi Penyusunan Strategi Review.** Setelah Tim Review terbentuk, fasilitator membagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang strategi dan alur pelaksanaan review serta kebutuhan daya dukung proses review. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan diakhir diskusi terumuskan peserta memahami alur strategi dan alur proses review yang akan dilakukan, serta daya dukung review.
- **Sesi Penutup.** Di akhir sesi fasilitator mereview proses dan membacakan ulang kesepakatan diskusi dan memastikan beberapa penting yaitu: (a) Tim Review terdiri dari Tim Penyusun RPJM Desa, Pemerintah Desa, BPD, Perwakilan masyarakat, dan tim FPRB Desa; (b) Media review terdiri dari RPJM Desa, APB Desa, RKP Desa, dan Profil Desa. Apabila sudah ada disertakan pula dokumen kajian risiko berupa RPB desa, dan RAK Desa.

### b. Review RPJM Desa

Pertemuan Forum PRB Desa bersama BPD dan pemerintah Desa serta kelompok kelompok lain di desa untuk mereview RPJM Desa, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Sesi Pengantar.** Fasilitator dapat mengawali pertemuan ini dengan mengenalkan secara singkat proses perencanaan pembangunan serta kewenangan desa yang termuat dalam UU Desa dan kebijakan pemerintah lainnya yang terkait, termasuk kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Desa/Kelurahan melanjutkan bahasan tentang rencana pembangunan desa untuk masa berjalan dan/atau tahun berikutnya.

- **Sesi Diskusi Review RPJM Desa.** Review dilakukan dengan membahas profil wilayah, masalah/isu desa, kebijakan pembangunan, dan program-program strategis desa. Dalam review ini fasilitator dapat membagikan RPJM desa, RPB dan/atau RAK yang akan dibahas dalam kelompok. Masing-masing kelompok membahas dokumen RPJM yang disejajarkan dengan RPB Desa. Masing-masing kelompok memberikan catatan dari hasil review RPJM dalam matrik diskusi. (Tabel 9.2).
- **Sesi Penutup.** Sesi ini masing-masing kelompok menjabarkan temuan-temuan dan strategi tindak lanjut.

Tabel 9.2 Matrik Review RPJM Desa dan RPB/RAK

Deskripsi Bahasan	Isi RPJM	Program RPB dalam RKP	Tindak lanjut dan strategi dalam integrasi
Profil Desa			
Masalah Desa			
Kebijakan Desa			
Program Desa			

Strategi tindak lanjut dalam diskusi di antaranya:

- Membentuk tim kerja yang akan akan terlibat dalam proses integrasi RPB dalam RPJM Desa, tim kerja ini bisa diwakili oleh Forum PRB desa, BPD dan tim Penyusun RPJM Desa.
- Memasukkan program dan rencana aksi PRB dalam RKP Desa melalui Musyarawah Rencana Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) dan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) yang dilakukan setiap tahun
- Tim Kerja memantau proses perencanaan di desa/kelurahan untuk memastikan bahwa RPB dan RAK sudah diakomodasi dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

### c. Integrasi RAK ke dalam RKP Desa

Proses integrasi PRB pada strategi penyusunan RPJM Desa atau bila harus merevisi RPJM melalui penyusunan RPJM Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, hingga saat ini panduan operasional penyusunan RPJM Desa tertuang dalam Permendagri

No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kegiatan ini dilakukan setelah usulan program PRB dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdus.

Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, proses perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang, penggalian informasi. Perubahan RPJM Desa hanya mungkin untuk dilakukan apabila terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau dan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian apabila tidak memenuhi persyaratan kedua hal diatas maka perubahan RPJM Desa hanya bisa dilakukan setelah RPJM Desa selesai masa berlakunya. Maka apabila penyusunan RPB bertepatan dengan penyusunan RPJM Desa maka proses integrasi tersebut akan bisa dilakukan. Tetapi apabila RPJM Desa sudah disusun dan disahkan maka integrasi RPB ke dalam RPJM Desa baru bisa dilakukan pada penyusunan RPJM Desa yang baru. Kondisi ini akan berbahaya apabila kegiatan adaptasi dan mitigasi yang direkomendasikan dalam RPB tidak masuk dalam RPJM Desa, terutama untuk desa-desa dengan tingkat risiko bencana tinggi. Maka peluangnya adalah mengintegrasikan RAK ke dalam RKP Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, pasal 29 tentang Penyusunan RKP Desa, yaitu Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Namun yang perlu untuk diperhatikan RKP Desa mulai disusun pemerintah desa bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa ini akan menjadi dasar penetapan APB Desa. Maka peluang integrasi akan bisa dilakukan dengan mengintegrasikan RAK kedalam RKP Desa.

Pada tahapan penyusunan RKP Desa, profil desa yang berperspektif risiko bencana yang sudah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Langkah-langkah integrasi RAK dalam RKP Desa sebagai berikut:

**a. Review RAK dan RKP**

- **Sesi Pengantar.** Fasilitator memulai dengan menjelaskan proses penyusunan RKP Desa secara singkat. Selanjutnya tim penyusunan RKP Desa lokasi Destana diminta untuk menjelaskan proses penyusunan RKP lebih detail dan perencanaannya.
- **Sesi Diskusi review RAK dan RKP.** Review dengan membagi dalam dua kelompok. Fasilitator membagikan kedua dokumen tersebut untuk dicermati kelebihan dan kelemahannya, serta mencari peluang-peluang RAK bisa terintegrasi dalam RKP dan strategi mengintegrasikan.
- **Sesi Diskusi integrasi.** Fasilitator menyampaikan catatan-catatan dari hasil diskusi review, terkait kelebihan dan kelemahan kedua dokumen tersebut, serta pertanyaan pentingnya mengintegrasikan. Kedua dokumen tersebut bisa saling melengkapi sehingga menjadi dokumen berperspektif risiko bencana. Fasilitator mengajak peserta untuk mengintegrasikan kedua dokumen tersebut menjadi satu dokumen berperspektif risiko bencana. Setelah diskusi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi.

- **Sesi Penutup.** Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati hasil diskusi untuk disempurnakan tim desa menjadi dokumen yang berperspektif risiko.

#### **b. Penyusunan Dokumen RKP Desa Berperspektif Risiko Bencana**

- **Sesi Penyusunan Dokumen.** Fasilitator memfasilitasi proses penyusunan dokumen RKP Desa sesuai dengan format pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan memasukkan kegiatan pengelolaan risiko bencana. Proses ini melibatkan tim penyusunan RKP, tim Forum PRB desa, Pemerintah desa, dan fasilitator pendamping desa, karena pendamping desa inilah yang akan berperan memfasilitasi tim desa pada proses selanjutnya.
- **Sesi Pemaparan Hasil.** Pendamping desa dan tim kajian desa bersama dengan tim kajian risiko bencana mempresentasikan hasil kajian ke Pemerintah Desa (Kepala Desa) untuk mendapatkan pengesahan dokumen RKP tahun berjalan.
- **Sesi Penutup.** Fasilitator mereview ulang hasil diskusi tersebut dan memfasilitasi penyusunan perencanaan advokasi dan sosialisasi keberbagai terhadap dokumen yang sudah disusun.

### **3. Pengarusutamaan PRB Pada RPJM Desa.**

Proses ini dapat dilakukan pada desa yang belum memiliki RPJM Desa, sehingga terlibat dalam seluruh proses Penyusunan RPJM Desa berperspektif risiko bencana. Proses perencanaan pembangunan ini merupakan wadah sinkronisasi 4 pendekatan perencanaan pembangunan desa, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan merupakan manifestasi dari arah pembangunan pemimpin desa (*politik*) yang dipadukan dengan program berbasis kebutuhan masyarakat (*partisipatif*) disusun dan dipadukan dengan program perangkat desa dan lembaga desa (*teknokratik*) dengan mempertimbangkan kebijakan serta arah pembangunan pemerintah kabupaten (*top-down*). Perencanaan yang baik dengan pelibatan bermakna seluruh lapisan masyarakat menjadi prasyarat keberhasilan program, dengan kata lain ketika gagal merencanakan berarti merencanakan sebuah kegagalan.

Proses integrasi RPB dalam RPJM Desa dilakukan sejak awal proses penyusunan RPJMDes berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 alur proses penyusunan RPJM desa. Tahapan-tahapan Penyusunan RPJM Desa berprespektif PRB sebagai berikut:

#### **(a) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

Berdasarkan pasal 8 Permendagri 114 tahun 2014 tim penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kepala Desa, yang terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekertaris Desa selaku ketua, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim penyusunan RPJM Desa berjumlah minimal 7 maksimal 11 orang. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan.

Kepala desa menetapkan tim penyusun dengan mengeluarkan SK Kepala Desa. Dengan tugas: (a) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, (b) Pengkajian keadaan desa, (c) Penyusunan rancangan RPJM Desa, dan (d) Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa. Dengan melihat kewenangan tim desa tersebut di atas, maka kewenangan tim desa sangat strategis untuk mengintegrasikan RPB/RAK dalam RPJM Desa. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Sesi Pengantar.** Fasilitator menjelaskan proses pembentukan, komposisi, dan kewenangan tim penyusun RPJM Desa.
- **Sesi Diskusi Pembentukan Tim.** Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok diskusi untuk mensimulasikan strategi memasukan tim penyusun RPJM Desa dalam penyusunan RPB, Serta mendorong tim penyusun RPB dalam tim penyusunan RPJM Desa.
- **Sesi Penutup.** Fasilitator mereview ulang hasil diskusi tersebut dan memfasilitasi pembentukan tim RPJM Desa.

**(b) Review Profil Desa dan Pengkajian Risiko**

- **Sesi Pengantar Diskusi.** Fasilitator mengawali pertemuan ini dengan mengenalkan secara singkat profil desa, meliputi pengertian, proses penyusunan dan fungsi profil desa dalam penyusunan RPJM Desa sesuai UU Desa.
- **Sesi Diskusi Review.** Fasilitator dapat membagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membahas dokumen profil desa disandingkan dengan Kajian risiko desa. Hal-hal yang perlu direview mulai dari tim kajian (siapa dan komposisi), tahapan kajian, dan apa kelebihan dan kelemahan masing-masing kajian.
- **Sesi Diskusi integrasi.** Fasilitator menyampaikan catatan-catatan dari hasil diskusi review terkait kelebihan dan kelemahan kedua dokumen tersebut dan menyampaikan pertanyaan pentingnya mengintegrasikan dua dokumen. Kedua dokumen tersebut dapat diintegrasikan, saling melengkapi, sehingga akan menjadi dokumen yang berperspektif risiko bencana.
- **Sesi Penutup.** Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Di akhir sesi fasilitator meminta peserta untuk mensepakati hasil diskusi untuk disempurnakan oleh tim FPRB desa.

**(c) Penyusunan Profil Desa Berperspektir Pengurangan Risiko Bencana**

- **Sesi Penyusunan Dokumen.** Fasilitator memfasilitasi proses penyusunan dokumen Profil Desa sesuai dengan format pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan memasukkan kegiatan pengelolaan risiko bencana. Proses ini melibatkan tim penyusunan RPJM Desa, tim FPRB desa, Pemerintah desa, dan fasilitator pendamping desa, karena pendamping desa inilah yang akan berperan memfasilitasi tim desa pada proses selanjutnya.
- **Sesi Pemaparan Hasil.** Pendamping desa dan tim kajian desa bersama dengan tim kajian risiko bencana mempresentasikan hasil kajian ke Pemerintah Desa (Kepala Desa) untuk mendapatkan pengesahan perubahan profil desa.

- **Sesi Penutup.** Fasilitator mereview ulang hasil diskusi tersebut dan memfasilitasi penyusunan perencanaan advokasi dan sosialisasi keberbagai terhadap dokumen yang sudah disusun.

**(d) Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kabupaten**

Penyelarasan arah kebijakan desa dengan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Beberapa dokumen yang diselarakan adalah RPJMD kabupaten/kota, Rencana strategis Satuan kerja perangkat daerah, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTR), Rencana Detil Tata Ruang Wilayah (RDTR), Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP). Ini menjadi peluang untuk menyelaraskan dokumen RPB/RAK dan RPJMDes yang berperspektif risiko terakomodir dalam RPJMD. Penyelarasan dilakukan dengan langkah-langkah:

- **Sesi Pengantar.** Fasilitator mengawali pertemuan ini dengan mengenalkan secara singkat kegiatan-kegiatan penyelarasan, kebijakan dan dokumen-dokumen untuk bahan penyelarasan.
- **Sesi Diskusi Penyelarasan Kebijakan.** Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok, mengidentifikasi dokumen-dokumen penyelarasan, dan meminta mensimulasikan penyelarasan dokumen tingkat kabupaten dengan desa.
- **Sesi Penutup.** Fasilitator mereview ulang hasil diskusi tersebut, dan menegaskan proses-proses penyelarasan kebijakan kabupaten dan desa.

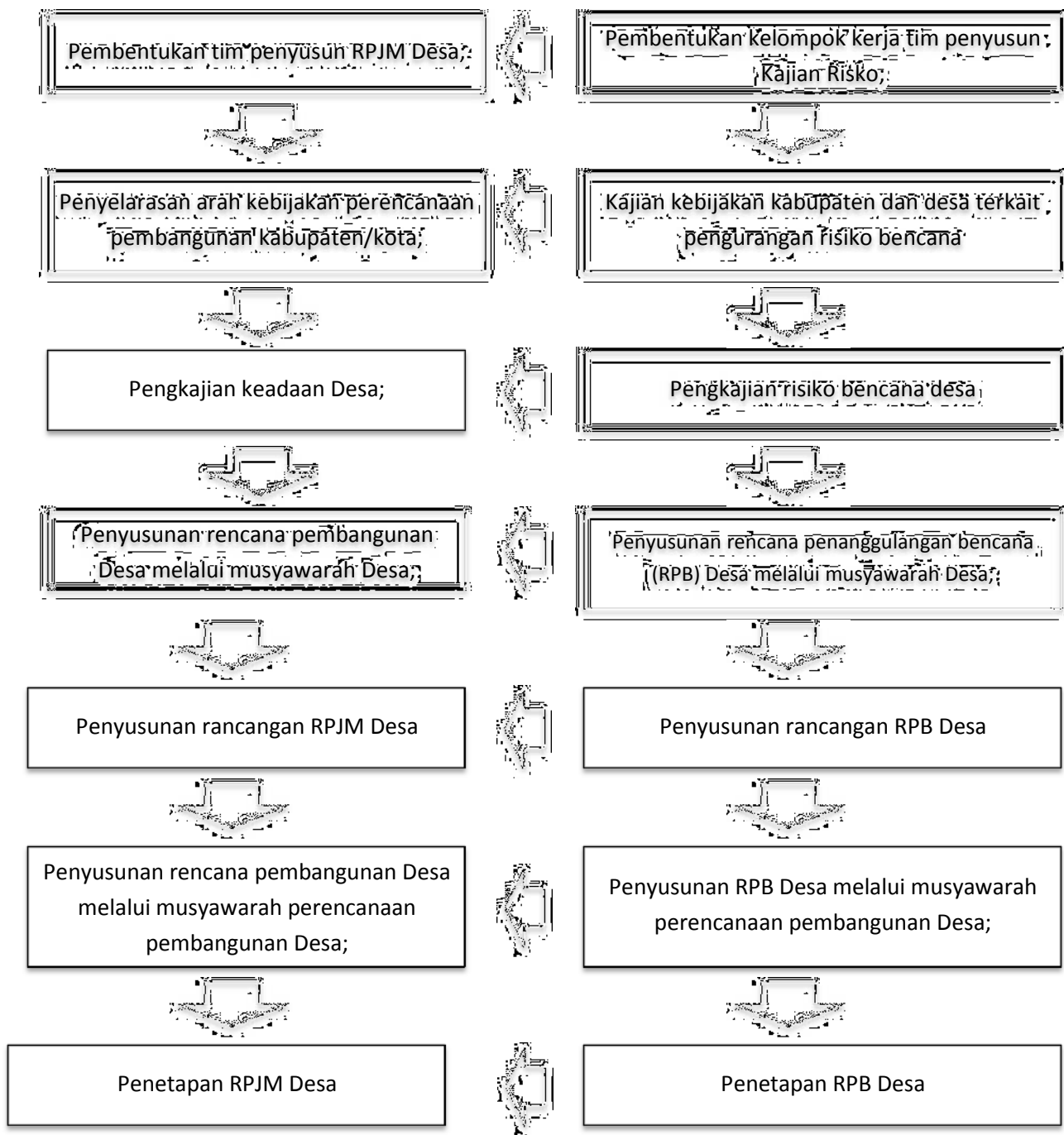
**(e) Penyusunan RPJM Desa**

RPJM Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi berbagai pihak yang akan melakukan kegiatan yang akan dilakukan desa. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang strategis untuk menggunakan dokumen RPB menjadi salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RPJM Desa. Langkah-langkah penyusunan sebagai berikut :

- **Sesi Pengantar.** Fasilitator mengawali pertemuan ini dengan menjelaskan tahanan proses penyusunan RPJM Desa secara singkat. Selanjutnya tim penyusunan RPJM Desa lokasi Destana diminta untuk menjelaskan proses penyusunan RPJM Desa lebih detail dan perencanaannya.
- **Sesi Simulasi Penyusunan Skala Prioritas.** Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk membuat skala prioritas dengan menggunakan profil desa yang berperspektif risiko yang sudah disusun untuk didiskusikan dengan tim penyusun desa. Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan prioritas masalah, kegiatan dan kebutuhan sumberdaya.
- **Sesi Simulasi Penyusunan RPJM Desa.** Dokumen disusun berdasarkan format RPJM Desa yang baku. Fasilitator membagikan format RPJM Desa ketiga kelompok untuk dicermati dan dipahami oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk memasukan penyusunan skala prioritas dalam RPJM Desa.

- **Sesi Penutup.** Diakhir sesi fasilitator mereview ulang hasil diskusi tersebut, dan menegaskan proses-proses penyusunan RPJMDes.





Gambar 9.2: Alur pengintegrasian PRB dalam penyusunan RPJM Desa

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 10.1 Pengantar

Tidak ada masyarakat yang dapat benar-benar bebas dari bahaya alamiah maupun bahaya akibat perilaku manusia. Mungkin lebih tepat untuk mengasumsikan ketahanan bencana atau masyarakat tahan bencana sebagai ‘masyarakat teraman yang paling mungkin kita desain dan bangun dalam konteks bahaya alamiah’, dengan meminimalisasi kerentanannya melalui maksimalisasi langkah-langkah PRB. PRB merupakan kumpulan aksi, atau proses, yang dijalankan untuk mencapai ketahanan (Twigg, 2009).

Desa/kelurahan merupakan urat sosial, budaya dan teknologi yang memainkan peran ekonomi, sosial, budaya dan politik. Setiap gangguan pada fungsi desa, seperti bencana, dapat berakibat mulai dari hilangnya nyawa hingga kerugian ekonomi, mulai dari dampak yang ditimbulkan secara serta-merta hingga dampak jangka panjang.

Ancaman, keterpaparan dan kerentanan menentukan seberapa aman suatu desa/kelurahan. Untuk menciptakan desa/kelurahan teraman, semua pihak perlu meningkatkan kesadaran penanggulangan bencana dan terlibat dalam pengurangan risiko bencana.

### 10.2 Tujuan

Membangun kesadaran seluruh para pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.

### 10.3 Sumberdaya Pendukung

#### 1. Sumberdaya:

- Fasilitator/pemandu
- Kelompok Kerja
- Notulis

#### 2. Materi

- Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah atau peraturan desa/kelurahan yang mengesahkan dokumen-dokumen PB/PRB.
- Profil Risiko Desa/Kelurahan
- Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa (termasuk Sistem Peringatan Dini, Rencana Evakuasi, Rencana Kontijensi dan RAK)
- Struktur Organisasi Forum PB/PRB dan Tim relawan Desa/Kelurahan.

#### 3. Alat bantu

- Kertas plano/*flip chart*, spidol warna, lakban, data desa/kelurahan.
- Peta Risiko Desa, Jalur Evakuasi, Bagan Sistem Peringatan Dini.
- Bagan Struktur Organisasi Forum PRB dan Tim Relawan Desa/Kelurahan.

#### **10.4 Hasil Yang Diharapkan:**

- Tersusunnya Rencana Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Tersusunnya Agenda/Materi Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Tersusunnya Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

#### **10.5 Peserta**

Partisipan kegiatan Sosialisasi dan diseminasi adalah perwakilan kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok rentan yang ada di desa/kelurahan maupun anggota masyarakat lainnya yang disesuaikan dengan hasil kajian risiko desa/kelurahan. Selain itu, partisipan dapat pula diidentifikasi berdasarkan materi sosialisasi dan diseminasi yang akan dihantarkan.

#### **10.6 Tempat**

Lokasi Sosialisasi menyesuaikan pada kelompok-kelompok dan/atau kegiatan-kegiatan masyarakat desa/kelurahan.

#### **10.7 Tahapan Kegiatan**

##### **Langkah 1. Penyusunan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi**

Dalam tahapan ini, penting bagi kelompok kerja untuk mengidentifikasi isu yang akan dihantarkan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil program desa/kelurahan tangguh bencana. Selain itu, dengan mengacu terhadap hasil kajian risiko bencana, kelompok kerja juga dapat mengidentifikasi kelompok sasaran serta waktu yang tepat untuk dilakukan sosialisasi dan diseminasi. Selanjutnya Kelompok kerja dapat menyusun rencana sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan pembagian kerja masing-masing anggota kelompok serta sumberdaya yang dibutuhkan.

##### **Langkah 1.a. Identifikasi Isu untuk Sosialisasi dan Diseminasi**

Proses Kajian risiko merupakan alat yang tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dari kerentanan terhadap ancaman bencana. Banyak dari akar masalah ini dapat diatasi melalui perbaikan terhadap kebijakan pemerintah, intervensi terhadap perubahan perilaku maupun kombinasi keduanya.

Secara umum, Sosialisasi dan Diseminasi harus didasari oleh “informasi” atau “pesan” yang tepat. Oleh karena itu penting untuk memahami isu yang akan disosialisasikan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan membantu anda dalam mengelola informasi:

- a. Apa masalahnya?
- b. Apa akar masalahnya?
- c. Apa dampak yang timbul jika masalah tersebut tidak diatasi?
- d. Apa yang ingin anda ubah?

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi dapat dijadikan alat untuk mempengaruhi konteks politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kerentanan masyarakat. Sebagai contoh :

- a. mendorong pemerintah lokal untuk menyebarkan informasi mengenai Status Pintu Air, akan mengurangi kerentanan masyarakat
- b. sosialisasi pentingnya ijin mendirikan bangunan untuk mitigasi dampak dari gempa
- c. Sosialisasi pentingnya manajemen tata guna lahan dan sempadan sungai untuk mengurangi risiko banjir dan penurunan kualitas lahan

Sosialisasi dan diseminasi ini dapat pula dilakukan untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana.

#### **Langkah 1.b. Pemetaan Para Pelaku**

Tidak ada aturan yang pasti untuk menyatakan siapa yang perlu terlibat dalam upaya sosialisasi dan diseminasi ini. Perlu kita ketahui bahwa keterlibatan para pihak akan tergantung terhadap konteks spesifik, sesuai dengan kondisi lokal. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi para pihak, baik melalui kajian risiko bencana yang sudah dilakukan, ataupun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- a. Siapa pelaku yang terpingirkan dan tidak berpendapat harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk mengikutsertakan mereka
- b. Siapa perwakilan dari kelompok yang terkena dampak dari masalah tersebut?
- c. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan jasa/pelayanan terkait dengan masalah-masalah tersebut
- d. Siapa yang dapat menggunakan upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi menjadi efektif melalui keterlibatannya
- e. Siapa yang berkontribusi terhadap pendanaan dan sumberdaya teknis terhadap kegiatan sosialisasi dan diseminasi

Parapihak / parapelaku / para pemangku kepentingan (para pihak) adalah orang, kelompok, organisasi atau system yang mempengaruhi atau dapat terpengaruh oleh masalah yang akan disosialisasikan *dan diseminasikan*.

Saat semua para pihak yang berhubungan dengan permasalahan telah diidentifikasi, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah kita. Dengan kata lain, untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa. Bila memungkinkan perlu mencari tahu siapa pemain utama, dan mengidentifikasi kunci hubungan, masalah, peluang dan pendekatan yang dilakukan. Kita perlu menghindari

duplikasi usaha dan dapat menemukan mitra atau orang kunci untuk mendukung inisiatif sosialisasi dan diseminasi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan target upaya-upaya sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kita. Proses ini relatif sederhana di tingkat lokal karena biasanya jumlah yang ada jauh lebih kecil dari pelaku. Aktor-aktor lokal ini juga pada akhirnya mereka yang bertanggung jawab untuk tindakan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan.

Tabel 10.1 Pemetaan para pelaku

Keterangan	Pelaku 1	Pelaku 2
Nama Pelaku		
Perhatian Para pihak terhadap Isu Pengurangan Risiko Bencana (nyatakan perhatian para pihak, apakah mereka para pihak primer atau sekunder)		
Tingkat dukungan Para pihak terhadap Isu Pengurangan Risiko Bencana (baik, cukup, kurang)		
Tingkat Pengaruh Para pihak terhadap Isu Pengurangan Risiko Bencana ( <i>baik, cukup, kurang</i> )		
Pentingnya Keterlibatan Para pihak ( <i>baik, cukup, kurang</i> )		
Tingkat Pengetahuan Para pihak terhadap Isu Pengurangan Risiko Bencana ( <i>baik, cukup, kurang</i> )		
Aksi yang diharapkan dari Para pihak (Nyatakan aksi yang diharapkan dari para pihak)		

### Langkah 1.c. Pengembangan Rencana Kerja Sosialisasi dan Diseminasi

Adalah penting untuk mendefinisikan tujuan dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi untuk menentukan apa yang ingin dicapai sesuai dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki.

Tujuan merupakan keinginan yang bersifat luas dan umum, serta mengandung pengharapan, dan pencapaiannya jauh tak terbatas. Dalam perencanaan komprehensif pengurangan risiko bencana, tujuan berasosiasi dengan keinginan atau harapan jangka panjang. Sasaran bersifat lebih rinci, dan memperlihatkan langkah-langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan.

Semua pencapaian tujuan dari Sosialisasi dan Diseminasi ini haruslah SMART (*Specific, measurable, achievable, realistic and time-bound*)

Tabel 10.2 Rencana Kerja Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi  
Hasil Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Tujuan (Goal)	Sasaran (objective)	Kegiatan	Para pihak yang terlibat	Penanggung Jawab	Waktu

#### Langkah 1.d. Pengembangan Pesan Kunci Sosialisasi dan Diseminasi

Pesan adalah pernyataan yang didesain untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Sebuah pesan menjelaskan apa yang anda usulkan, kepada perlu dilakukan dan dampak positif dari usulan anda.

Penggunaan Formula *See + Action* dapat digunakan untuk menginformasikan, memotivasi, mempengaruhi kelompok sasaran untuk melakukan aksi. Proses dan analisis kajian risiko dapat digunakan untuk sebagai sumber informasi untuk mengembangkan pesan kunci sosialisasi dan diseminasi

### ***See + Action***

Pernyataan sederhana ini, “Jika kita dapat menghentikan pembakaran hutan dan ladang, maka kita dapat menyelamatkan anak kita”, berasal dari fakta / kejadian bahwa pada tahun 2015, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Kebakaran tersebut memiliki nilai ISPU 2108.5 ugr/m<sup>3</sup>. Dampaknya terhadap anak-anak adalah semakin meningkatkan kasus ISPA, serta berakibat pula pada kondisi psikologis anak-anak. Sehingga wajar bila seorang anak berkata, “Pada saat terjadi kabut asap, saya tidak bisa sekolah dan bermain dengan teman-teman. Saya juga menderita sakit ISPA, sehingga harus menggunakan masker selama sehari-hari”. Pernyataan tersebut menghadirkan aksi “Menyerukan kepada SKPD terkait untuk menegaskan kembali kebijakan mengenai penebangan hutan dan ladang”

## Langkah 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program

Berdasarkan rencana kerja, maka kelompok kerja melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi sesuai dengan para pihak yang akan terlibat. Berbagai metode dan media dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan ketrampilan yang dimiliki yang disesuaikan dengan konteks lokal yang meliputi: Lokakarya, pertemuan, presentasi, mobilisasi masyarakat, penggunaan *mass media*, *printed media*, dll.

Penting pula disadari oleh kelompok kerja akan pentingnya menyusun agenda jika kegiatan sosialisasi dan diseminasi diarahkan untuk perubahan kebijakan, sebagaimana contoh di bawah ini:

Tabel 10.3 Agenda Sosialisasi dan Diseminasi

Pelaku & Agenda	Proses
Kelompok Sasaran	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten
Pembuatan Keputusan Formal	Suku Dinas Kesehatan-Bagian ISPA akan system kewaspadaan dini menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan
Pembuatan Keputusan Informal	Diskusi Informasi dengan BPBD, BMKG dan Suku Dinas Kesehatan untuk membahas elemen-elemen Sistem Kewaspadaan Dini
Bagaimana kita dapat mempengaruhi proses pada tahap ini	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pertemuan dengan Suku Dinas Kesehatan-Bagian ISPA akan system kewaspadaan dini</li><li>▪ Bekerjasama dengan staf yang diberi tugas untuk membuat Sistem Kewaspadaan dini, untuk penyediaan kajian risiko, serta data-data lain yang dibutuhkan</li></ul>
Waktu	Januari dan Februari, ketika terjadi proses pengajuan usulan kegiatan

## Langkah 3. Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program

Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Program dibuat oleh masing-masing anggota kelompok kerja untuk mengidentifikasi bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan berkontribusi terhadap *goal* dan *objective* yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Laporan harus menyertakan informasi-informasi berikut ini:

- a. Pesan kunci sosialisasi dan diseminasi
- b. Cara kegiatan dilaksanakan
- c. Metode dan media yang digunakan
- d. Jumlah peserta yang hadir, dipilahkan berdasarkan jenis kelamin dan umur
- e. Temuan hasil



Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 11.1 Pengantar

Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan pedoman umum untuk melakukan simulasi; sebagai uji praktek dari sistem peringatan dini (SPD) dan rencana evakuasi (Renvak). Simulasi ini sekaligus bahan belajar dan pembiasaan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Sistem peringatan dini dan rencana evakuasi perlu diketahui, dipahami dan dipraktikkan oleh setiap individu di kawasan rawan bencana. Pemahaman ini didukung dengan adanya komponen-komponen lain seperti media informasi, rambu-rambu dan peralatan lain yang mendukung simulasi. Peralatan yang ada dan tersedia harus diuji cobakan. Simulasi digunakan untuk lebih memahami dan meningkatkan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tim. Siapa melakukan apa dan perlu dilatih serta dibiasakan, sehingga tidak terjadi kepanikan dan tumpang tindih antar bagian. Tim relawan atau tim siaga desa diharapkan mampu memahami tugas dan kewajibannya.

Simulasi kejadian ditentukan (kesepakatan) berdasarkan kejadian mulai dari tingkat minimal (rendah/kecil), medium (sedang), sampai dengan tingkat maksimal (besar/tinggi), agar bisa menjadi gambaran awal untuk membuat alur Skenario secara runtut dan berpedoman pada Rencana Kontinjensi. Berdasarkan skenario yang ditetapkan, kerugian dan kerusakan yang diperkirakan terjadi antara lain, penduduk, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan.

Simulasi tidak harus dengan biaya tinggi, karena simulasi merupakan kebutuhan semua warga, sehingga pelaksanaannya dengan swadaya dan sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan keterlibatan pemerintah dalam mendukung kegiatan simulasi karena integrasi tanggungjawab pemerintah dengan masyarakat.

### 11.2 Tujuan

Mengembangkan rencana simulasi untuk jenis ancaman tertentu untuk menguji dan memperbaiki mekanisme sistem peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontinjensi yang telah disusun.

### 11.3 Hasil Yang Diharapkan

Simulasi ini diharapkan akan dapat (1) meningkatkan kemampuan warga dalam memahami sistem peringatan dini dan evakuasi; (2) menghasilkan catatan-catatan untuk perbaikan rencana kontinjensi, rencana evakuasi dan sistem peringatan dini; (c) menghasilkan catatan-catatan untuk masukan perbaikan pada rencana pengurangan risiko bencana dan rencana aksi di desa/kelurahan.

## 11.4 Sumberdaya Pendukung

Sumberdaya pendukung yang diperlukan antara lain: (a) Dokumen Rencana Kontijensi, (b) Dokumen Rencana Evakuasi, (c) Sistem rantai peringatan dini, (d) Peta jalur evakuasi dan (e) Logistik (akomodasi, transportasi, konsumsi, komunikasi) sesuai dengan dokumen.

## 11.5 Peserta

Simulasi diikuti oleh masyarakat beserta tim siaga desa di kawasan rawan bahaya dengan memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok rentan, misalnya balita, anak-anak, ibu hamil, lansia dan orang berkebutuhan khusus.

## 11.6 Lokasi

Lokasi ditentukan sesuai dengan skenario dan rencana evakuasi yang telah dibuat dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah rawan bencana, daerah aman dengan fasilitas umum pendukung.

## 11.7 Tahapan Proses

Tahap	Kegiatan	Metode/Peraga
<b>A. Persiapan Simulasi</b>		
Sosialisasi Kegiatan Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> FPRB Desa/tim relawan memberikan pengantar tentang pentingnya warga masyarakat berlatih dan menguji mekanisme peringatan dini, rencana evakuasi dan rencana kontingensi.</li> <li><input type="checkbox"/> Dengan simulasi masyarakat dapat belajar langsung untuk meningkatkan tindakan-tindakan nyata mengurangi potensi kerugian jiwa dan aset warga.</li> <li><input type="checkbox"/> FPRB Desa/Kelurahan atau tim relawan menjelaskan jenis ancaman yang akan disimulasikan, skenario, rantai peringatan, jalur evakuasi, prosedur tiap sektor.</li> </ul>	Paparan Curah pendapat Alat peraga: alat tulis, peta jalur evakuasi, miniatur
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Sosialisasi dapat dilakukan pada setiap komunitas dan atau kelompok pada kegiatan rutin kelompok, misal pertemuan kampung/dusun, pertemuan PKK, pertemuan Karang Taruna, pengajian, arisan, dan sebagainya.</li> </ul>	
Pemasangan Rambu-rambu bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rambu-rambu bencana adalah alat untuk perlengkapan penanggulangan bencana dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi masyarakat.</li> <li><input type="checkbox"/> Fungsi rambu bencana adalah untuk mendukung kesiapsiagaan warga ssekitar ataupun siapapun yang berada di lokasi rawan atau aman bencana tersebut.</li> </ul>	Pemasangan di tempat-tempat strategis dan mudah di fahami oleh semua kalangan sesuai jalur evakuasi.
<b>B. Persiapan Teknis</b>		
Drill / gladi sektor	Masing-masing sektor yang dibentuk melakukan koordinasi dan latihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Misalnya tim sektor evakuasi melakukan latihan penyelamatan korban dan pertolongan pertama. Tim / sektor peringatan dini melakukan latihan komunikasi menggunakan HT.	Diskusi dan latihan

Tahap	Kegiatan	Metode/Peraga
Gladi posko dan gladi ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana simulasi ini dapat dibicarakan dengan BPBD kabupaten/kota untuk kemungkinan melaksanakannya secara bersama dan/atau mendapatkan dukungan sumber daya yang diperlukan.</li> <li>b. Pertemuan untuk gladi posko merupakan persiapan akhir sebelum pelaksanaan simulasi. Persiapan ini untuk memastikan kesiapan dari masing-masing tim/ sektor dan semua pihak yang terlibat dalam simulasi, kesiapan peralatan yang akan digunakan dalam simulasi</li> <li>c. Gladi posko ini sebaiknya dilakukan sehari sebelum hari H pelaksanaan simulasi.</li> <li>d. Gladi posko juga disebut <i>Table Top Exercise (TTX)</i>, dimana seluruh sektor mensimulasikan sistem komando dan koordinasi antar sektor dalam satu ruangan.</li> </ul>	Gladi ruang dan gladi posko
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gladi ruang merupakan ujicoba sistem komando dan koordinasi antar sektor, dimana para pelaku berada pada ruangan berbeda.</li> </ul>	
<b>C. Pelaksanaan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan simulasi menjadi media untuk belajar dengan mempraktekan langsung (<i>learning by doing</i>) proses penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dapat dilakukan.</li> <li>▪ Secara ideal, simulasi bukan ajang untuk demonstrasi kekuatan personil dan kelengkapan alat, melainkan memperagakan skenario yang hampir mirip dengan kondisi bencana sesungguhnya sehingga tidak perlu mengumpulkan masa sebelumnya dan menyiapkan peralatan di lapangan.</li> </ul>	Gladi Lapang Menggunakan seluruh peraga sesuai dengan yang di butuhkan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setelah simulasi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi terhadap proses simulasi tersebut. Metode simulasi dapat menggunakan diskusi kelompok terarah dan atau menggunakan form yang telah disiapkan. Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi diantaranya: kesiapan sektor, kesesuaian skenario dan praktik.</li> </ul>	Curah pendapat

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 12.1 Pengantar

Tujuan yang hendak dicapai dalam prakarsa pengurangan risiko bencana ialah menurunnya risiko bencana, yakni kerusakan/ kerugian, terganggunya akses masyarakat terhadap hak-hak dasarnya, terganggunya fungsi-fungsi social kemasyarakatan dan pelayanan public di berbagai sector kehidupan; melalui serangkaian kerja sistematis dengan mengelola/memperkecil dampak-dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya maupun kemungkinan kejadian bencana. Dengan diselenggarakannya prakarsa pengurangan risiko bencana melalui kegiatan desa tangguh bencana ini masyarakat difasilitasi untuk memiliki/mengembangkan mekanisme dalam mengelola risiko bencana.

Masyarakat yang tangguh dapat dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki daya lenting yang tinggi, sehingga ketika terjadi bencana dapat segera pulih dari keadaan terpuruk menuju kehidupan normal kembali. Karakter atau ciri dari masyarakat yang tangguh seharusnya telah dijabarkan dan dicapai melalui tahapan-tahapan penyelenggaraan kegiatan desa tangguh bencana.

Untuk memastikan bahwa kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana benar-benar mengarah pada pencapaian karakter masyarakat yang tangguh, maka diperlukan pemantauan untuk melihat kemajuan kegiatan dan ada-tidaknya perubahan, serta penilaian terhadap pencapaian tersebut [monitoring-evaluasi]. Kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana pada dasarnya merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, karena itu cara-cara yang mengedepankan keikutsertaan masyarakat [partisipatif] menjadi sangat penting, termasuk dalam kegiatan monitoring-evaluasi.

Monitoring-evaluasi program menasar pada capaian ketangguhan masyarakat yang dapat dilakukan setiap kegiatan dan di akhir program.

Evaluasi akhir pelaksanaan program PRB dalam hal ini Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menekankan pada beberapa aspek, diantaranya (1) partisipasi, (2) efektifitas dan efisiensi, (3) manfaat, serta (4) pembelajaran. Aspek-aspek evaluasi dijabarkan sebagai berikut:

- Aspek partisipasi; hal yang dikaji ialah tentang peran serta dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program, dapat dikembangkan dengan menilai tingkat partisipasi dari partisipasi semu hingga partisipasi aktif yang menjamin semua lapisan masyarakat menyepakati keputusan. Dapat pula dikaji tentang seberapa besar kepemilikan masyarakat pada program yang menjamin keberlanjutan.

- Aspek efektifitas dan efisiensi menekankan pada proses terkait cara/metode. Beberapa hal yang perlu dinilai diantaranya: ketepatan cara pelaksanaan program, ketepatan penerima program, kesesuaian waktu, serta kesesuaian antara hasil yang diperoleh dibanding input (finansial).
- Aspek manfaat terkait apakah hasil-hasil (pencapaian indikator) yang ada menysasar pada kebutuhan atau permasalahan masyarakat. Aspek ini juga membahas perubahan-perubahan setelah adanya program baik pada pemahaman, sikap, maupun perilaku masyarakat.
- Aspek pembelajaran menekankan pada dinamika seluruh aktifitas program tentang kelebihan/kapasitas dan kelemahan praktik-praktik yang dijalankan, menilai tentang praktik baik yang dapat dikembangkan dan kekurangan yang perlu diperbaiki.

Salah satu perangkat yang telah disiapkan ialah perangkat monitoring perkembangan kegiatan bulanan dan perangkat evaluasi/penilaian awal (*baseline*) yang kemudian dibandingkan pada akhir program dengan penilaian akhir (*endline*). Perangkat penilaian ini berguna untuk mengukur ketercapaian indikator dan perubahan-perubahan pada aspek kelembagaan, kebijakan, maupun perilaku berdasarkan kajian dokumen, observasi, hasil FGD, hasil wawancara, dan data sekunder lain.

## Pertanyaan Kunci

Panduan ini akan menjawab pertanyaan:

- Apa saja sumber penghidupan dan meliputi jenis-jenis apa saja sumber penghidupan yang ada di desa?
- Kejadian penting apa saja / perubahan apa saja yang pernah terjadi berkaitan dengan sumber penghidupan tersebut?
- Bencana apa saja yang berdampak pada sumber penghidupan tersebut?
- Apa saja strategi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ini? Apakah dengan *stratecoping* atau memenuhi kebutuhan sementara dengan gali lobang tutup lobang.

## 12.2 Tujuan

- Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan program desa/kelurahan tangguh bencana.
- Menilai proses dan hasil-hasil kegiatan pelatihan dan pengembangan desa tangguh dengan membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi antara sebelum (*data baseline*) dan sesudah (*data endline*) dilakukan program.
- Menemukan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan yang sejenis pada waktu atau tempat yang lain.
- Menyusun rencana tindak lanjut.

## 12.3 Hasil Kegiatan

- Adanya identifikasi capaian/kemajuan pelaksanaan kegiatan/program.
- Adanya rumusan-rumusan penilaian/pengukuran bersama terhadap proses dan capaian.
- Adanya hasil endline ketangguhan desa/kelurahan
- Adanya rumusan pembelajaran yang merujuk pada hal-hal yang memberikan kontribusi pada keberhasilan atau kegagalan proses dan pencapaian hasil.
- Adanya rekomendasi-rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- Adanya laporan pelaksanaan program yang dilengkapi dengan capaian dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah intervensi program.

## 12.4 Sumberdaya Pendukung

### Sumberdaya Manusia:

Fasilitator, peserta kegiatan, Peserta Evaluasi, Pengamat

### Alat dan perlengkapan:

- Perangkat monitoring dan evaluasi berbasis masyarakat
- Perangkat penilaian endline ketangguhan desa/kelurahan
- Dokumen-dokumen: 1. Rekaman proses, 2. Dokumen Kajian Risiko, 3. Dokumen RPB, 4. Dokumen RAK, 5. Dokumen Forum PRB, 6. Dokumen SPD, 7. Dokumen Rencana Evakuasi, 8. Dokumen Rencana Kontinjensi, 9. Dokumen RPJM Desa yang telah memasukkan PRB, 10. Dokumentasi Sosialisasi, 11. Dokumen Baseline dan dokumen-dokumen lain yang relevan.
- Perekam Proses [perekam suara, kamera foto, kamera video]
- ATK (*flip chart*, metaplan, spidol)
- Apabila diperlukan, gambar

***Catatan:** Dalam keadaan ekstrem kadang Fasilitator tidak dapat hanya menggantungkan diri pada peralatan dan perlengkapan yang memadai, misalnya tidak tersedia flip chart, metaplan, spidol, kamera. Karena itu Fasilitator dituntut untuk kreatif menggunakan peralatan seadanya untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan substantif maupun administratif.*

## 12.5 Peserta

- Peserta pelatihan dan peserta penyelenggaraan kegiatan PB desa tangguh
- Pengurus dan anggota forum PRB desa
- Perwakilan perangkat desa
- Perwakilan masyarakat, terutama kelompok marginal
- Peserta lain yang relevan.

***Catatan:** Jumlah keseluruhan peserta tidak dibatasi secara khusus. Prinsipnya, tidak terlalu banyak, karena akan menyulitkan proses; namun juga tidak terlalu sedikit agar cukup dianggap representatif. Komposisi peserta mempertimbangkan keseimbangan laki-laki dan perempuan.*



## 12.6 Tempat

Tempat pertemuan sesuai kesepakatan bersama. Tempat tersebut sebaiknya yang bisa diakses oleh semua peserta. Untuk pihak-pihak yang tidak dapat hadir dan pendapatnya penting untuk diketahui, dapat dilakukan kunjungan-kunjungan. Kunjungan ini diutamakan kepada kelompok-kelompok marjinal.

## 12.7 Tahapan Kegiatan

- a. Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan dengan mengisi form laporan perkembangan dan capaian kegiatan
- b. Kegiatan evaluasi dilakukan pada paruh waktu dan pada akhir program kegiatan desa tangguh bencana.
- c. Selama proses kegiatan dilakukan observasi yang bertujuan menilai partisipasi masyarakat.
- d. Fasilitator melakukan **wawancara** pada representasi kelompok/lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal untuk menggali persepsi dan pendapat mereka terkait proses, capaian program, kendala, dan keberhasilan.
- e. Fasilitator dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan metode **Focus Group Discussion/FGD** yang mengundang representasi kelompok/lapisan masyarakat. Fasilitator memulai kegiatan evaluasi dengan menjelaskan tujuan dan kegunaan evaluasi.
- f. Fasilitator memandu jalannya FGD evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait kriteria/aspek evaluasi, kemudian partisipan menulis pada kartu metaplan. Namun apabila partisipan tidak terbiasa mengutarakan pendapat dengan menulis, maka Fasilitator mencatat setiap jawaban pada kertas plano yang harus disepakati semua partisipan.
- g. Semua anggota Kelompok Kerja/partisipan menyampaikan pendapatnya tentang praktek-praktek dan cara-cara yang baik dan dilakukan selama proses pelaksanaan program, hal mana dapat ditekankan sebagai bagian dari faktor kapasitas masyarakat, demikian juga untuk cara yang kurang tepat guna untuk diperbaiki.
- h. Dokumentasi proses dan dokumen capaian indikator dapat dikumpulkan dan dapat dibagikan kepada anggota Kelompok Kerja Desa/Kelurahan sebagai bukti hasil karya masyarakat desa/kelurahan yang nyata.
- i. Kemudian Fasilitator mengisi penilaian *endline* ketangguhan desa/kelurahan untuk dibandingkan dengan hasil penilaian *baseline* yang dilakukan di awal pertemuan dari berbagai macam sumber (dokumentasi, observasi, wawancara, FGD, data sekunder).
- j. Fasilitator menyusun dokumen pembelajaran yang berisi hal baik dan hal yang perlu dihindari tentang seluruh proses dan capaian program.
- k. Waktu yang diperlukan untuk keseluruhan kegiatan ini dua hari. Satu hari untuk kegiatan FGD dan satu hari untuk kegiatan wawancara-wawancara.

Kegiatan	Capaian Output	Alat Verifikasi		
		Rekam Proses	Dokumen	
1	2	3	4	5
Pengenalan Program				
Kajian Risiko				
Penyusunan RPB dan RAK				
Penguatan Forum Desa untuk PRB dan Pembangunan				
PEngembangan SPD Masyarakat				
RenEvak				
Pembentukan dan Pelatihan Rim Relawan				
Pengintegrasian RPB dan RAK ke dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan				
Sosialisasi				
Simulasi SPD, Renevak dan Renkon.				
Prakarsa Kegiatan PRB				
Monitoring dan Evaluasi				
Pengisian Kolom:	Apakah hasil yang diharapkan dalam kegiatan sudah tercapai? Bagaimana partisipasi? Apakah dilakukan dengan efektif dan efisien? Bagaimana kemanfaatan dari kegiatan ini?	Apakah proses pencapaian hasil telah terumuskan atau tergambaran di dalam media-media: foto, metaplan, <i>flip chart</i> , notulensi, laporan kegiatan atau media-media lain.	Apakah rumusan hasil telah tertuang dalam dokumen atau naskah? Apakah masih berupa draft? Apakah sudah final? Apakah perlu dilegalkan? Apakah sudah dilegalkan?	

Form Laporan Perkembangan dan Capaian Kegiatan

Bulan: Agustus 2016

No	Kegiatan	Proses	Hasil	Hambatan /Tantangan	Pembelajaran	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Verifikasi	Paraf
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>LEGISLASI</b>								
<b>PERENCANAAN</b>								
1	Rencana PB, 20/8/16	Mempelajari peta dan hasil kajian; Diskusi pembuatan dokumen PB	Adanya draf dokumen PB	Peserta ada yang tidak hadir	Dokumen PB dibuat secara partisipatif	Rapat team kecil melengkapi draft dokumen PB	Draft dokumen PB; daftar hadir	Tanda tangan dan nama Ketua forum/pemdes/pemkab/dll
<b>KELEMBAGAAN</b>								
<b>PENDANAAN</b>								
<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS</b>								
	Koordinasi dengan Dinas Sosial untuk Pelatihan Siaga Bencana, 18/8/16	Persiapan kunjungan;Bersama kader Tagana berkunjung ke Dinas Sosial	Dinas Sosial mendukung kader Tagana Desa untuk rencana pelatihan siaga bencana	Dinas Sosial siap hanya siap sebagai narsum/pelatih siaga bencana	Kesepakatan dukungan Dinas Sosial untuk pelatihan bagi Pokja dan aparat Desa	Menyampaikan hasil koordinasi pada Kades dan meminta dukungan untuk pembiayaan konsumsi	Foto pertemuan koordinasi	Tanda tangan kepala Bidang Dinsos
<b>PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>								
	Peta dan kajian resiko, 9/8/2016	Pokja melengkapi data-data yang kurang;	Peta dan kajian resiko telah lengkap	Tidak ada biaya memperbesar Peta resiko yang	Hasil peta dan kajian resiko menjadi dokumen profil desa	Pokja akan gotong royong membuat papan peta	Dokumen hasil kajian resiko sebagai	Tanda tangan dan nama ketua Pokja

No	Kegiatan	Proses	Hasil	Hambatan /Tantangan	Pembelajaran	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Verifikasi	Paraf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
		mengundang BPBD; Rapat Pokja melengkapi peta dan hasil kajian resiko di balai desa	sebagai profil desa	ingin ditempel di kantor desa	yang lengkap	ancaman desa	profil desa, daftar hadir peserta, notulensi	

30 Agustus 2016

Mengetahui Kades,

Fasilitator  
(tanda tangan, nama)

Fasilitator  
(tanda tangan, nama)

**Keterangan tabel:**

- (1) kegiatan yang dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya
- (2) Langkah-langkah proses pelaksanaan kegiatan
- (3) Hasil yang dicapai dalam kegiatan
- (4) Hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
- (5) Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan
- (6) Rencana kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya
- (7) Sumber pembuktian bahwa kegiatan telah dilaksanakan, dapat berbentuk foto, notulen, daftar hadir, dokumen
- (8) Tanda tangan dari seseorang yang memiliki otoritas, pemimpin atau yang berkoordinasi dengan Fasilitator

Form Laporan perkembangan dan capaian tersebut diatas merupakan laporan monitoring kegiatan bulanan yang dibuat oleh Fasilitator. Laporan tersebut selanjutnya diberikan pada BPBD kabupaten sebagai laporan bulanan Fasilitator.

Form J: Form penilaian ketangguhan untuk desa/kelurahan berdasarkan lampiran Perka BNPB 1/2012

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Tanggal Penilaian : .....

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
<b>LEGISLASI</b>	1	Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang Penanggulangan Bencana/Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	(0) belum ada kebijakan (1) ada 2 kali diskusi untuk perumusan kebijakan (2) sudah menjadi draf kebijakan (3) kebijakan sudah disahkan oleh Peraturan Desa/Kelurahan	
<b>PERENCANAAN</b>	2	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK), dan/atau Rencana kontingensi (Renkon)	(0) belum ada rencana (1) ada 2 kali diskusi untuk pembuatan dokumen RPB/RAK/Renkon dan sudah menjadi draf (2) RPB/RAK/Renkon sudah menjadi dokumen desa/kel. (3) RPB/RAK sudah masuk dalam rencana pembangunan desa/kel.	
<b>KELEMBAGAAN</b>	3	Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	(0) belum ada forum (1) ada 2 kali diskusi untuk pembentukan forum PRB (2) forum PRB terbentuk dengan anggota dari berbagai kelompok dan baru melaksanakan 2 kegiatan (3) forum memiliki dan menjalankan lebih dari 5 kegiatan untuk pengurangan risiko bencana	

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
	4	Relawan Penanggulangan Bencana	(0) belum ada tim relawan (1) ada 2 kali diskusi untuk pembentukan tim relawan (2) tim relawan terbentuk dan memiliki kelengkapan personil dan peralatan untuk melakukan tugasnya (3) tim relawan rutin melakukan pelatihan, simulasi dll kepada anggota dan masyarakat	
	5	Kerjasama dengan pihak lain (diluar desa/kelurahan) dan wilayah sekitarnya	(0) belum ada kerjasama (1) ada 2 kali diskusi untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain (2) ada kesepakatan rencana kerjasama dengan desa/kel. dan pihak lain untuk pengurangan risiko bencana (3) ada setidaknya 3 kegiatan hasil kerjasama dengan desa dan pihak lain yang dilaksanakan untuk pengurangan risiko	
<b>PENDANAAN</b>	6	Dana tanggap darurat	(0) belum ada dana untuk tanggap darurat (1) ada 2 kali diskusi untuk mengumpulkan dana darurat (2) dana darurat sudah terkumpul dari beberapa sumber di desa/kel. (3) ada pengelola dan mekanisme pengelolaan dana yang jelas, termasuk penggunaannya ketika terjadi darurat	

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
	7	Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	(0) belum ada dana untuk PRB (1) ada 2 kali diskusi untuk mengalokasikan dana desa/kel. untuk PRB (2) sudah ada alokasi dana desa/kel. untuk PRB (3) ada pengelola dan mekanisme pengelolaan dana yang jelas, untuk kegiatan-kegiatan PRB	
PENGEMBANGAN KAPASITAS	8	Pelatihan untuk pemerintah desa/kel	(0) belum ada pelatihan untuk pemerintah desa/kel. (1) perangkat pemerintah desa/kel. mulai mengikuti pelatihan PB/PRB (2) ada personil terlatih, peralatan, dan logistik untuk PB milik desa/kelurahan (3) ada mekanisme pelatihan personil dan pemeliharaan peralatan serta logistik untuk PB	
	9	Pelatihan untuk tim relawan	(0) belum ada pelatihan untuk tim relawan (1) ada diskusi untuk melatih tim relawan desa/kel. (2) tim relawan mengikuti pelatihan tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan PRB (3) tim relawan sudah menerima pelatihan dan praktek evakuasi dan tanggap darurat	

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
	10	Pelatihan untuk warga desa/kel	<p>(0) belum ada pelatihan/penyuluhan kepada warga</p> <p>(1) ada 2 kali penyuluhan tentang risiko bencana, evakuasi, dan PRB untuk warga desa/kel.</p> <p>(2) ada 2 kali pelatihan untuk warga desa/kel. tentang risiko bencana, tanggap darurat, dan PRB</p> <p>(3) ada praktek simulasi rutin evakuasi dan penyelamatan bersama warga desa/kel.</p>	
	11	Pelibatan/partisipasi warga dalam tim relawan desa/kel	<p>(0) belum ada keterlibatan warga</p> <p>(1) ada diskusi melibatkan kelompok warga dalam tim relawan</p> <p>(2) ada 30 warga yang terlibat aktif dan mengikuti kegiatan tim relawan</p> <p>(3) kelompok masyarakat lain di desa/kel (selain tim relawan) melibatkan diri dalam kegiatan PB/PRB</p>	
	12	Pelibatan Perempuan dalam tim relawan desa/kel	<p>(0) belum ada keterlibatan perempuan</p> <p>(1) ada diskusi untuk melibatkan perempuan dalam tim relawan</p> <p>(2) ada 15 perempuan yang terlibat aktif dan mengikuti kegiatan tim relawan</p> <p>(3) kelompok perempuan lain di desa/kel (selain tim relawan) melibatkan diri dalam kegiatan PB/PRB</p>	



KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
<b>PENYELENGGAR AAN PENANGGULAN GAN BENCANA</b>	13	Peta dan kajian risiko	(0) belum ada sama sekali (1) ada 2 kali diskusi untuk pemetaan dan kajian risiko desa/kel (2) ada dokumen hasil kajian risiko desa/kel yang disusun bersama masyarakat, termasuk kelompok rentan (3) ada setidaknya 3 kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko tsb	
	14	Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian	(0) belum ada sama sekali (1) ada rencana pembuatan peta, jalur, dan tempat evakuasi (2) sudah ada peta, jalur, dan tempat evakuasi beserta perlengkapan minimalnya (3) ada simulasi minimal setahun sekali yang menggunakan peta, jalur, dan tempat evakuasi tsb	
	15	Sistem peringatan dini	(0) belum ada sistem peringatan dini (1) ada rencana membangun sistem peringatan dini (2) peringatan dini dilengkapi personil, informasi, dan peralatan yang memadai sesuai kebutuhan di desa/kel (3) ada simulasi minimal setahun sekali yang menggunakan sistem peringatan dini tsb	
	16	Pelaksanaan mitigasi struktural (pembangunan fisik) untuk mengurangi risiko bencana	(0) belum ada mitigasi pembangunan fisik (1) ada rencana pembangunan mitigasi struktural di desa/kel (2) sudah ada 2 kegiatan pembangunan fisik untuk mengurangi risiko bencana di desa/kel. (3) ada mekanisme pemeliharaan hasil bangunan mitigasi tsb	

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
	17	Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat	(0) belum ada rencana (1) ada rencana mengembangkan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan yang dimasukkan dalam rencana aksi komunitas (2) sudah ada 3 kegiatan pengembangan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat (3) ada mekanisme yang bisa menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat	
	18	Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan (ibu hamil dan menyusui, orang tua, anak, orang berkebutuhan khusus dll)	(0) belum ada perlindungan untuk kelompok rentan (1) ada rencana perlindungan kesehatan dan sosial untuk kelompok rentan (2) sudah ada skema perlindungan kesehatan dan jaminan sosial untuk kelompok rentan (3) ada pengelola, mekanisme, dan prosedur perlindungan kelompok rentan	
	19	Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	(0) belum ada rencana (1) ada rencana pengelolaan SDA untuk PRB, termasuk pengurangan tingkat ancaman dan kerentanan masyarakat (2) sudah ada 3 kegiatan pengelolaan SDA untuk PRB (3) ada mekanisme keberlanjutan pengelolaan SDA untuk PRB	

KATEGORI	NO	INDIKATOR	PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR	NILAI(0 - 3)*
	20	Perlindungan aset produktif utama masyarakat	(0) belum ada rencana (1) ada rencana perlindungan aset produktif masyarakat, seperti asuransi, gudang komunitas dll (2) sudah ada 2 kegiatan perlindungan aset produktif masyarakat (3) ada pengelola dan mekanisme perlindungan aset produktif masyarakat yang menjamin keberlangsungannya	

### 13.1 Tugas, Peran atau Fungsi Fasilitator

Fasilitator dapat dimaknai sebagai seseorang atau sekelompok orang, menempatkan diri sebagai pemerlancar atau bertugas mempermudah proses mempelajari-memahami persoalan dan kemudian memutuskan tindakan. Peran sebagai Fasilitator dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, oleh permintaan atau persetujuan pihak lain.

Mengapa mempelajari, memahami dan memutuskan suatu persoalan membutuhkan Fasilitator?

Pertama, karena persoalan tersebut begitu rumit sehingga butuh diskusi panjang dengan beragam sudut pandang. Di sini Fasilitator berperan sebagai pengelola kelancaran diskusi. Tugasnya yakni, memastikan semua pihak aktif menyampaikan pendapat, memastikan semua pendapat dihargai, memastikan arah diskusi tidak melenceng dari persoalan, memastikan hasil diskusi mengerucut pada satu kesimpulan bersama.

Kedua, persoalan tersebut melibatkan banyak pihak dengan latar belakang dan kepentingan berbeda-beda. Di sini Fasilitator menjadi jembatan agar kepentingan semua pihak dihargai dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama.

Ketiga, para pihak belum saling kenal, memiliki beragam kesibukan masing-masing dan saling terpisah jarak sehingga tidak mudah untuk saling bertemu. Di sini Fasilitator berperan untuk meyakinkan semua pihak agar mau bertemu, mengatur kesepatan jadwal, menyediakan atau menyiapkan tempat dan perlengkapannya.

Keempat, persoalan tersebut merupakan hal baru dan belum dipahami menyeluruh oleh para pihak. Di sini Fasilitator berperan sebagai pembawa pesan adanya persoalan baru. Fasilitator dapat menghadirkan pihak berkompeten atau memiliki kapasitas menyampaikan persoalan apabila persoalan tersebut di luar kemampuannya.

Menjadi Fasilitator harus siap jika dituntut menjalankan keempat peran di atas sekaligus dalam satu waktu secara bersamaan.

## 13.2 Kemampuan Fasilitator

Ada sifat-sifat dasar yang wajib dimiliki Fasilitator agar mampu menjalankan perannya. Yakni, mau belajar, selalu memperbaiki diri dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Tanpa ketiga sifat di atas, siapa pun mustahil bisa menjadi Fasilitator.

Belajar dari kegagalan, perbaiki, lalu coba lagi adalah satu-satunya cara menjadi Fasilitator sukses. Tidak ada ceritanya Fasilitator sekali tampil langsung sukses. Fasilitator sukses pasti sudah memiliki 'jam terbang' tinggi, tapi dia pasti memulainya dari 'jam terbang nol'.

Jika kali ini merupakan kesempatan pertama Anda menjadi Fasilitator, lakukanlah sebaik mungkin dan jangan lupa belajar dari kegagalan. Juga jangan lupa bersyukur karena dari milyaran manusia di bumi ini hanya sedikit orang pernah mendapatkan kesempatan menjadi Fasilitator.

Aspek kemampuan lain pada Fasilitator bisa kita bandingkan dengan guru.

**Tabel 1. Perbedaan guru dan Fasilitator**

No	Aspek	Guru	Fasilitator
1	Pendekatan	Paedagogy (pendidikan konvensional)	Andragogy (pendidikan orang dewasa)
2	Substansi	Memberi informasi/pengetahuan	Menggali informasi / pengetahuan dan memandu membuat sintesis
3	Syarat	Berpendidikan Sarjana	Pendidikan formal untuk Fasilitator bukan menjadi ukuran utama
4	Kemampuan	Khusus, fakultatitif dan lebih tinggi dibanding anak didik	Punya pengalaman khusus, tetapi juga mempunyai pengetahuan umum yang luas
5.	Bahasa	Resmi	Sederhana, bisa dipahami anggota kelompok belajar
6	Cara penyampaian – gaya komunikasi	Lebih banyak menggunakan komunikasi satu arah	Mengutamakan interaksi aktif kelompok belajar, dialog, egaliter
7	Penampilan	Resmi - berseragam	Pakaian sopan, sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi kelompok belajar
8	Hasil	Berupa nilai dalam angka	Penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok belajar
9	Tempat	Sekolah - Gedung	Bisa di mana saja, yang penting tidak terlalu terganggu dengan keadaan eksternal
10	Pegaturan tempat	Klasikal	Melingkar atau berbentuk U, bisa menggunakan meja – kursi atau lesehan
11	Suasana	Formal - kaku	Lebih santai, sangat fleksibel
12	Proses	Pasif / statis	aktif / dinamis
13	Relasi	Sebagai guru / pendidik dan anak didik.	Sebagai teman – mitra seajar

## **13.3 Aturan Main Fasilitator**

### **1. Kerja Dalam Tim**

Mustahil seorang Fasilitator berhasil tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Fasilitator harus bekerja bersama panitia atau dengan Fasilitator lain dalam sebuah tim dengan pembagian tugas jelas.

### **2. Tidak Menjatuhkan Martabat Peserta**

Fasilitator harus bisa menjaga martabat atau kehormatan peserta. Menyalahkan pendapat, menghina keadaan fisik, menyindir, membuat lelucon jorok, melontarkan kalimat berbau sara semuanya itu bisa menjatuhkan martabat peserta. Sekali martabat jatuh, seorang peserta akan bungkam. Lebih parah lagi ia akan pergi meninggalkan tempat. Kalau sudah begitu jangan harap dia datang kembali.

### **3. Membantu Sesama Fasilitator**

Meski sudah ada pembagian tugas dalam tim fasilitator bukan berarti kita boleh membiarkan Fasilitator lain berada dalam kesulitan. Groggi lalu lupa itu sangat manusiawi dan lumrah terjadi pada Fasilitator baru belajar. Jadi pada saat rekan Fasilitator sedang tampil, kita harus selalu memperhatikannya. Jika tiba-tiba dia gelagapan karena grogi dan lupa kita bisa membantunya dengan berbagai cara.

### **4. Hadir Secara Utuh**

Menjadi Fasilitator harus siap mental dan fisik. Peserta menuntut penampilan terbaik Fasilitator dan tidak akan memaklumi Fasilitator sedang lelah, sakit atau mengalami kekacauan pikiran dan perasaan. Begitu tampil, Fasilitator harus fokus pada tanggungjawabnya. Rasa sakit, lelah, mengantuk harus ditahan. Hal-hal mengganggu pikiran dan perasaan harus disingkirkan.

### **5. Bersikap Adil**

Setiap peserta berhak mendapat perhatian sama dari Fasilitator. Caranya, Fasilitator harus mendengarkan dengan seksama dan menghargai setiap pendapat peserta. Pastikan juga setiap peserta punya kesempatan sama mengeluarkan pendapat. Memberi perhatian yang merata kepada seluruh peserta. Jangan hanya memperhatikan yang dikenal, yang ganteng atau cantik saja yang diberi perhatian. Semua peserta mempunyai nilai dan derajat yang sama. Jadi perlu perlakukan dengan adil.

### **6. Tidak Menyalahkan Pendapat**

Fasilitator tidak berhak menilai atau menentukan salah benar suatu pendapat. Biarlah peserta lain menilai pendapat itu. Menyalahkan pendapat peserta sama saja menjatuhkan martabatnya di depan umum. Memberi komentar yang membuat peserta merasa dikecilkan. Kita musti ingat bahwa dalam proses pembelajaran kadang-kadang ada peserta yang grogi atau susah menyampaikan pendapatnya. Peran kita adalah membuat mereka lebih bersemangat dan percaya diri. Jangan mencemooh atas jawaban atau presentasi yang dilakukan oleh peserta. Pembelajaran bersama merupakan proses dengan asas saling menghormati; sehingga tidak ada seorangpun yang berhak mencemooh atau mengejek jawaban atau presentasi yang dilakukan orang lain.

### **7. Tidak Merasa Lebih Pintar**

Di atas langit masih ada langit. Jadi berhati-hatilah menghadapi peserta karena sangat mungkin ada seseorang dari mereka jauh lebih memahami masalah atau bahkan lebih terampil menjadi Fasilitator. Sikap merendah itu lebih mudah diterima semua pihak dibanding sombong.

#### **8. Berbicara Jelas dan Gunakan Kalimat Tegas**

Jangan berbicara terlalu cepat, gunakan bahasa sederhana, intonasi biasa saja dan atur suara agar dapat didengar semua peserta. Juga harus menggunakan kalimat mengandung pengertian tegas. Contoh kalimat tidak tegas; "banjir itu harus di-ini-kan." Apa maksudnya di-ini-kan?

#### **9. Banyak Akal Mencairkan Suasana**

Lelucon merupakan cara ampuh dan hemat waktu untuk mencairkan suasana. Ada baiknya Fasilitator pintar membuat lelucon bermutu. Jika ada peserta pandai melucu, manfaatkan dia. Jangan membuat lelucon dengan mengejek atas kondisi fisik atau pembawaan seseorang. Walaupun hal ini sering dianggap lucu. Kita harus ingat bahwa keadaan fisik baik cacat atau abnormal adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan yang bersangkutan tidak pernah memintanya, sehingga bukan hak kita pula untuk mencelanya. Apabila ada peserta menggunakan hal ini sebagai bahan lelucon, dan saling ejek, menjadi tugas Fasilitator untuk menyetop dan atau mengalihkan pada hal-hal lain. Sila mencairkan suasana juga bisa menggunakan permainan, menyanyi, atau gerakan senam relaksasi. Tapi awas waktunya tidak cukup dan jangan menggunakan permainan anak-anak pada orang dewasa.

#### **10. Mempunyai Rencana**

Selalu membuat rencana proses fasilitasi. Misalnya dengan menuliskan urutan topik pembicaraan. Rencana tertulis akan sangat membantu daripada hanya diingat-ingat. Rencana harus disusun bersama tim Fasilitator dan panitia.

#### **11. Datang Lebih Awal**

Banyak keuntungan diperoleh dengan hadir lebih awal beberapa menit sebelum peserta pertama. Fasilitator bisa leluasa mengatur ruangan, memastikan kesiapan peralatan pendukung, dan menunjukkan keseriusan.

#### **12. Kenali Karakter Peserta**

Datang lebih awal, berkenalan dan mengobrol dengan peserta dapat membantu mengenali karakter mereka. Kalau waktu sempit, tanyakan pada panitia, siapa saja pesertanya dan bagaimana latar belakang mereka.

#### **13. Tidak Menjawab Pertanyaan**

Fasilitator dilarang menjawab pertanyaan peserta. Harap diingat, Fasilitator bukan guru, dosen, ahli, atau pelatih. Jika ada peserta bertanya, lemparkan pertanyaan tersebut kepada peserta lainnya. Setelah terjadi interaksi tanya jawab antarpeserta, lakukan pemantauan, ikuti alurnya, kendalikan agar arah diskusi tidak melenceng.

#### **14. Sikap Tubuh**

Badan harus selalu menghadap ke peserta. Jangan pernah membelakangi peserta walau pun harus menulis di papan atau menyimak bahan tayang di layar. Membelakangi peserta sama saja tidak menghargai keberadaan mereka.

Arahkan pandangan mata ke arah peserta secara bergantian. Jadikan mata sebagai radar pemantau peserta. Mengarahkan pandangan mata secara merata ke seluruh peserta akan membuat mereka merasa dihargai. Jangan pernah sekali pun berbicara dengan membuang pandangan mata ke langit-langit, lantai, atau jendela. Itu sikap orang tidak percaya diri atau sedang berbohong.

### 15. Mengelola Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan metode ampuh untuk memastikan peserta memahami topik/materi. Tetapi diskusi kelompok membutuhkan pengelolaan seksama agar hasilnya sesuai harapan. Berikut ini langkah-langkah mengelola diskusi kelompok.

1. Bentuk kelompok diskusi
2. Berikan instruksi topik diskusi secara tertulis
3. Pastikan semua peserta terlibat diskusi di kelompoknya masing-masing.
4. Amati proses diskusi di tiap kelompok dan pastikan arah diskusi mereka tidak melenceng
5. Minta setiap kelompok menempelkan hasil diskusi di dinding/papan
6. Minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
7. Berikan penghargaan secara lisan setiap akhir presentasi kelompok
8. Lakukan pembahasan hasil diskusi setiap kelompok dan berikan masukan perbaikan lalu mintalah kelompok untuk memperbaiki hasil diskusi saat itu juga.

## 13.4 Situasi Menantang Bagi Fasilitator

Beragam hal menantang akan dijumpai dan seorang Fasilitator dituntut mampu menanganinya sebaik mungkin. Tantangan bisa berasal dari peserta karena keragaman latar belakang dan kepentingan mereka. Bisa juga berasal dari kekurangan/kekurangannya Fasilitator sendiri.

### 1. Peserta Pasif

Ini tantangan terberat dan paling sering dijumpai. Peserta pasif, maksudnya peserta hanya diam tidak merespon pertanyaan Fasilitator. Dimintai pendapat, mereka diam membisu. Ditanya apakah sudah memahami topik pembicaraan, tidak ada jawaban.

Sikap pasif peserta bisa terjadi karena banyak penyebab. Berikut ini beberapa contoh penyebab peserta pasif, cara mendeteksi dan alternatif solusinya.

Penyebab	Cara Mendeteksi	Alternatif Solusi
<i>Karena tidak memahami tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan</i>	<i>1. Minta semua peserta menuliskan tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan pada selembar kertas, biarkan mereka menulis bebas sepengetahuan mereka 2. Kumpulkan jawaban lalu simpulkan apakah mereka sudah paham. Jika belum, lanjut ke solusi.</i>	<i>1. Jelaskan tujuan dan hasil pertemuan/pelatihan 2. Mintalah setiap peserta menuliskan pada selembar kertas tentang harapan-harapan mereka setelah mengikuti pertemuan/pelatihan, lakukan pengelompokan dan pembahasan.</i>
<i>Karena tidak terbiasa mengungkapkan pendapat, malu, bingung</i>	<i>1. Berikan satu pertanyaan tentang masalah atau kekhawatiran mereka pada bencana.</i>	<i>Selalu meminta pendapat peserta disampaikan secara tertulis.</i>



Penyebab	Cara Mendeteksi	Alternatif Solusi
<i>merangkai kata.</i>	2. Mintalah setiap peserta menuliskan jawaban pada selembar kertas lalu kumpulkan 3. Lakukan penilaian diam-diam. Jika mereka menjawab panjang lebar secara tertulis, maka lanjutkan ke solusi.	
<i>Karena sulit memahami alur pembicaraan dan kata-kata Fasilitator.</i>	<i>Bagikan lembar penilaian Fasilitator (lampiran), lalu lihat hasilnya.</i>	1. Tuliskan alur pembicaraan dan jelaskan. 2. Atur/perlambat kecepatan bicara. 3. Gunakan kata-kata mudah dimengerti.
Karena Fasilitatornya galak, takut salah, dimarahi atau dihukum.	Bagikan lembar penilaian Fasilitator (lampiran), lalu lihat hasilnya.	Lakukan pendekatan, akrabkan diri dan cairkan suasana dengan lelucon.

## 2. Peserta Mendominasi Pembicaraan

Jika ada beberapa peserta sudah terlalu sering mengeluarkan pendapat, berikan himbauan lisan secara sopan agar ia memberi kesempatan berpendapat pada peserta lain. Mintalah peserta untuk tidak memotong atau menyela saat peserta lain sedang mengajukan pendapat.

## 3. Forum dalam Forum

Jika ada beberapa peserta mengobrol atau membuat forum sendiri pada saat Fasilitator memberikan penjelasan atau ada peserta mengajukan pendapat, segera lakukan tindakan. Pertama dengan peringatan lisan. Jika tidak mempan, dekati posisi duduk mereka, lalu lanjutkan penjelasan.

## 13.5 Jenis Pertanyaan Fasilitator

Cara Fasilitator memancing atau menghidupkan diskusi adalah dengan pertanyaan. Maka kemampuan Fasilitator membuat pertanyaan sangatlah penting. Salah membuat pertanyaan, maka hasil jawabannya bisa melenceng dari harapan. Berikut ini jenis-jenis dan contoh pertanyaan pemancing diskusi.

### 1. Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan dengan hasil jawaban terbuka, dan tidak mengharapkan jawaban 'ya' atau 'tidak'. Contoh: "Kenapa bapak belum makan?"

### 2. Pertanyaan Tertutup

Pertanyaan dengan hasil jawaban sudah jelas. Contoh: "Kita harus sedia payung sebelum.....?"

### 3. Pertanyaan Pengingat

Pertanyaan dengan hasil jawaban berupa gambaran peristiwa masa sebelumnya. Contoh: "Bagaimana kejadian banjir tahun lalu? Bagaimana cara masyarakat menyelamatkan diri pada saat banjir tahun lalu?"

### 4. Pertanyaan Analitis

Pertanyaan dengan hasil jawaban berupa analisis sebab akibat suatu peristiwa. Contoh: "Apa dampaknya jika banjir lebih besar dari tahun lalu?"

### 5. Pertanyaan Proyektif

Pertanyaan dengan hasil jawaban berupa perkiraan kejadian di masa mendatang. Contoh: "Banjir tahun depan seberapa besar dan kapan bisa terjadi?"

### 6. Pertanyaan Terlarang

Pertanyaan tidak boleh digunakan oleh Fasilitator. Contoh: "Kalau banjir bapak-ibu harus mengungsi, ya atau ya?"

## 13.6 Menyusun Rencana Fasilitasi

Rencanafasilitasi harus disusun bersama dengan panitia dan rekan Fasilitator. Rencana fasilitasi seperti contoh di bawah ini memberikan gambaran garis besar proses fasilitasi. Masing-masing Fasilitator masih harus menyusun rencana secara rinci sesuai topik tanggungjawabnya.

Topik	Fasilitator	Metode	Hasil	Waktu (menit)	Alat/Bahan
Pembukaan dan sambutan	Panitia				
Orientasi pelatihan	Yoram	Penjelasan Fasilitator Curah pendapat	Disepakatinya tujuan, hasil, harapan peserta pelatihan	90	
Aturan main dan pengaturan waktu	Yoram	Penjelasan Fasilitator Curah pendapat	Disepakatinya peraturan, waktu mulai, istirahat, dan selesai	60	
Topik 1. Peran Fasilitator	Meri	Penjelasan, curah pendapat, diskusi kelompok	Peserta memahami tugas dan peran Fasilitator Dihasilkannya lembar diskusi kelompok tentang tugas dan peran Fasilitator	120	
Topik 2. Aturan main	Yoram	Penjelasan dan	Peserta memahami aturan	120	

Topik	Fasilitator	Metode	Hasil	Waktu (menit)	Alat/Bahan
Fasilitator		curah pendapat	main Fasilitator		
Topik 3. Menyusun rencana fasilitasi	Ridwan	Penjelasan, curah pendapat dan diskusi kelompok	Peserta memahami perlunya rencana fasilitasi Peserta mampu menyusun rencana failitasi Dihasilkannya rencana fasilitasi per kelompok	160	
Topik 4. Simulasi	Yoramdan Meri	Praktek per kelompok	Terbentuknya kelompok praktek Tersusunnya rencana fasilitasi per kelompok Terlaksananya praktek simulasi perkelompok	340	
Rencana tindak lanjut	Ridwan	Curah pendapat	Disepakatinya rencana tindak lanjut kegiatan	50	

### 13.7 Melakukan Simulasi

Simulasi atau *micro teaching* perlu dilakukan untuk melatih kemampuan Fasilitator. Simulasi dilakukan menggunakan rencana fasilitasi dan melibatkan seluruh anggota tim Fasilitator sebagai penilai.

### 13.8 Persiapan Fasilitasi

1. Mengerti dengan persis tujuan lokakarya atau seminar atau pelatihan yakni pembelajaran bersama agar kita secara bersama-sama menjadi lebih tahu, lebih mengerti dan dapat melakukan lebih banyak. Syukur dengan perilaku yang lebih baik.
2. Membuat silabus atau paling tidak menguasai silabus agar kita menguasai konteks diskusi dan dialog agar tujuan pembelajaran tercapai. Silabus adalah garis besar atau isi atau topik-topik yang akan dibahas dalam keseluruhan proses.
3. Mengerti dengan jelas jenis lokakarya/seminar ataupun pelatihan yang akan difasilitasi. Karena suatu orientasi akan berbeda dengan kursus dasar atau TOT. Sehingga kedalaman maupun metodologi yang digunakan pada saat membahas suatu topik akan berbeda juga.
4. Mengerti situasi dan kondisi yang akan difasilitasi. Misal jumlah peserta, komposisi laki dan perempuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman dalam bidang yang menjadi topik, rata-rata umur, status perkawinan, jumlah anak, dsb. Sehingga psikologi peserta dapat diketahui.

5. Kenali karakter peserta. Ada yang menonjol dalam pengetahuan, logika, analisa, sintesis, dsb. Ada juga yang cenderung mendominasi atau menjadi peserta bermasalah. Lakukan pendekatan khusus agar mereka rela untuk lebih bersabar dan memberi kesempatan yang lain untuk belajar.
6. Siapkan lembar kehadiran (presensi) untuk memonitor tingkat kehadiran setiap peserta. Gunanya untuk mencari penyebab dan solusi penurunan tingkat kehadiran (terutama untuk kelas).
7. Sebelum lokakarya dimulai yakinkan bahwa pembagian sesi cukup berimbang antara teori dan praktek, antara ceramah dan diskusi atau curah pendapat, kecuali untuk ilmu-ilmu atau pengetahuan baru.
8. Siapkan modul atau rencana fasilitasi yang berisi langkah demi langkah proses untuk mengantar proses agar berjalan lancar dan semua topik atau materi yang akan dibahas tidak terlewatkan. Namun ingat bahwa kita harus siap untuk menghadapi perubahan dan perbaikan.
9. Siapkan bahan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Buatlah daftar kebutuhan bahan dan yakinkan bahwa bahan-bahan tersebut ada atau dapat dibeli dilokasi. Apabila ragu-ragu, siapkan sejak dari kota asal. (misalnya kertas plano/*flip chart*, spidol berbagai ukuran, metaplan, tali, dll.)
10. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Bikin List kebutuhan alat dan yakinkan bahwa alat-alat tersebut ada atau tersedia dilokasi. Apabila ragu-ragu, bawa atau siapkan sejak dari kota asal. Misalnya, OHP, LCD proyektor, layar, dsb. Tidak semua hotel mengizinkan spreinya dipakai untuk layar.
11. Siapkan fisik dan mental sebelum memfasilitasi. Makan dan tidur cukup merupakan resep utama. Karaoke, belanja atau jalan-jalan dapat dilakukan setelah acara selesai. Walaupun sering terjadi acara belum selesai taksi sudah membunyikan klakson untuk siap membawa kita ke bandara. Yakinkan diri bahwa lain kali bisa kembali! Sehingga tidak begitu kecewa. Ingat peserta merasa tidak nyaman difasilitasi oleh orang yang mengantuk, terkena flu atau batuk. Catatan: Seringkali Fasilitator jatuh sakit karena lupa makan atau kurang tidur.
12. Yakinkan bahwa pembagian sesi cukup berimbang antara teori dan praktek, antara ceramah dan diskusi atau curah pendapat, kecuali untuk ilmu atau pengetahuan baru.
13. Siapkan modul atau rencana fasilitasi yang berisi langkah demi langkah agar proses berjalan lancar dan semua topik atau materi yang akan dibahas tidak terlewatkan. Namun ingat bahwa kita harus siap untuk menghadapi perubahan untuk perbaikan, dan ingat pepatah tiada gading yang tak retak.
14. Bentuk tim Fasilitator. Memfasilitasi sendiri memerlukan tenaga dan pikiran ekstra dan akan sangat melelahkan. Apabila terpaksa melakukan sendiri, bentuk tim perumus yang akan membantu dalam penulisan proses dan juga kesimpulan-kesimpulan akhir.
15. Sebelum dimulai, diskusikan dengan kolega atau tim fasilitator tentang apa yang akan dibawakan dan tanyakan hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam sesi yang akan dibawakan.
16. Cek alat-alat yang akan digunakan sebelum sesi dimulai. Persiapan yang baik akan memperlancar proses pembelajaran.

17. Cek apakah tayangan-tayangan dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh peserta terutama yang duduk dibelakang.
18. Cek gaung dan kejelasan suara apabila memakai *sound system*. Kalau sound sistem rusak atau kurang baik minta teknisi memperbaiki. Apabila tidak bisa, lebih baik tanpa *sound system* apabila ruang tidak begitu besar.
19. Cek tata ruang sebelum acara dimulai dan lakukan penyesuaian dengan proses yang akan dilalui. Misalnya, untuk diskusi kelompok atau permainan, dsb.

### 13.9 Pada Saat Fasilitasi

1. Usahakan Fasilitator hadir sebelum peserta hadir atau paling tidak 15 menit sebelum jadwal.
2. Siapkan materi, baik *flip chart*, transparansi, maupun slide agar tidak bingung pada saat dibutuhkan
3. Yakinkan semua peserta atau sebagian besar peserta telah hadir dan duduk ditempat yang telah ditentukan
4. Yakinkan bahwa mereka telah mengisi daftar hadir yang telah disiapkan
5. Sampaikan bahwa acara segera dimulai dan tanyakan apakah semua siap?
6. Mulailah acara dengan ucapan selamat pagi atau siang atau malam.
7. Jangan lupa perkenalkan diri kalau baru pertama kali.
8. Jelaskan topik sesi ini dan tayangkan maksud dan tujuan agar semua mempunyai pemahaman dan tujuan yang sama, sehingga diskusi tidak melebar.
9. Ingat selalu tips “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Fasilitator” yang dibahas diawal sesi ini.
10. Kontrol waktu sehingga semua topik yang harus disampaikan dapat dilaksanakan.
11. Sebelum sesi ditutup jangan lupa untuk mengecek tujuan sesi. Tayangkan kembali dan tanyakan kepada peserta apakah tujuan sesi telah tercapai. Apabila belum tegaskan bagian yang mana dan kenapa belum tercapai. Kemudian diskusikan bersama bagaimana mengatasinya. Bisa dilanjutkan, mengambil waktu istirahat atau dibahas dipertemuan berikutnya.
12. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi segenap peserta dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

### 13.10 Setelah Sesi

1. Setelah sesi selesai, bereskan kertas-kertas, *flip chart* dan juga alat-alat yang tidak dibutuhkan sehingga mempermudah proses selanjutnya
2. Catatan-catatan penting baik tentang proses maupun hasil harus dikumpulkan dan disimpan dengan baik. Kalau mungkin ditempel didinding sehingga sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali
3. Istirahat sejenak sebelum memulai sesi berikut.
4. Kalau mungkin lakukan secara selang-seling dengan tim Fasilitator yang lain agar tidak terlalu capai dan sekaligus mencegah kemungkinan timbulnya rasa bosan peserta.

# Panduan 14

## Participatory Rural Appraisal

### 14.1 Pengantar

Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengkajian maka perlu dipilih suatu metode pengkajian tepat guna. PRA (*participatory rural appraisal*) atau Pengkajian Kondisi Desa Partisipatif menjadi pilihan metode paling nyaman.

PRA menggunakan beragam metoda visualisasi sehingga lebih menarik, mudah dipahami, tidak membosankan, santai dan informal. Selain itu metode-metode PRA lebih berbasis analisis kelompok dibanding perorangan, lebih membandingkan daripada mengukur. Dengan begitu, para pelibat pengkajian dapat saling belajar.

Penerapan PRA dapat dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah warga desa (dengan memperhatikan prinsip keterwakilan semua golongan), survai lapangan dan mengunjungi rumah/keluarga.

No	Metode PRA	Temuan Faktor Risiko			
		Ancaman	Aset Berisiko	Kelemahan	Kemampuan
1	Pemetaan	Jenis ancaman dan Sebaran ancaman (lateral)	Alam: kebun/lahan pertanian, sumber air, hutan Infrastruktur: (rumah/bangunan,	Sebaran penduduk rentan	Tempat aman Jalur evakuasi Ketersediaan sumberdaya
2	Transek	Jenis ancaman Sebaran ancaman (vertikal)		Kesesuaian penggunaan lahan Masalah-masalah penggunaan lahan (status/ kepemilikan)	Ketersediaan lokasi aman (tsunami) Ketersediaan sumberdaya
3	Sejarah Desa	Jenis ancaman, intensitas, waktu kejadian, tanda-tanda ancaman	Semua bentuk kerugian akibat kejadian ancaman		
4	Kalender Musim	Potensi ancaman (banjir/longsor/kekeringan---> <i>water related hazard</i> )		Musim paceklik/ persediaan pangan kurang/tidak ada penghasilan	Musim panen atau saat-saat penghasilan tinggi
5	Sketsa Kebun		Jenis tanaman dan luas lahan tereksposur ancaman	Lokasi kebun terhadap sebaran ancaman	Sistem pangan lokal (subsistensi)

No	Metode PRA	Temuan Faktor Risiko			
		Ancaman	Aset Berisiko	Kelemahan	Kemampuan
6	Hubungan Kelembagaan			Lembaga/ kelompok/pihak kontra (meningkatkan kelemahan)	Lembaga/ kelompok/pihak pro atau bisa diajak kerjasama (mengurangi kelemahan, meningkatkan kemampuan) Strategi pelibatan pihak lain
7	Aktifitas Keluarga		Anggota keluarga paling berisiko	Beban ganda	
8	Peta Mobilitas			Sebaran penduduk menurut aktifitas dari waktu ke waktu (harian, mingguan, bulanan)	
9	Kecenderungan dan Perubahan	Perubahan ekologi, tata sosial-ekonomi dan sikap/perilaku meningkatkan (jenis/intensitas) ancaman		Masalah-masalah pada aset dan berpotensi meningkatkan kelemahan	
10	Analisis Mata Pencaharian		Jenis pekerjaan berisiko	Masalah-masalah mata pencaharian	Kemampuan ekonomi masyarakat

## 14.2 Alat-alat PRA

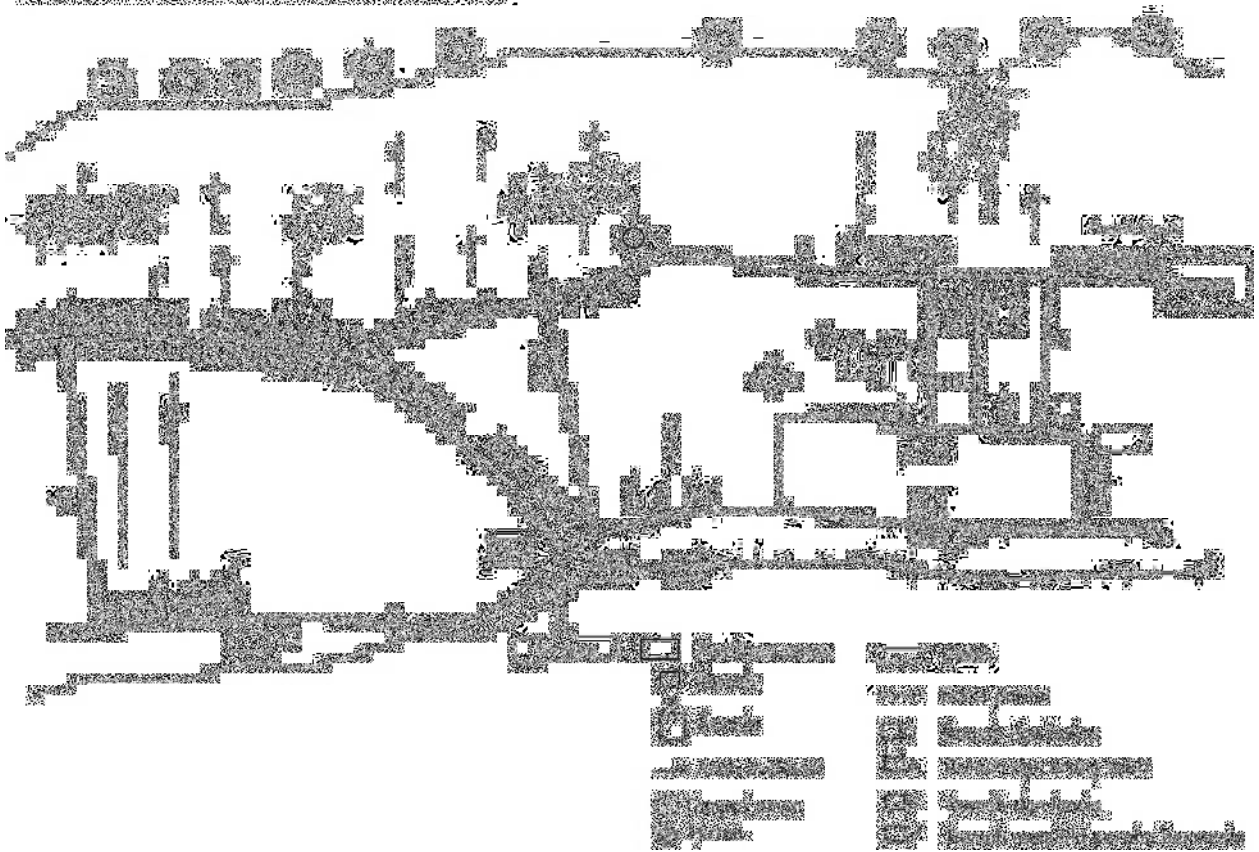
### 1. PEMETAAN

#### 1.1. Pengertian

Menggambar peta dan denah merupakan proses "meniru dan memindahkan" keadaan nyata di suatu ruangan atau kawasan (misalnya rumah, kampung, kota), secara tampak atas, ke atas kertas atau media lainnya. Peta atau denah biasanya dibuat sebagai alat bantu memahami keadaan secara menyeluruh dan kemudian mengelolanya agar menjadi lebih baik. Denah rumah misalnya, kita buat sebagai alat bantu kita memahami dan kemudian mengatur tata letak barang, membagi fungsi ruang serta menentukan jalur penyelamatan. Hasil akhirnya, penghuni rumah menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman menyelamatkan diri saat terjadi gempa.

Masyarakat dapat dengan mudah menggambar peta kampungnya berdasarkan ingatan tentang letak obyek-obyek penting atau kondisi-kondisi khusus. Agar semua anggota masyarakat dapat memahami dan turut terlibat, maka kaidah-kaidah baku dalam pembuatan peta harus disederhanakan. Dalam beberapa kasus kaidah baku pembuatan peta dibuang jauh-jauh.

## Peta Evakuasi Tsunami Kampung Monevihan



### 1.2. Manfaat

Dengan membuat peta kampung secara bersama, masyarakat dapat:

1. Menemukan, memahami, mendokumentasikan jenis dan sebaran ancaman, aset berisiko, bentuk-bentuk kelemahan dan kekuatan
2. Mendiskusikan dan mensepakati solusi atas masalah kampung seperti misalnya 1) titik kumpul evakuasi, 2) jalur evakuasi terpendek dan aman,

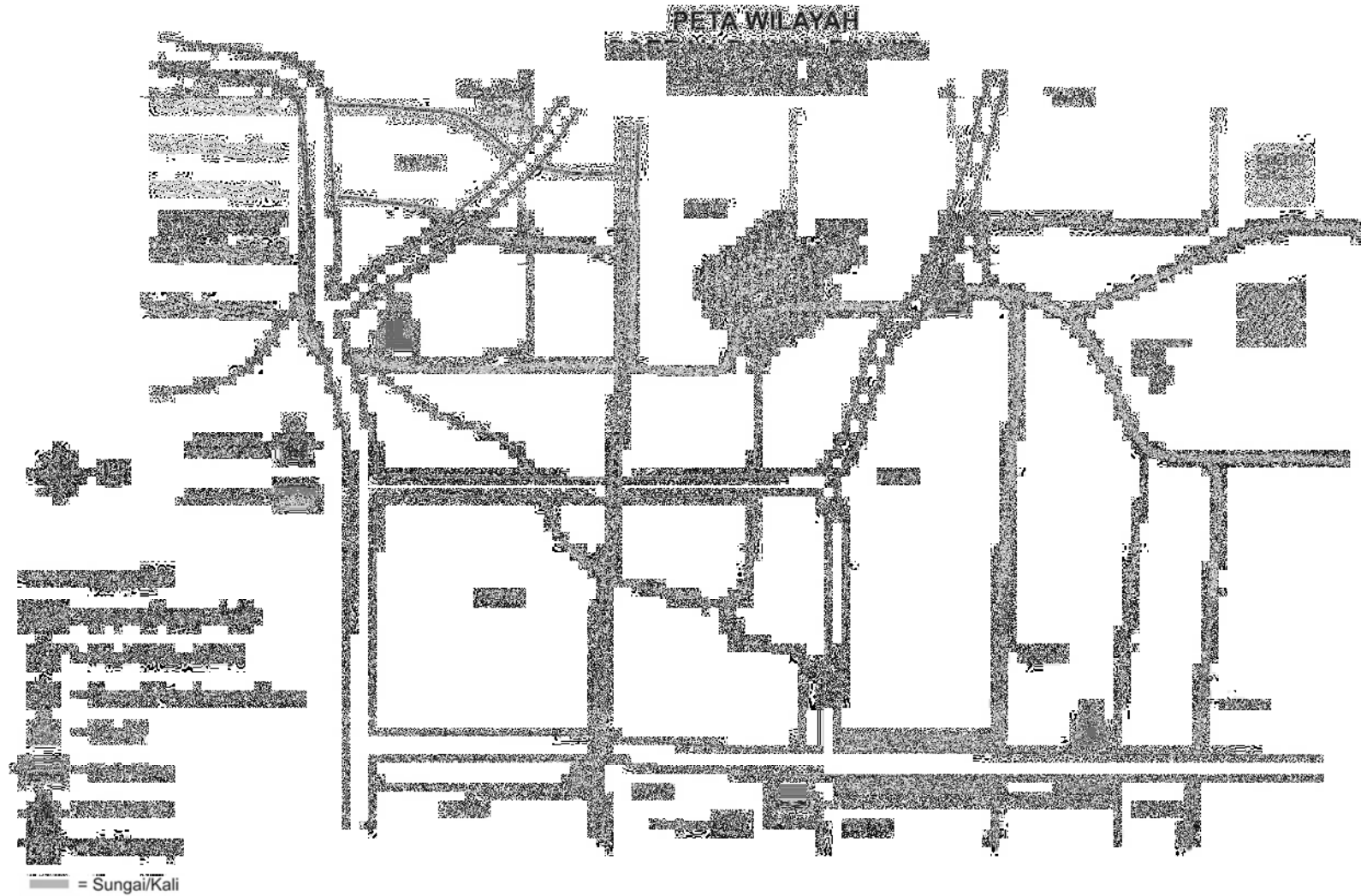
### 1.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan dan hasil pemetaan. Berikan penjelasan, bila perlu disertai contoh hasil pemetaan.
2. Mensepakati unsur peta. Awali dengan menggali pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari pembuatan peta, cara membuat dan perkiraan hasilnya. Sepakati juga obyek atau unsur apa saja untuk digambar dalam peta. Dalam konteks pengelolaan risiko bencana biasanya unsur peta meliputi; 1) jalan, 2) rumah, 3) rumah dengan penduduk rentan, 4) rumah memiliki kendaraan untuk evakuasi, 5) jalur aman evakuasi, 6) titik tujuan evakuasi, 7) daerah diperkirakan terkena ancaman, 8) arah kedatangan ancaman, 9) kebun, 10) sumber air, 11) bangunan atau fasilitas umum seperti sekolah, balai kampung, dan puskesmas, 12) letak alat tanda bahaya, 13) sungai, 14) bukit/lembah, 15) garis batas wilayah kampung, 16) hutan, 17) data penduduk, dan sebagainya.



3. Mulai menggambar peta. Setelah elemen peta disepakati proses menggambar dapat dimulai. Untuk mempermudah proses, penggambaran dapat dimulai dari menggambar garis-garis dasar seperti batas wilayah kampung, jalan, sungai. Baru kemudian memasukkan unsur-unsur peta lainnya. Disarankan menggunakan simbol dan atau warna berbeda untuk setiap unsur peta.
4. Mengecek lapangan. Usai menggambar, lakukan pengecekan lapangan bersama dengan membawa serta peta hasil penggambaran. Catat temuan penting untuk ditambahkan atau diperbaiki pada peta. Langkah ini perlu untuk memastikan bahwa tidak ada hal-hal penting terlewatkan. Akhiri dengan memberikan apresiasi dan mendiskusikan langkah selanjutnya.
5. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami peta baik-baik dan temukan ancaman, kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

Contoh Peta.



## 2. Transek

### 2.1. Pengertian

Menggambar peta dan transek sama-sama merupakan proses "meniru dan memindahkan". Bedanya, jika peta tampak atas transek tampak samping. Beragam kondisi sulit digambarkan dalam peta dapat digambarkan dalam transek. Seperti kemiringan lahan misalnya.

Transek atau garis imajiner memotong daerah atau kawasan tertentu untuk dianalisis (misalnya kampung, hutan, kebun). Biasanya berupa garis lurus. Boleh melintang atau membujur. Garis itu akan menjadi basis kajian.

Aspek kajian dalam setiap garis transek dapat beragam atau satu jenis saja. Misalnya transek khusus untuk aspek topografi kawasan (kemiringan, tinggi dan rendahnya permukaan tanah). Kemudian ada transek untuk beberapa aspek sekaligus, misalnya topografi, penggunaan lahan, sumberdaya, keragaman tumbuhan, masalah-masalah, kepemilikan lahan dan sebaran ancaman.

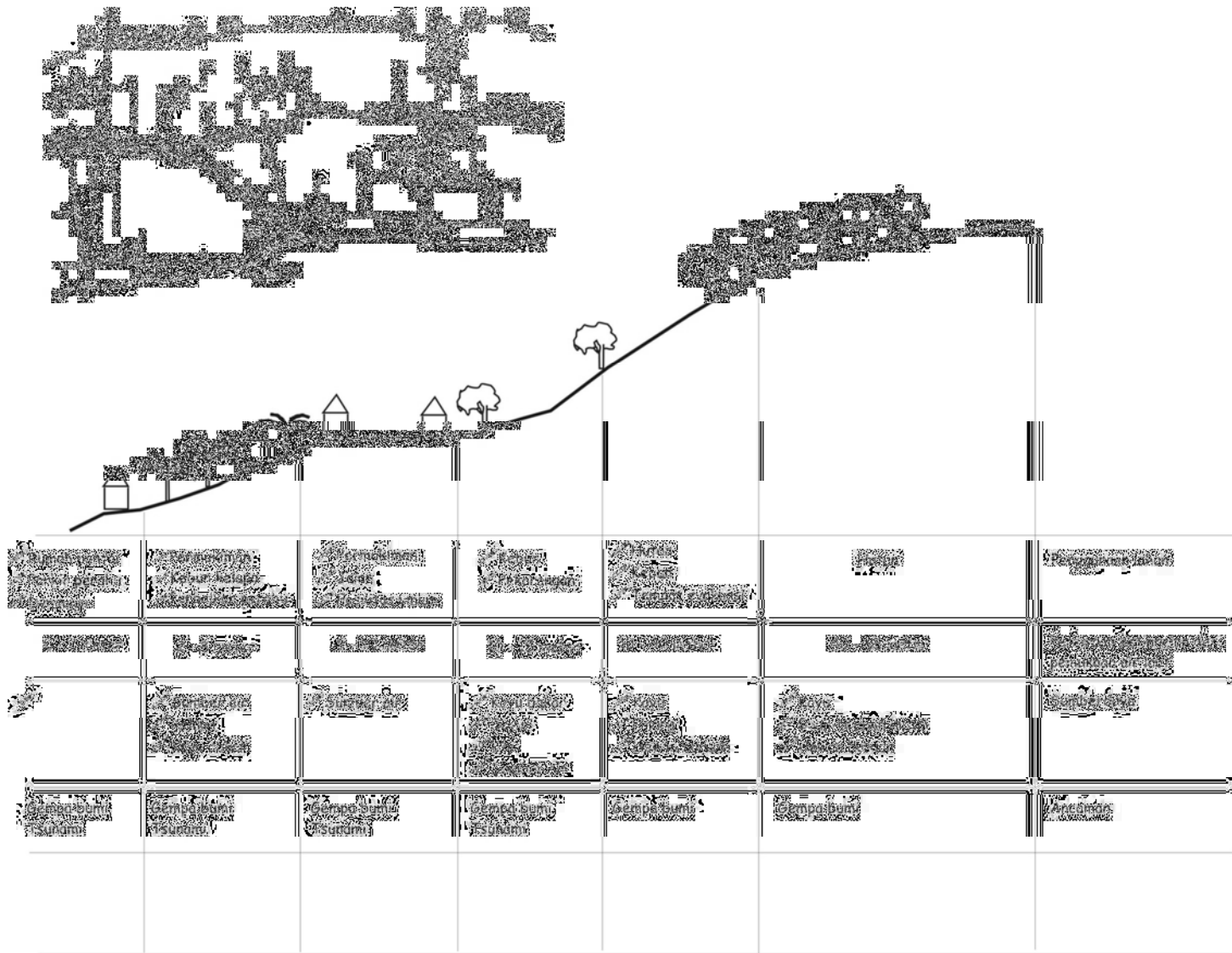
### 2.2. Manfaat

1. Mengidentifikasi topografi wilayah/kawasan; misalnya bukit dan lembah, kemiringan lahan,
2. Mengidentifikasi jenis bahaya, daerah berbahaya, sebaran bahaya secara vertikal dan lokasi aman,
3. Mengidentifikasi pola penggunaan lahan, sumberdaya, status/kepemilikan dan masalah-masalahnya

### 2.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Menetapkan garis transek. Garis transek harus memotong wilayah kajian. Sepakati bersama lintasan garis transek dan jumlahnya.
3. Menetapkan unsur/aspek transek. Tentukan aspek-aspek kajian transek (misal, potensi sumberdaya, bahaya, pemanfaatan lahan, bentuk lahan)
4. Mengecek lapangan. Lakukan perjalanan sesuai garis transek. Catat dan gambar jika perlu temuan-temuan sepanjang transek.
5. Menuliskan dan Menggambarkan hasil transek. Catatan dan gambar hasil perjalanan segera dituangkan dalam kertas dan dianalisis secara bersama.
6. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami transek baik-baik dan temukan ancaman, kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

Contoh Transek



### 3. SEJARAH DESA

#### 3.1. Pengertian

Masa lalu ibarat kunci memahami masa depan. Banyak peristiwa-peristiwa baik lokal, nasional maupun internasional terjadi dan dialami masyarakat sejak desa itu berdiri sampai saat ini. Setiap peristiwa membawa dampak baik maupun buruk dan mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan lingkungan desa saat ini. Mengkaji sejarah desa dapat menjadisemacam refleksi atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan masa depan.

Sejarah desa dapat disajikan matrik naratif atau menggunakan simbol-simbol. Matrik dapat berisi tahun kejadian, bentuk kejadian dan dampak (baik atau buruk) bagi masyarakat, sekaligus respon-respon penyesuaian oleh masyarakat.

#### 3.2. Manfaat

1. Mengidentifikasi periode bahaya
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kelemahan hasil proses waktu
3. Mengidentifikasi pola-pola respon atas dampak suatu peristiwa

#### 3.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Menetapkan tahun awal.
3. Memancing ingatan. Tanyakan peristiwa, tahun kejadian, dan dampaknya bagi masyarakat. Gunakan pertanyaan analitik.
4. Menuliskan catatan. Tuliskan dalam kertas (metaplan atau *flip chart*) setiap peristiwa, tahun kejadian dan dampaknya bagi masyarakat.
5. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami sejarah desa baik-baik dan temukan ancaman, kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

#### *Sejarah Desa Masni*

Tahun	Kejadian	Pengaruh Pada Masyarakat	
1986	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembukaan lahan menjadi kampung Masni</li><li>▪ Pemerintah dan transmigran lokal</li><li>▪ Dibuka sekolah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masyarakat dapat tinggal di Masni</li><li>▪ Masyarakat punya lahan baru</li><li>▪ Masyarakat bisa sekolah</li></ul>	
1986-1991	Masa pembinaan kampung oleh Dept. Transmigrasi	Mendorong pembangunan kampung Masni	
1991	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kampung Masni resmi terbentuk, ada pengakuan dari</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kampung mandiri</li><li>▪ Pembangunan meningkat</li></ul>	

Tahun	Kejadian	Pengaruh Pada Masyarakat	
	pemerintah ▪ Terlepas dari binaan Dept. Transmigrasi		
1986-1996	Warga rawan terseret arus banjir karena belum ada jembatan (keluar-masuk kampung menyebarangi sungai Arui)	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan (sosial-ekonomi-pendidikan-kesehatan???) masyarakat terganggu</li> <li>▪ Hasil pertanian dan perikanan tidak terjual</li> </ul>
1996	Jembatan sungai Arui dibangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan warga lancar</li> <li>▪ Risiko terseret banjir berkurang</li> </ul>	
2000	Pengaspalan jalan SP7 - Masni	Transportasi dan aktifitas warga lancar	
	Pola musim jadi tidak menentu (th 1986-200, musim gelombang dan angin antara Sept-April)	Setelah th 2000 masyarakat dapat melaut lebih sering (sesuai kondisi)	Sebelum tahun 2000 masyarakat tidak dapat melaut antara Sept-April
2005	Listrik masuk kampung Masni	Masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kegiatan produktif	
2007	Pembangunan rumah gratis 30 unit oleh pemerintah	Masyarakat Masni dapat memakai rumah gratis	
2009	Gempa bumi 7,6 SR		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rumah rusak</li> <li>▪ Warga ketakutan</li> </ul>
	Tsunami kecil		Perahu rusak

#### 4. KALENDER MUSIM

##### 4.1. Pengertian

Dinamika kehidupan masyarakat pedesaan juga dipengaruhi peristiwa/kejadian rutin setiap tahun. Baik itu peristiwa alamiah seperti hujan, angin, kemarau, musim buah maupun peristiwa buatan manusia seperti misalnya musim orang bikin hajatan. Musim angin barat misalnya, nelayan tidak bisa melaut sehingga penghasilan menurun atau sama sekali tidak punya penghasilan. Pada saat itu nelayan dalam kondisi rentan. Musim panen jeruk, petani jeruk sedang memiliki kapasitas berupa cadangan dana. Musim kemarau sumber-sumber air mengering dan banyak penduduk terkena diare. Pada saat itu kerentanan meningkat dan muncul ancaman wabah diare.

Dalam pengelolaan risiko bencana, kalender musim dapat digunakan untuk membantu menemukan perubahan-perubahan kerentanan, kapasitas dan ancaman dalam kurun waktu setahun.

Peristiwa/kejadian rutin di suatu desa bisa berbeda dengan desa lainnya. Karenanya disarankan untuk tidak menggunakan cara silogisme. Kalender musim dapat berupa matriks atau diagram dengan tulisan, angka atau simbol dengan keterangan.

#### 4.2. Manfaat

1. Mengidentifikasi periode ancaman musiman. Misalnya Potensi ancaman (banjir/longsor/kekeringan---> *water related hazard*)
2. Mengidentifikasi dan memahami dinamika kelemahan dan kekuatan sepanjang tahun. Misalnya musim paceklik/persediaan pangan kurang/tidak ada penghasilan. Musim panen atau saat-saat penghasilan tinggi

#### 4.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Mengidentifikasi kejadian-kejadian rutin setiap tahun. Misalnya musim hujan/kemarau, musim panen, musim paceklik, musim pesta/hajatan, musim ikan dan dampaknya bagi masyarakat.
3. Membuat kolom bulan. Gunakan *flip chart* atau metaplan dan mulai mengisikan hasil identifikasi setiap musim
4. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami kalender musim baik-baik dan temukan faktor ancaman, kelemahan dan kekuatan lalu masukkan dalam tabel.

*Kalender Musim Kampung Mansaburi*

Kegiatan rutin/Musim	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Musim angin barat gelombang besar	X	X	X								X	X
Hujan besar dan banjir	X	X									X	X
Panen laut												
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikan oci</li> <li>▪ Ikan kombong</li> <li>▪ Ikan tengiri</li> <li>▪ Penyu</li> <li>▪ Ikan cakalang, bobara, kakap</li> </ul>												
	X	X	X	X								
	X	X	X	X								
			X	X								
		X	X	X	X							
			X	X	x							
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panen sawi, tomat kacang panjang</li> </ul>					X	X	X	X	X			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panen mangga, rambutan, durian</li> </ul>	X	X										X

Kegiatan rutin/Musim	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
▪ Wabah malaria, flu, muntaber									X	X	X	
▪ Keagamaan												X
▪ Kemarau					X	X	X	X				

## 5. SKETSA KEBUN

### 5.1. Pengertian

Kebun jadi bagian penting dalam ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Kebun ini bisa di pekarangan sekitar rumah atau di luar kampung. Biasanya ditanami tanaman pangan alternatif (singkong, ubi rambat, talas), bumbu dan tanaman obat-obatan untuk kebutuhan keluarga.

Pola pemanfaatan kebun dapat menggambarkan ketahanan pangan keluarga. Semakin besar sumber pangan diperoleh dari kebun sendiri artinya semakin tinggi tingkat ketahanan pangan keluarga tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit hasil kebun semakin besar ketergantungan pada sumber pangan dari luar.

Seperti peta, membuat sketsa kebun berarti "meniru dan memindahkan" kenyataan pada kebun ke atas kertas atau media lainnya. Sketsa kebun dapat berupa gambar atau tabel dengan tulisan. Unsur-unsur penting dalam sketsa kebun meliputi 1) keragaman jenis tanaman, 2) prosentase tiap jenis tanaman dalam kebun, 3) pemanfaatan hasil. Semakin banyak sketsa kebun/pekarangan di suatu desa semakin baik.

### 5.2. Manfaat

1. Mengidentifikasi pola pemanfaatan kebun/pekarangan
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kelemahan atau kekuatan pada ketahanan pangan lokal

### 5.2. Manfaat

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Mulailah perjalanan keliling kampung melakukan pengamatan pekarang dan wawancara dengan pemilik. Gambar dan catat hasil pengamatan dan wawancara
3. Kumpulkan dan satukan hasil pengamatan dan wawancara, lakukan pembahasan bersama
4. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami sketsa-sketsa kebun baik-baik dan temukan faktor kelemahan dan kekuatan lalu masukkan dalam tabel.

## 6. HUBUNGAN KELEMBAGAAN

### 6.1. Pengertian

Keberadaan dan sifat hubungan antara masyarakat suatu desa dengan lembaga/organisasi baik eksternal maupun internal masyarakat merupakan unsur penting dalam kajian risiko bencana.



Lembaga/organisasi eksternal misalnya pemerintah kecamatan, PMI, Polsek, Koramil, mahasiswa KKN, LSM, kantor dinas pe:mkab, dan sebagainya. Lembaga/organisasi internal misalnya pengurus RT/RW, kepala kampung/desa, kelompok tani/nelayan, organisasi pemuda, organisasi agama dan sebagainya.

Setiap lembaga/organisasi tersebut di atas memiliki pengaruh-pengaruh pada masyarakat suatu desa. Seberapa besar pengaruh dan apa bentuk pengaruhnya dapat dipetakan dalam metode ini. Semakin banyak dan besar pengaruh positif suatu lembaga/organisasi pada masyarakat (dapat mendukung usaha-usaha pengelolaan risiko bencana), maka kekuatan masyarakat semakin besar. Demikian pula sebaliknya bila pengaruhnya negatif, semakin kecil kekuatan masyarakat. Dalam beberapa situasi, bahkan lembaga/organisasi dapat dikelompokkan menjadi kawan atau lawan.

Ada pula unsur non lembaga/organisasi internal maupun eksternal tetapi ia bisa memiliki pengaruh positif atau negatif bagi masyarakat. Misalnya rentenir, tengkulak ikan, pedagang keliling, pedagang alat pertanian, dan sebagainya. Mereka juga harus dipetakan dalam pengkajian. Metode ini dapat menggunakan matrik maupun alat visualisasi seperti gambar dan metaplan.

## 6.2. Manfaat

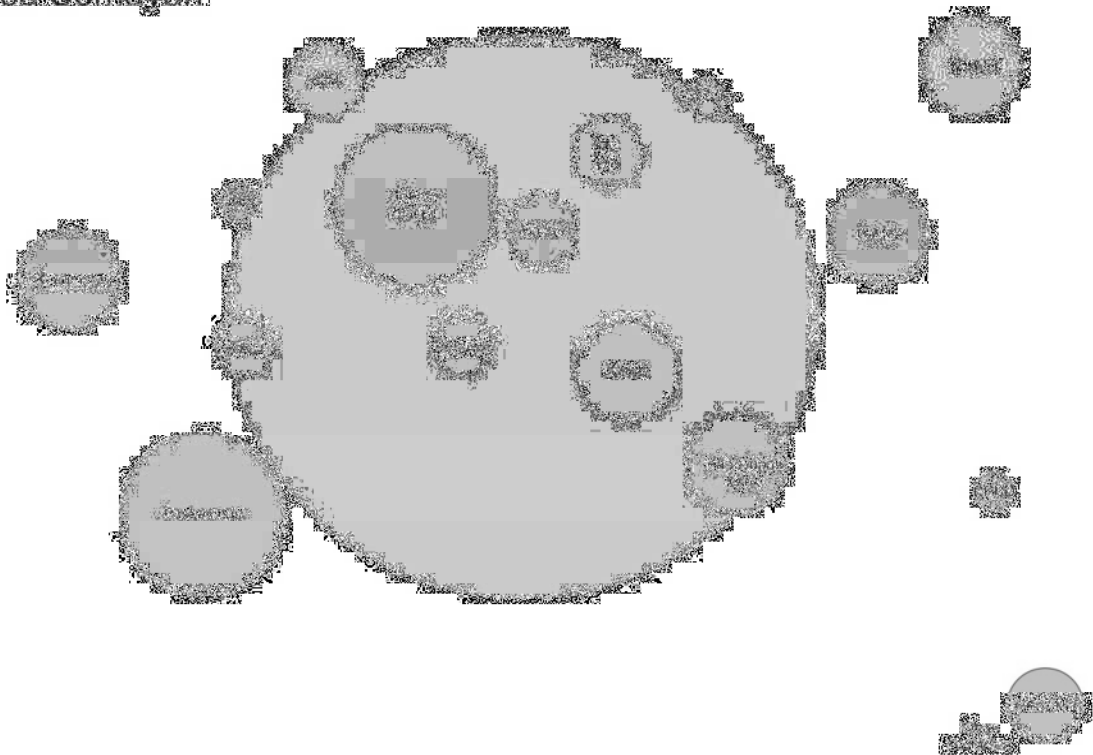
1. Mengidentifikasi pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat
2. Mengidentifikasi potensi pihak pendukung maupun penghambat pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat

## 6.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Membuat daftar lembaga/organisasi dan unsur berpengaruh internal/eksternal
3. Mengidentifikasi besaran pengaruh. Besar pengaruh dapat digambarkan dengan lingkaran. Semakin besar lingkaran semakin besar pengaruhnya.
4. Mengidentifikasi sifat pengaruh. Sifat pengaruh dapat dilambangkan dengan warna lingkaran (misalnya merah pengaruh buruk, kuning pengaruh sedang, hijau pengaruh baik)
5. Buatlah lingkaran besar tanpa warna melambangkan masyarakat kaampung
6. Letakkan lingkaran lembaga/organisasi dekat lingkaran masyarakat. Mulailah menempatkan lingkaran. Semakin jauh dengan masyarakat, berpotongan, atau berada di dalam lingkaran masyarakat.
7. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami hasil identifikasi baik-baik dan temukan faktor kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

## Hubungan dan Kelembagaan Kampung Wariori

<b>Lembaga</b>	<b>Pengaruh (1 – 10)</b>	<b>Sifat Pengaruh (+, -, ?)</b>	<b>Cara Penanganan</b>
Pemerintah Desa	6	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Gereja Katholik	9	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
PUIM	8	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
PKK	3	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
BKM	7	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Gereja Kristen	9	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Gapoktan	10	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Pag. Keluarga Timor	8	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
RT	8	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
RW	3	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Kepala Dusun	3	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
Pos Yandu	10	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi
BKB	8	+	Musyawarah, penjelasan/sosialisasi



## 7. AKTIFITAS KELUARGA

### 7.1. Pengertian

Setiap anggota keluarga dalam suatu rumahtangga memiliki tingkat risiko berbeda tergantung aktifitas masing-masing. Metode ini membandingkan aktivitas sehari-hari anggota keluarga dalam hubungannya dengan potensi risiko melekat padanya.

Seorang ayah bekerja dilokasi aman, maka ia menanggung risiko bencana lebih kecil pada saat bekerja. Anaknya bersekolah di lokasi aman, maka potensi risikonya lebih kecil dibanding saat ia di rumah. Ibu sendirian sepanjang hari di rumah di kawasan tidak aman. Jika ancaman terjadi pada saat jam sekolah anak dan jam kerja suami, maka ibu menanggung risiko bencana lebih besar dari suami dan anaknya. Apalagi ia harus bertanggungjawab menyelamatkan harta benda rumahtangganya.

### 7.2. Manfaat

Mengidentifikasi anggota keluarga paling berisiko pada waktu tertentu

### 7.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Membentuk tim wawancara keluarga dan mulailah wawancara
3. Kumpulkan, perbaiki hasil dan sajikan hasil wawancara. Kaji bersama

4. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami hasil identifikasi baik-baik dan temukan faktor kerentanan dan kapasitas lalu masukkan dalam tabel.

## **8. PETA MOBILITAS WARGA**

### **8.1. Pengertian**

Kegiatan rutin warga desa dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam jangka waktu, jarak dan arah tertentu. Pergi sekolah, bekerja di kota, berburu ke hutan, melaut, berkebun menyebabkan adanya perpindahan sejumlah penduduk desa ke suatu lokasi. Tidak masalah jika lokasi-lokasi tersebut aman. Bagaimana jika lokasi itu dekat sumber ancaman?

Metode ini mengidentifikasi seberapa besar penduduk berada di lokasi aman atau tidak aman dalam kurun waktu tertentu.

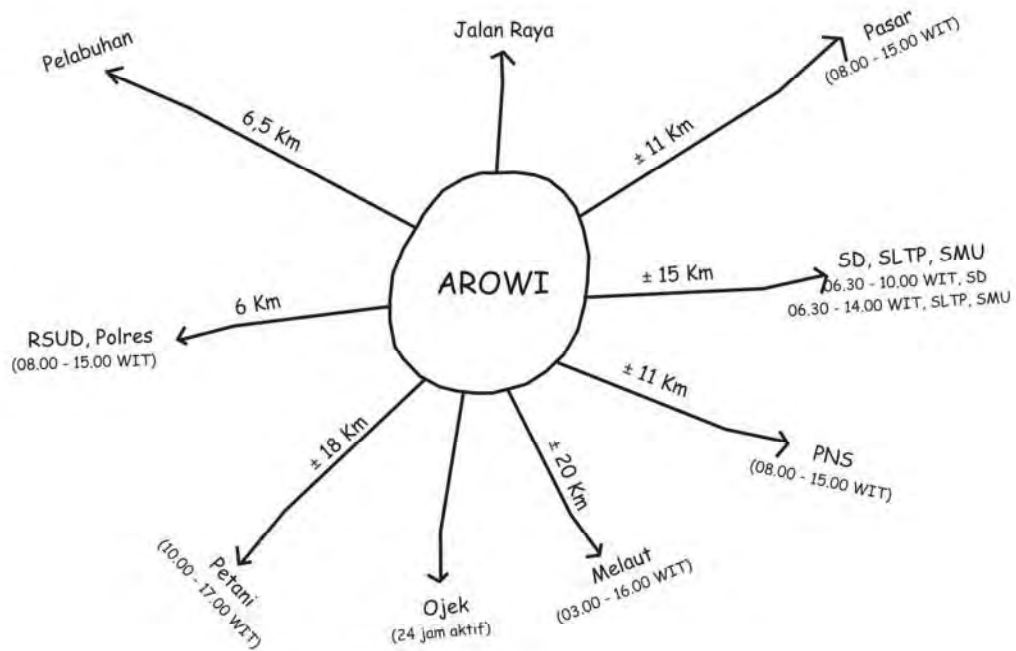
### **8.2. Manfaat**

1. Mengidentifikasi perpindahan penduduk pada kurun waktu, jarak, dan arah tertentu
2. Mengidentifikasi kelompok penduduk berpotensi risiko pada waktu tertentu
3. Mengidentifikasi dinamika kelemahan dan kekuatan kampung akibat mobilitas warga

### **8.3. Proses**

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Membentuk tim wawancara keluarga dan mulailah wawancara
3. Kumpulkan, perbaiki hasil dan sajikan hasil wawancara. Kaji bersama
4. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami hasil identifikasi baik-baik dan temukan faktor kelemahan dan kekuatan lalu masukkan dalam tabel.

**Peta Mobilitas Warga**  
Kampung Arowi, Manokwari Timur



**9. KECENDERUNGAN DAN PERUBAHAN**

9.1. Pengertian

Seiring waktu sejak desa terbentuk hingga saat ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada sektor-sektor kehidupan masyarakat desa dalam kurun waktu tertentu. Misalnya sektor pertanian, peternakan, perdagangan, lingkungan, sosial-politik, demografi, kesehatan dan sebagainya. Perubahan sektoral tersebut dapat berdampak menguntungkan atau merugikan. Metode ini menjadi pelengkap dari metode alur sejarah desa.

9.2. Manfaat

Mengidentifikasi perubahan-perubahan sektoral dan pengaruhnya dinamika ancaman, kelemahan dan kekuatan

9.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Mengidentifikasi sektor-sektor penting kehidupan masyarakat. Tuliskan dan lengkapi dengan kurun waktu sepuluh tahunan atau lebih
3. Catat dan masukkan penjelasan-penjelasan tentang perubahan tiap sektor
4. Kumpulkan, perbaiki hasil dan sajikan hasil. Kaji bersama

5. Menyimpulkan ancaman, kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami hasil identifikasi baik-baik perubahan sektoral dan temukan faktor kelemahan dan kekuatan lalu masukkan dalam tabel.

*Kecenderungan dan Perubahan Kampung Mansaburi*

Sektor/Bidang	Tahun		
	1997 – 2002	2003 – 2008	2009 – 2010
Jumlah penduduk	3	5	8
Fasilitas umum	1	3	6
Bantuan pemerintah	1	3	5
Gempa bumi	2	2	7
Banjir	4	4	6
Pertanian	2	5	7
Hasil tangkapan ikan	9	9	5
Peternakan	2	4	6
Pendidikan	1	2	3
Keg. keagamaan	5	5	6

## 10. ANALISA MATA PENCAHARIAN

### 10.1. Pengertian

Jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan produktif pada satu keluarga di suatu desa bisa sangat beragam. Semakin beragam boleh jadi semakin kuat secara ekonomi. Tetapi itu juga berarti semakin banyak pula permasalahannya. Metode ini berguna untuk melihat secara lebih spesifik setiap kegiatan produktif serta permasalahannya.

### 10.2. Manfaat

Mengidentifikasi kekuatan ekonomi warga desa melalui jenis pekerjaan dan masalah-masalahnya

### 10.3. Proses

1. Menjelaskan tujuan, cara kerja dan hasil
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan (utama dan sampingan) masyarakat. Tuliskan dalam tabel dan lengkapi dengan kurun waktu sepuluh tahunan atau lebih

3. Buatlah tabel dengan kolom (1) Jenis pekerjaan, (2) pelaku, (3) hasil, (4) masalah-masalah.
4. Mulailah mengisi kolom-kolom secara bersama.
5. Menyimpulkan kelemahan dan kekuatan. Buatlah tabel dengan kolom; 1) ancaman, 2) kelemahan dan 3) kekuatan. Pahami hasil identifikasi baik-baik dan temukan faktor kelemahan dan kekuatan lalu masukkan dalam tabel.

*Analisa Mata Pencaharian Kampung Pasir Putih*

Jenis Kegiatan	Pelaku	Hasil	Pemanfaatan Hasil	Masalah
Nelayan	Bapak, ibu, anak	Ikan, gurita, cumi, bia, teripang, kepiting	Dijual dan dimakan sendiri	Gelombang besar, hujan, angin selatan
Berkebun	Bapak dan ibu	Keladi, kasbi, ubi, jagung, pisang, sayuran, buah-buahan	Dijual dan dimakan sendiri	Hama, kesuburan tanah berkurang, pencuri, kemarau
PNS	Bapak dan ibu	Gaji	Kebutuhan hidup	
Peternak	Bapak	Telur dan daging	Dijual dan dimakan sendiri	Merusak lingkungan jika tidak dikandangkan, penyakit hewan
Pengusaha/pedagang	Bapak dan ibu	Uang/keuntungan	Kebutuhan hidup	Kurang pelanggan/pembeli, banyak dihutang
Buruh kasar	Bapak dan ibu	Upah/uang	Kebutuhan hidup	Pengangguran

